



PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Hak Cipta Pada Penulis

Tidak boleh diproduksi sebagian atau keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis. Kutipan Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 10 UU No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1. Pasal 9 Ayat (3): Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.
2. Pasal 10: Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolannya”

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Penulis:

Masykurillah, Zuhairi, Abdul Mujib, Afifuddin Ahmad Robbani, Ahmad Yusron Al Asna, Assyifaun Nadia Khoiriyah, Dewi Istiana, Ema Oktafiani, Faris Fathurrohman, Heni Yuliana Wati, Hawa Failasifa Salsabila, Ismail Sujono, Latri Ida Aini, Muhammad Yusril Hardian, Siti Khusnul Khotimah

Editor:

Dr. Abdul Mujib, M.Pd.I

Desain Cover

Team Creative

Lay Out

Team Creative

ISBN: 978-623-88141-0-7

16 x 24 cm; viii + 199 hal

Cetakan, Maret 2022

Diterbitkan Oleh:

CV AMY Publishing

Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Lampung Homepage: <https://amypublishing.com/>

E-Mail: publishingamy@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku ini tanpa halangan yang berarti.

Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, serta para sahabat, dan seluruh umat Islam yang selalu taat kepada ajarannya. Dalam upaya penulisan Buku Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Kritik dan saran demi perbaikan buku ini sangat penulis harapkan. Dan akhirnya semoga buku ini dapat bermanfaat bagi hasanah ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam terjadi pertama kali di zaman Nabi Muhammad SAW, dalam pendidikan tersebut telah mencetak para Ulama yang mampu mengembangkan dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pejuang negara. Sejarah telah tercatat, bahwa perjuangan para Ulama bukan perkara remeh dalam upaya menyebarkan agama Islam, termasuk dalam pendidikannya. Sehingga pada abad 13 M, Islam di Nusantara telah Berjaya dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam.

Dan mampu mencetak generasi selanjutnya yang melanjutkan dan menyebarkan risalah dakwah dalam upaya proses Islamisasi di Nusantara. Serta sampai mewujudkan Negara Indonesia yang mereka dari kolonialisme, dalam sejarah dinamika pendidikan Islam itu sendiri mengalami berbagai perubahan yang cukup menarik. Perubahan tersebut diharapkan mamapu mencetak generasi bangsa yang mampu memberi manfaat bagi agama, umat dan negaranya. Dalam proses perubahan tersebut menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi model tradisi keilmuan dalam Islam itu sendiri. Kemudian Perdebatan tentang teori-teori pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia secara umum mendefinisikan pendidikan Islam dalam dua tataran: idealis dan pragmatis. Pada tataran idealis pendidikan Islam diandaikan sebagai suatu sistem yang independen (eksklusif) dengan sejumlah kriterianya yang serba Islam. Definisi ini secara kuat dipengaruhi oleh

literatur Arab yang masuk ke Indonesia baik dalam bentuk teks asli, terjemahan maupun sadurannya. Sedangkan pada tataran pragmatis, pendidikan Islam ditempatkan sebagai identitas (ciri khusus) yang tetap berada dalam konteks pendidikan nasional. Perkembangan- perkembangan aktual di Indonesia khususnya selama tiga dekade terakhir sangat mempengaruhi munculnya definisi pragmatis ini

Metro, 8 April 2022
Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i	
KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	vii	
BAGIAN I	PENDIDIKAN DAN RADIKALISME AGAMA ISLAM	1
	A. Pendahuluan	1
	B. Pembahasan	2
	C. Kesimpulan	10
	D. Daftar Pustaka	11
BAGIAN II	KONSEP TENTANG LEARNING SOCIETY DALAM PERSFEKTIF PENDIDIKAN ISLAM	12
	A. Pendahuluan	12
	B. Pembahasan	12
	C. Kesimpulan	19
	D. Daftar Pustaka	19
BAGIAN III	REALITA LEARNING SOCIETY DALAM PERSFEKTIF PENDIDIKAN ISLAM	21
	A. Pendahuluan	21
	B. Pendidikan Masyarakat Masa Orde Baru	23
	C. Pendidikan Masyarakat Masa Sekarang.	25
	D. Kesimpulan	30
	E. Daftar Pustaka	32
BAGIAN IV	DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM SEPANJANG SEJARAH	34
	A. Pendahuluan	34
	B. Dinamika Pendidikan Islam Orde Lama	35
	C. Dinamika Pendidikan Islam Orde Baru .	36
	D. Kesimpulan	45
	E. Daftar Pustaka	45

BAGIAN V	PERIODISASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA	48
	A. Pendahuluan	48
	B. Priodesasi Pendidikan Islam.....	48
	C. Kesimpulan.....	55
	D. Daftar Pustaka	56
BAGIAN VI	MASUKNYA ISLAM DI INDONESIA DENGAN BENTUK-BENTUK PENDIDIKANNYA.....	57
	A. Pendahuluan	57
	B. Pembahasan.....	57
	C. Daftar Pustaka	65
BAGIAN VII	SISTEM PEMBELAJARAN ISLAM PADA MASA ORGANISASI KEAGAMAAN.....	66
	A. Pendahuluan	66
	B. Pembahasan.....	67
	C. Kesimpulan.....	78
	D. Daftar Pustaka	79
BAGIAN VIII	PEMBELAJARAN ISLAM PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA.....	81
	A. Pendahuluan	81
	B. Pembahasan.....	82
	C. Kesimpulan.....	86
	D. Daftar Pustaka	87
BAGIAN IX	PEMBELAJARAN ISLAM PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG.....	88
	A. Pendahuluan	88
	B. Daftar Pustaka	95
BAGIAN X	PEMBELAJARAN ISLAM PADA MASA KEMERDEKAAN RI (ORDE LAMA).....	96
	A. Pendahuluan	96
	B. Kondisi Setelah Kemerdekaan RI	98
	C. Keberadaan pendidikan Islam	100

	D. Kesimpulan.....	104
	E. Daftar Pustaka	104
BAGIAN XI	PEMBELAJARAN ISLAM PADA MASA ORDE BARU.....	105
	A. Pendahuluan	105
	B. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Kemerdekaan	106
	C. Kebijakan Pemerintah Orde Baru di Bidang Pendidikan Islam	106
	D. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan Islam	107
	E. Kesimpulan.....	112
	F. Daftar Pustaka	112
BAGIAN XII	PEMBELAJARAN ISLAM PADA MASA REFORMASI	114
	A. Pendahuluan	114
	B. Pembelajaran Islam Pada Masa Reformasi	115
	C. Kesimpulan.....	125
	D. Daftar Pustaka	126
BAGIAN XIII	PEMBAHARUAN PEMBELAJARAN ISLAM DI INDONESIA	128
	A. Pendahuluan	128
	B. Pembaharuan Pembelajaran Islam	129
	C. Kesimpulan.....	136
	D. Daftar Pustaka	137
BAGIAN XIII	PENDIDIKAN ISLAM DALAM TANTANGAN DAN HARAPAN DI INDONESIA	139
	A. Pendahuluan	139
	B. Pembahasan	140
	C. Daftar Pustaka	154
BAGIAN XVI	PENDIDIKAN WANITA DALAM SEJARAH ISLAM DI INDONESIA	155

A. Pendahuluan	155
B. Pembahasan.....	156
C. Kesimpulan.....	162
D. Daftar Pustaka	163

BAGIAN I

PENDIDIKAN DAN RADIKALISME

AGAMA ISLAM

Zuhairi

A. Pendahuluan

Berbagai macam kasus kekerasan yang merebak dalam kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan kita, mengindikasikan bahwa pendidikan belum mempunyai peran signifikan dalam proses membangun kepribadian bangsa kita yang punya jiwa sosial dan kemanusiaan. Radikalisme agama adalah salah satu problem nasional yang perlu dipecahkan. Salah satu upaya strategisnya adalah dengan membangun paradigma pendidikan yang berwawasan kemanusiaan. Dengan pendidikan yang bermodelkan seperti ini maka sikap moderatisme dalam beragama adalah hasil yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Dan ini sangat penting karena memiliki benah merah pemikiran yang jelas.

Mencetak calon pemimpin bangsa tidak bisa lepas dari peran dan fungsi pendidikan. Siapa saja yang kini telah menjadi orang-orang sukses adalah berkat hasil dari produk pendidikan yang bisa diandalkan. Praktik korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum penguasa adalah cermin dari buram dan minimnya produk pendidikan kita. Pendidikan bukan hanya berupa transfer ilmu (pengetahuan) dari satu orang ke satu (beberapa) orang lain, tapi juga mentransformasikan nilai-nilai (bukan nilai hitam di atas kertas putih) ke dalam jiwa, kepribadian, dan struktur kesadaran manusia itu. Hasil cetak kepribadian manusia adalah hasil dari proses transformasi pengetahuan dan pendidikan yang dilakukan secara humanis.

Tapi, selama ini kita hanya melihat pendidikan hanya sebagai momen “ritualisasi”. Makna baru yang dirasakan cenderung tidak begitu signifikan. Apalagi, menghasilkan insan-insan pendidikan yang memiliki karakter manusiawi. Pendidikan kita sangat miskin dari sarat keilmuan yang meniscayakan jaminan atas perbaikan kondisi sosial yang ada. Pendidikan

hanya menjadi “barang dagangan” yang dibeli oleh siapa saja yang sanggup memperolehnya. Akhirnya, pendidikan belum menjadi bagian utuh dan integral yang menyatu dalam pikiran masyarakat keseluruhan.

B. Pembahasan

1. Pendidikan Islam

Sistem pendidikan nasional yang ada selama ini mengandung banyak kelemahan. Dari soal buruknya manajemen pendidikan sampai pada soal mengenai minimnya dana untuk pengembangan pendidikan. Ahli pendidikan, HAR Tilaar, seperti dikutip Qodri Azizi, menyebut ada beberapa kelemahan dalam sistem pendidikan nasional.

Pertama, sistem pendidikan itu kaku dan sentralistik. Pola uniformitas dalam tubuh persekolahan, misalnya dalam pembuatan kurikulum yang tidak dipahami menurut kebutuhan masing-masing penyelenggara pendidikan.

Kedua, sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat. Di sini masyarakat hanya dianggap sebagai obyek saja. Masyarakat tidak pernah diperlakukan atau diposisikan sebagai subyek dalam pendidikan. Ketiga, dua problem di atas didukung oleh sistem birokrasi kaku yang dijadikan alat kekuasaan atau alat politik penguasa.¹

Di saat bangsa kita sedang mengalami devaluasi nilai dan moralitas maka sangat diperlukan wacana mengenai pendidikan yang memberdayakan. Pendidikan adalah media kultural untuk membentuk “manusia”. Kaitan antara pendidikan dan manusia sangat erat sekali, tidak bisa dipisahkan. Kata Driyarkara, pendidikan adalah “humanisasi”, yaitu sebagai media dan proses pembimbingan manusia muda menjadi dewasa, menjadi lebih manusiawi (“humanior”). Jalan yang ditempuh tentu menggunakan massifikasi jalur kultural. Tidak boleh ada model “kapitalisasi pendidikan” atau “politisasi pendidikan”.

¹ Qodri A. Azizi, Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h 10

Karena, pendidikan secara murni berupaya membentuk insan akademis yang berwawasan dan berkepribadian kemanusiaan. Banyak sekali kritikus pendidikan yang sangat menyayangkan kondisi buruk pendidikan karena ternyata sudah keluar dari jalur dan cita-cita aslinya. Tulisan ini akan banyak menyoroti fenomena pendidikan dengan menggali pemikiran Paulo Freire dan Ivan Illich. Seperti kita ketahui bersama, “otokritik pendidikan” niscaya untuk selalu dilakukan agar pendidikan bisa kembali pada cita-cita murninya semula.

2. Pendidikan dan Realitas Sosial

Mengaitkan antara kurikulum dengan realitas sosial adalah strategi untuk menciptakan model pendidikan yang berorientasi kemanusiaan. Kurikulum sengaja dibentuk untuk membaca realitas sosial. Kurikulum adalah “alat baca” dan panduan strategis bagi peserta didik untuk meneropong dunia sekitarnya. Sehingga, manakala mereka sudah selesai dari bangku sekolah formal, dengan hasil didikan yang diperolehnya selama ini maka itu bisa difungsikan untuk membaca realitas sekitarnya.

Lantas, bagaimana upaya kita dalam proses membangun kurikulum yang berbasis kemasyarakatan? Langkah awal yang bisa ditempuh adalah dengan merombak pola pikir dan kognisi para pendidik selama ini. Mereka adalah para pembuat kurikulum yang harus bertanggung jawab atas kualitas dan mutu pendidikan yang dikonsepkannya. Para pendidik dan pembuat kurikulum tidak mempunyai keseriusan dalam membuat konsep dan gagasan yang lebih serius dalam upaya membangun masyarakat yang cerdas. Di sini cerdas tidak dimaknai sebagai bentuk penguatan kognisi saja, tapi juga penguatan pada aspek emosi, kepribadian, dan kesadaran diri si terdidik.

Mau tidak mau, si terdidik harus punya kesadaran kritis dalam meneropong atau menyoroti realitas yang dihadapinya. Obyek yang diamati akan sangat banyak, beragam, dan kompleks sekali. Sehingga, diperlukan perangkat analisis yang amat jitu dan tepat sasaran. Kemungkinan karakter pendidikan semacam ini perlu dibarengi dengan

pengkondisian atas situasi proses belajar-mengajar yang elegan, egaliter, demokratis, dan manusiawi. Tanpa itu akan sangat mustahil bisa diharapkan.

Kembali pada soal kasus radikalisme agama dan moderatisme beragama. Seperti telah disebut terdahulu bahwa pendidikan humanis adalah solusi paradigmatis atas kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan beragama kita yang pernah mengalami anomali akibat kekerasan yang merebak dalam kehidupan sosial kita, terutamanya yang dikaitkan dengan problem agama. Sikap anti-kemanusiaan yang ditimbul karena padangan sempit ini disebabkan karena beberapa kelompok Islam radikal gagap dalam membaca realitas sosial. Apapun wujud yang ada di muka bumi dianggap sebagai bentuk kekafiran dan kekufuran maka mereka harus “memberantasnya” sampai ke akar-akarnya, tanpa melihatnya secara lebih terbuka dan memahami kompleksitas obyek realitas yang dibacanya. Akhirnya, kekerasan kemudian yang berbicara. Perilaku kekerasan yang dihindari oleh rasa emosi yang mendalam selamanya tidak akan memecahkan persoalan. Hanya dengan keterbukaan dan moderasi (tawassuth) maka kita akan bisa melihat realitas secara obyektif. Pembacaan demikian adalah tugas penting pendidikan. Sejauhmana pendidikan itu mampu membangun kepribadian manusia yang berkarakter terbuka, manusiawi, dan memiliki kesadaran yang tinggi ketika harus menghadapi realitas yang diliputi bertumpuk persoalan pelik. Hanya dengan kedewasaan yang tinggi, manusia terdidik akan mampu menghadapi persoalan yang tengah dihadapinya. Sesulit apapun, segala persoalan akan terselesaikan dengan baik. Pendidikan yang mengajarkan anti-kekerasan alias yang berwajahkan humanis adalah cita-cita dan harapan kita semua. Kita sangat berharap mudah-mudahan para pengambil kebijakan pendidikan di negeri ini mau dan sudi memikirkan hakikat pendidikan yang diterapkan dalam kurikulum di berbagai sekolah dan perguruan tinggi. Dan harus ada ketegasan dalam membuat suatu jaminan bahwa pendidikan sangat jauh dari jiwa kapitalisasi. Pendidikan adalah wilayah kultural yang tidak bisa dipolitisasi dan dikapitalisasi.

3. Radikalisme

Fenomena radikalisme atau fundamentalisme agama terutama menjadi mengedepan terkait dengan peristiwa menghebohkan dan menyentak dunia, yaitu peristiwa Black September. Pada tanggal 11 September 2001 dunia tersentak dengan peristiwa penghancuran *World Trade Center* (WTC) dengan cara menabrakkan pesawat yang dibajak oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan gerakan Islam.² Symbol keangkuhan Amerika itu pun porak poranda dan menyisakan duka dan derita mendalam bagi orang-orang yang keluarganya meninggal karena peristiwa tersebut. Dunia menjadi tersentak kembali melalui peristiwa Bali Blast, 12 Oktober 2002. Pengeboman yajg meluluhlantakkan pusat hiburan Diskotik Sari Club, di Legian Bali itu menandai bahwa dunia sedang berada di dalam tekanan terorisme yang ujung-ujungnya dilakukan oleh gerakan radikalisme agama. Melalui penangkapan terhadap tokoh-tokohnya yang diidentifikasi sebagai Islam radikal, lengkaplah sudah simbolisasi Islam sebagai pemicu gerakan terorisme berbaju agama. Peristiwa pengeboman juga terjadi di Inggris, yaitu pengeboman kereta api bawah tanah di London, tanggal 7 dan 21 Juli 2005, yang juga diidentifikasi dilakukan oleh kelompok Islam garis keras yang melakukan kekerasan sebagai akibat tindakan politik Amerika Serikat yang melakukan invasi terhadap Irak. Anehnya, gerakan teorisme juga dilakukan di Mesir, yang selama ini menjadi symbol kebudayaan Islam. Ternyata mereka yang terlibat sesuai dengan laporan resmi adalah kelompok Islam garis

² Sejarah mencatat berbagai kekerasan yang dipicu oleh kekerasan agama. Misalnya penembakan etnis di California dan Illinois 1999, penyerangan kedutaan Amerika di Afrika 1998, pemboman klinik aborsi di Alabama dan Georgia 1997, peledakan bom pada Olimpiade Atlanta dan penghancuran kompleks perumahan militer Amerika Serikat di Dhahran Arab Saudi 1996, penghancuran secara tragis bangunan Federal di Oklahoma City tahun 1999 dan peledakan World Center di New York City 1993. Insiden dan kekerasan tersebut oleh Marx Jurgensmeyer memiliki keterkaitan dengan ekstremis-ekstremis keagamaan Amerika diantaranya milisi Kristen, gerakan Christian Identity dan aktivis-aktivis Kristen ant-aborsi. Periksa Yoyo Hambali, "Fundamentalisme dan Kekerasan Agama...", h. 8

keras. Tuduhan terhadap kelompok Islam garis keras tentunya didasari oleh kenyataan bahwa yang melakukan adalah mereka yang diidentifikasi sebagai pengaut Islam radikal.³ Radikalisme atau fundamentalisme tidak muncul dari ruang hampa. Mengikuti paham kaum fakta social, bahwa radikalisme adalah sebuah gerakan yang terkait atau disebabkan oleh fakta lain. Genealogi radikalisme⁴ dapat ditilik dari beberapa penyebab antara lain,⁵ yaitu:

Pertama, tekanan politik penguasa. Radikalisme atau fundamentalisme muncul disebabkan oleh tekanan politik penguasa terhadap keberadaannya.

Di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia, fenomena radikalisme atau fundamentalisme muncul sebagai akibat otoriterisme. Dalam kasus Orde Baru, Negara selalu memabat habis yang diidentifikasi sebagai gerakan radikal. Baginya, radikalisme adalah musuh nomor satu dan dijadikan sebagai *common enemy* melalui berbagai media transformasi. Radikalisme kiri dan kanan sama saja. Radikalisme kiri seperti Gerakan New Left, yang pernah berkembang di Indonesia di tahun 1980-an dan terus memperoleh momentum di tahun-tahun 1990-an melalui Partai Rakyat Demokratik (PRD) merupakan eksponen organisasi yang dianggap sebagai musuh negara. Begitu kerasnya tekanan

³Islam garis keras atau Islam radikal merupakan kelompok yang paling rawan terkena tuduhan sebagai gerakan terorisme. Hal ini tidak lepas dari tindakan yang dilakukan oleh kalangan Islam keras, seperti Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Habib Rizieq Syihab yang melakukan perusahan tempat hiburan yang dinilai sebagai tempat maksiat. Lasykar Jihad pimpinan Dja'far Umar Thalib yang berjihad di wilayah konflik SARA di Maluku, dan sebagainya

⁴Istilah genealogi radikalisme dinukil dari Happy Susanto, "Menyoroti Fenomena Radikalisme Agama", 10/9/2003

⁵Abdul Aziz Thaba membuat tipologi hubungan antara Islam dan Negara dalam tiga kategori, yaitu hubungan antara Islam dan Negara yang bercorak antagonis, resiprokal-kritis dan Islam dan Negara yang saling membutuhkan. Hubungan antagonis terjadi di awal Orde baru sampai awal tahun 1980-an. Hubungan saling mengintai terjadi pada awal tahun 1980-an sampai pertengahan tahun 1980-an dan hubungan simbiosis terjadi di era awal tahun 1990-an sampai pertengahan tahun 1990-an. Periksa Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

terhadap gerakan kiri radikal ini, maka banyak tokohnya yang ditangkap, disiksa dan bahkan ada yang hilang tidak tentu rimbanya. Di era reformasi, gerakan-gerakan kiri radikal tampaknya kehilangan makna signifikannya sehingga banyak tokohnya yang memasuki partai politik, misalnya Budiman Sujatmiko yang kemudian masuk ke dalam Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P). Sementara yang lain, jarang lagi didengar aktivistasnya. Pintu demokrasi yang telah dibuka oleh Negara, sepertinya menutup celah perjuangan yang selama ini menjadi isu utamanya.

Orde Baru juga sangat keras terhadap gerakan radikalisme kanan. Di antara yang paling menonjol adalah isu Komando Jihad, di pertengahan tahun 1980-an. Banyak tokoh Islam yang diidentifikasi sebagai pemimpin atau anggota Komando Jihad yang ditangkap dan ditahan. Usaha untuk memberangus gerakan-gerakan radikal Islam itupun terus berlangsung sampai periode munculnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di pertengahan tahun 1990-an.¹⁰ Jika gerakan radikal kiri berada dalam keadaan mati suri, tidak demikian halnya dengan gerakan radikalisme atau fundamentalisme Islam. Gerakan ini sepertinya justru menemukan lahan subur di era reformasi. Gerakan radikal muncul seperti cendawan di musim hujan. Di era reformasi yang mengedepankan demokratisasi dan Hak Asasi manusia, tampaknya tidak menemukan ruang gerak untuk melakukan pemberangusan terstruktur dan sistematis terhadap gerakan Islam radikal atau fundamental. Tersebab oleh alasan itu, maka berbagai manuver gerakan Islam radikal atau fundamental tidak terdeteksi atau sengaja dibiarkan di dalam kiprahnya. Terjadinya berbagai kekerasan agama tidak serta merta menyebabkan penihilan terhadap organisasinya. Jika terjadi kekerasan agama, seperti peledakan, penyerangan dan sebagainya, maka cukup actor-aktornya yang ditahan, diadili atau dihukum sesuai dengan tindakannya. berbeda dengan masa Orde baru, yang tidak hanya penangkapan dan pemberian hukuman terhadap aktornya tetapi juga pelarangan terhadap organisasinya.

Munculnya berbagai gerakan Islam yang berkonotasi radikal akhir-akhir ini, seperti Hizbut Tahrir Indonesia,

Majelis Mujahidin Indonesia, Gerakan Salafi, Lasykar Jundullah, Lasykar Jihad, Gerakan Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah dan berbagai gerakan keagamaan bercorak local adalah sebuah potret tentang merebaknya gerakan-gerakan keagamaan di tengah euphoria keterbukaan, demokratisasi dan hak asasi manusia.

Kedua, kegagalan rezim secular dalam merumuskan kebijakan dan mengimplematasikannya di dalam kehidupan masyarakat. Rezim secular di Negara-negara berkembang yang kebanyakan mengadopsi system kapitalisme ternyata gagal dalam mengimplematasikan kebijakannya di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Kegagalan pembangunan yang mengakomodasi teori-teori modernisasi,⁶ ternyata berdampak terhadap ketidakpercayaan masyarakat terhadap model pembangunan yang diadopsi dari pengalaman-pengalaman Negara barat tersebut. Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Negara-negara berkembang di antaranya disebabkan oleh kesalahan di dalam penerapan teori pembangunan yang bertumpu kepada bantuan luar negeri. Dana pembangunan luar negeri yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan di dalam berbagai sector ternyata juga dikorupsi. Kebocoran dana pembangunan, sebagaimana dilansir oleh Soemitro Djojohadikusumo bahkan mencapai angka 30% dari total anggaran pembangunan.⁷ Artinya, ada kesenjangan antara praktik

⁶ Teori pembangunan yang dimaksud di sini adalah satu varian dari teori pembangunan yang dikemukakan oleh Harold dan Domar, yang menyatakan bahwa pembangunan dapat dilaksanakan kalau ada dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan. Jika dana dalam negeri tidak ada, maka salah satu solusinya adalah dengan bantuan luar negeri. Teori ini memang pernah manjur untuk mengatasi kesulitan kembali dalam pembangunan di Inggris. Melalui perjanjian Marshall antara Inggris dan America Serikat disepakati untuk memberikan bantuan dalam kerangka membangun kembali Inggris. Periksa Arief Budiman, *Teori-teori Pembangunan di Dunia Ketiga*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994)

⁷ Yang juga menarik adalah cerita pembangunan yang dilakukan oleh Brazil yang juga memanfaatkan bantuan Negara asing dalam rangka pembangunan Negara. Pada awalnya Brazil seakan mau bangkit dari tidurnya ketika perkembangan ekonomi negaranya mencapai angka yang signifikan, namun karena berbagai kebocoran dana pembangunan, maka Negara Barzil

pembangunan dengan kebijakan yang dirumuskan. Moralitas pembangunan yang jeblok seperti ini kemudian mengilhami munculnya gerakan-gerakan anti korupsi, kolusi dan nepotisme yang melanda kehidupan birokrasi dan masyarakat. Di tengah ketidakpercayaan ini, maka muncullah gagasan Islam sebagai alternative untuk solusi. Tidak salah jika orang melirik terhadap gerakan-gerakan yang memberikan janji perbaikan, melalui solusi Islam. Ketika Negara tidak lagi dapat mengatasi kemungkarannya, maka tampillah mereka untuk memberantasnya. Maka, dilakukanlah gerakan-gerakan *amar ma'ruf nahi mungkar* melalui cara dan mekanisme yang menurutnya absah. Tampillah di sini gerakan Islam garis keras yang melakukan tindakan menurut konstruksi sosialnya dan yang dianggapnya benar.

Ketiga, respon terhadap barat. Kebanyakan isu yang diangkat ke permukaan oleh kelompok ini adalah responnya terhadap apa pun yang datangnya dari barat. Isu tentang berbeda dengan masa Orde baru, yang tidak hanya penangkapan dan pemberian hukuman terhadap aktornya tetapi juga pelarangan terhadap organisasinya.

Munculnya berbagai gerakan Islam yang berkonotasi radikal akhir-akhir ini, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Gerakan Salafi, Lasykar Jundullah, Lasykar Jihad, Gerakan Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah dan berbagai gerakan keagamaan bercorak local adalah sebuah potret tentang merebaknya gerakan-gerakan keagamaan di tengah euphoria keterbukaan, demokratisasi dan hak asasi manusia.

Kekerasan, sekali lagi bukan tipe agama-agama. Agama selalu menawarkan doktrin keselamatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, jika terjadi kekerasan agama hakikatnya adalah implikasi dari tafsir agama yang cenderung literalistic, sempit, dan hitam putih.

justu terpuruk kondisi perekonomiannya. Cerita tentang Barzil itu terekam dalam "Kisah Sukses Yang Gagal". Periksa Emanuel Subangun, *Dari Saminisme ke Pos-Modernisme*. (Jogyakarta: Alocita, 1995)

Tafsir agama itu kemudian dianggap sebagai agama yang bercorak doktriner. Jika ini yang banyak terjadi, maka program kerukunan antar umat beragama yang semenjak Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara, melalui konsep tri kerukunan umat beragama, yaitu: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah hanyalah akan menjadi pepesan kosong.

C. Kesimpulan

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan dalam empat hal, yaitu:

1. Radikalisme, fundamentalisme atau kekerasan agama hakikatnya adalah konstruksi social tentang paham dan tindakan keagamaan yang dilakukan oleh golongan Islam tertentu. Labeling ini diberikan oleh golongan lain sesuai dengan konsepsi mereka. Sementara itu, pelakunya sendiri menganggap bahwa pemahaman dan tindakan keberagamaannya memiliki kesesuaian dengan apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh ajaran agama yang dipeluknya. Dualitas makna ini yang sering menjadikan hubungan di antara keduanya memasuki tegangan-tegangan yang krusial.
2. Radikalisme agama adalah respon social terhadap realitas social yang dikonstruksi sebagai “menyimpang” dari ajaran agama yang benar. Isu-isu yang dikembangkan terkait dengan ketidakadilan barat terhadap Islam, modernisasi yang salah arah dan kegagalan pemerintah secular dalam menata dan membangun masyarakatnya.
3. Dinamika hubungan antar agama dan antara agama dengan negara sering terkontaminasi dengan tindakan-tindakan beragama yang dikonstruksi oleh kelompok yang dikonstruksi sebagai radikal. Isu tentang penerapan syariat Islam di dalam suatu Negara, sering menjadi arus utama terjadinya konstruksi social terhadap radikalisme atau fundamentalisme. Demikian pula tindakan teror yang dilakukan dengan mengumandangkan Allahu Akbar juga menjadi penyebab pemojokan Islam di dalam kancah hubungan agama-agama.

4. Dalam hubungan agama-agama maka masing-masing pemeluk agama harus menyadari universalisme-partikularitas agama di dalam kehidupan bermasyarakat. Agama memiliki doktrin universal, namun sekaligus ia particular ketika telah berada di tangan manusia dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Arief Budiman, *Teori-teori Pembangunan di Dunia Ketiga*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- Emanuel Subangun, *Dari Saminisme ke Pos-Modernisme*. (Jogyakarta: Alocita, 1995)
- Happy Susanto, "Menyoroti Fenomena Radikalisme Agama", 10/9/2003
- Konsep *Religious Revolution* dan *Religion subcultures* dinukil dari Happy Susanto, "Menyoroti Fenomena Kekerasan Agama, 10/9/2003
- Peter Beyer, *Religion and Globalization*. (London: Sage Publication, Ltd., 1994).
- Qodri A. Azizy, Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003),
- Niels Mulder, *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999)

BAGIAN II

KONSEP TENTANG LEARNING SOCIETY DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Masykurillah

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dengan pendidikan akan meninggikan derajat manusia, manusia akan dianggap berharga bila memiliki pendidikan yang berguna bagi sesamanya.

Dalam menunjang berhasilnya pendidikan membutuhkan lingkungan yang mendukung dalam hal belajar. Masyarakat dan keluarga yang gemar belajar tentunya akan berpengaruh sangat baik bagi perkembangan belajar anak. Untuk itu konsep learning society hendaknya dipahami dan kemudian dilaksanakan. Kemudian, masa dari pendidikan sangatlah panjang, banyak orang yang beranggapan bahwa pendidikan itu berlangsung hanya di sekolah saja, tetapi dalam kenyataannya pendidikan berlangsung seumur hidup melalui pengalaman-pengalaman yang dijalani dalam kehidupannya. Islam juga menekankan pentingnya pendidikan seumur hidup, Nabi pernah bersabda : Tuntutlah ilmu dari buain sampai meninggal dunia.

B. Pembahasan

Sebelum memahami konsep learning society ada baiknya harus paham terlebih dahulu arti dari kata tersebut. Learning society diartikan sebagai masyarakat belajar. Learning society adalah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam kegiatan pendidikan. Diharapkan masyarakat dan keluarga berperan aktif dalam hal belajar. Tentulah jika masyarakat dan keluarga telah aktif untuk gemar belajar maka akan terbentuk bangsa yang rajin belajar.

Seiring dengan gencarnya sosialisasi tentang tema masyarakat madani (civil society), pada saat ini juga sering disosialisasikan mengenai perlunya masyarakat belajar (learning society) atau biasa juga disebut dengan educational society.

Learning society secara praktek sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia -meski belum secara maksimal- namun secara konsep masih meraba-raba. Artinya, bila civil society telah mulai diperkenalkan dan disosialisasikan, maka untuk learning society belum ditemukan konsep yang matang dan fixed, sehingga istilah learning society belum populer didengungkan apalagi dimasyarakatkan.

Pembahasan tentang learning society pada tahun 1971 telah diperkenalkan oleh Torsten Husen. Menurut pendapatnya, seperti yang dikutip oleh Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, learning society adalah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam bidang pendidikan.

Masyarakat Indonesia masih dalam tahap yang disebut dengan schooling society dan reading society, sehingga perlu upaya keras untuk menuju jenjang lebih tinggi. Jenjang yang harus dituju adalah menjadi masyarakat yang learning society dan education. Upaya tersebut bisa dicapai dengan mendukung minat baca masyarakatnya. Dan minat baca akan muncul jika ketersediaan buku-buku dimasyarakat lengkap.

Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahwa dengan membangun learning society dapat memberantas buta aksara yang terjadi dimasyarakat. Berdasarkan data UNESCO pada tahun 1960 menyatakan bahwa 40% dari penduduk dunia mengalami buta aksara. Namun, di Indonesia pada tahun 2000 terjadi penurunan persentase masyarakat yang buta aksara.

Seperti yang diketahui selama ini bahwa peranan lembaga pendidikan formal, seperti sekolah, yang baru menjadi perhatian dan mendapatkan tempat dihati masyarakat. Sementara pendidikan non formal dan informal di Indonesia belum mendapatkan perhatian penuh, andaiupun mendapatkan perhatian hanya sedikit saja.

Selama ini banyak anggapan terhadap dunia pendidikan yang terfokus pada pendidikan formal, seperti sekolah saja tidaklah tepat, sebab konsep pendidikan dapat diartikan secara luas. Hal ini dipahami untuk menyebut semua upaya untuk mengembangkan tiga hal, yaitu pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup diri seseorang atau sekelompok orang. Dengan kata lain, untuk menyebutkan peristiwa yang dampaknya ialah berkembangnya pandangan hidup, sikap hidup

dan keterampilan hidup diri seseorang atau sekelompok orang. Kalau suatu pendidikan sejak awal dirancang untuk mengembangkan ketiga hal tersebut, maka hal ini disebut sebagai pendidikan formal dan pendidikan non formal. Sebaliknya, apabila suatu tindakan yang sebenarnya tidak dirancang untuk mengembangkan ketiga hal tersebut, melainkan berdampak demikian, maka peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai pendidikan informal.

Jika dicermati lebih jauh, pemahaman terhadap ketiga jenis pendidikan tersebut diketengahkan untuk memberikan pengertian baru terhadap peran pendidikan formal dan non formal. Dalam pengertian baru ini, maka kegiatan pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, akan tetapi juga di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Pada gilirannya nanti tidak hanya pendidikan formal dalam arti sempit, sekolah yang mendapatkan perhatian, akan tetapi juga pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di lingkungan masyarakat (luar sekolah).

Seperti yang dikutip oleh Muljono dari Al-Rasyidin dan Samsul Nizar (2005) mengungkapkan beberapa harapan yang ingin dicapai melalui learning society, khususnya jika dikaitkan dengan perwujudan masyarakat madani, menurut Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Terciptanya masyarakat yang demokratis dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat;
- 3) Masyarakat yang mengakui hak-hak asasi manusia;
- 4) Masyarakat yang tertib dan sadar hukum, budaya malu apabila melanggar hukum yang melekat dalam semua lapisan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan;
- 5) Masyarakat yang percaya pada diri sendiri, memiliki kemandirian dan kreatif terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, masyarakat memiliki orientasi yang kuat pada penguasaan ilmu dan teknologi;

- 6) Sebagai bagian dari masyarakat global, yang memiliki semangat kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dengan semangat kemanusiaan yang universal;
- 7) Terwujudnya tatanan masyarakat yang beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan martabat manusia;
- 8) Mewujudkan masyarakat belajar yang tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Jadi, untuk mewujudkan masyarakat yang gemar belajar, perlu usaha-usaha yang dilakukan. Usaha tersebut adalah membentuk keluarga agar menjadi keluarga yang gemar belajar. Keluarga mempengaruhi perkembangan generasi selanjutnya di masa yang akan datang. memang tidak gampang mewujudkan keluarga gemar belajar. Namun, keberanian untuk mencoba dan berpikir kritis serta inovatif dapat membantu dalam mewujudkan keluarga gemar belajar.

1. Upaya mewujudkan Learning Society

Usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan learning society adalah mencoba membiasakan keluarga agar menjadi keluarga yang gemar belajar. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Keluarga mempengaruhi perkembangan generasi selanjutnya di masa yang akan datang. Tentulah tidak mudah dalam mewujudkan keluarga gemar belajar. Namun, keberanian untuk mencoba sesuatu terus menerus dan berpikir kritis serta inovatif dapat membantu dalam mewujudkan keluarga gemar belajar.

Di samping memberdayakan pendidikan keluarga, upaya mewujudkan learning society adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan proses belajar informal dan non formal. Permasalahan yang berkaitan dengan lemahnya peran masyarakat, antara lain dapat dilihat dari lemahnya kontrol sosial dan kontrol moral dalam masyarakat terhadap penyimpangan-penyimpangan perilaku, pergeseran tata nilai baik dan buruk dalam masyarakat, serta menurunnya tanggung jawab sosial. Ikut melengkapi menurunnya peran masyarakat ini adalah kemajuan media informasi dan komunikasi yang mampu membuka dinding-dinding kamar setiap rumah sampai ke

pedesaan yang tidak dapat diimbangi dengan kesiapan mental anggota masyarakat.

Lalu timbul pertanyaan, bagaimana menciptakan suatu masyarakat yang gemar belajar banyak hal yang positif dan suka bekerja keras sekaligus bermoral?. Di negara-negara Eropa, dalam usahanya mewujudkan learning society dengan melalui lima periode (Al-Rasyidin dan Nizar, 2005), diawali dengan diberlakukannya pendidikan formal tingkat dasar pada tahun 1815-1880. Pada awal abad 20 dilaksanakannya pendidikan umum, yang diikuti oleh setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, atau golongan. Pelaksanaan pendidikan tersebut dapat diistilahkan dengan wajib belajar. Pertengahan abad 20, yakni tahun 1950-1960, terjadi ledakan peserta didik di segala jenjang pendidikan. Pada tahap selanjutnya, lahir konsep pendidikan orang dewasa (adult/permanent/recurrent education) atau dapat disebut sebagai long life education. Periode ini diakhiri dengan masuknya teknologi di dunia pendidikan.

Gagasan tentang learning society semestinya diimbangi dengan kesadaran masyarakat terhadap makna pendidikan, sehingga perwujudan masyarakat belajar akan lebih mudah tercapai.

Harapannya dengan adanya learning society akan terwujud masyarakat madani sebagaimana yang sedang marak diperbincangkan sekarang. Sekaligus sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi masalah yang melanda negeri ini. Menurut Olsen, tentang sekolah masyarakat atau community school.⁸ Sekolah ini bersifat Life-centered. Yang menjadi pokok pelajaran ialah kebutuhan manusia, masalah-masalah dan proses-proses social dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai laboratorium tempat anak belajar, menyelidiki dan turut serta dalam usaha-usaha masyarakat yang mengandung unsur pendidikan.

Sekolah ini menurutsertakan orang banyak dalam proses pendidikan untuk mempelajari problem-problem social. Sekolah ini merupakan pusat masyarakat untuk melakukan pertemuan-

⁸ E.G. Olsen, *School and community*, Prentice-Hall, Inc, New York, 1954

pertemuan, upacara-upacara dan usaha usaha lain. Dengan jalan demikian sekolah dapat memasuki masyarakat dan masyarakat dapat memasuki sekolah.

1. Ciri-ciri Sekolah Masyarakat

Menurut Olsen ciri-ciri Community School sebagai berikut:

- a. Sekolah itu memperbaiki mutu kehidupan setempat pada saat sekarang ini
- b. Sekolah itu menggunakan masyarakat sebagai laboratorium tempat belajar.
- c. Gedung sekolah itu menjadi pusat kegiatan masyarakat.
- d. Sekolah itu mendasarkan kurikulum pada proses-proses dan problema-problema kehidupan masyarakat.
- e. Sekolah itu menurutsertakan orang tua dalam urusan-urusan sekolah.
- f. Sekolah itu turut mengkoordinasikan masyarakat
- g. Sekolah itu dapat melaksanakan dan menyebarkan filsafat Negara dalam segala hubungan antar manusia.⁹

2. Masyarakat sebagai Sumber Pelajaran

Pengajaran mencapai hasil sebaik-baiknya, apabila didasarkan atas interaksi antara murid-murid dengan sekitarnya. Apa yang dipelajari anak hendaknya hal-hal yang juga terdapat dalam masyarakat dan arena itu berguna bagi hidup anak sehari-hari.

3. Cara-cara Menggunakan Masyarakat dalam Pelajaran

- a. Karyawisata atau field trip
- b. Menggunakan orang sebagai sumber
- c. Pengabdian masyarakat
- d. Pengalaman kerja dalam masyarakat

Para ahli pendidikan Islam telah mencoba memformulasikan pengertian pendidikan Islam sebagai berikut:

⁹ Ibid h. 15 ff

- a. Al-Syaibany, Pendidikan Islam adalah Proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya.¹⁰
- b. Muhammad Fadhil al-Jamaly, Pendidikan Islam adalah Upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia.¹¹
- c. Ahmad D. Marimba, Pendidikan Islam adalah Bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.¹²
- d. Ahmad Tafsir, Pendidikan Islam adalah Bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.¹³

Menurut Ramayulis, bahwa prinsip pendidikan Islam adalah Integral, seimbang, universal dan dinamis.¹⁴ Pendidikan Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Ayat Allah ada yang Kauniyah dan ada yang Tanziliyah. Kalau dalam pengembangan ilmu pengetahuan nantinya terdapat perbedaan atau pertentangan antara hasil penelitian ilmiah dan Wahyu Allah tentu terjadi salah satu dari dua hal, yaitu 1) penyelidikan ilmiah yang belum sampai kepada kebenaran ilmiah yang obyektif, atau 2) manusia salah memahami ayat yang menyangkut obyek penelitian.¹⁵

Pandangan Islam yang menyeluruh terhadap semua aspek kehidupan mewujudkan adanya keseimbangan. Ada beberapa prinsip keseimbangan yang mendasari pendidikan

¹⁰ Omar Mohammad Al-Thoumy Al-Syaibany, *Falsafat Pendidikan Islam*, h. 399

¹¹ Muhammad Fadhil al-Jamaly, *Nahwa Tarbiyat Mukminat*, (al-Syirkat al-Tunisiat li al-Tauzi', 1977), h. 3

¹² Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989), H. 19

¹³ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h.32

¹⁴ Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009) h.100-104

¹⁵ Sanafiah, *Pendidikan sekolah di dalam Sistem Pendidikan dan Pengembangan Nasional*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 25

Islam yaitu: a) Keseimbangan antara kehidupan dunia dan ukhrowi. b). Keseimbangan badan dan roh. c) Keseimbangan antara individu dan masyarakat.¹⁶

Prinsip pendidikan universal adalah pandangan yang menyeluruh pada agama, manusia, masyarakat, suku dan kehidupan. Islam juga mengembangkan segala segi kehidupan dan berusaha turut serta menyelesaikan masalah-masalah masyarakat masa kini dan bersiap menghadapi tuntutan-tuntutan masa depan dan memelihara sejarah dan kebudayaannya.¹⁷

Menurut Muhammad Munir Mursy, Prinsip universal dalam Islam adalah pendidikan Islam hendaklah meliputi seluruh aspek kepribadian manusia dan melihat manusia dengan pandangan yang menyeluruh yang terdiri dari aspek jiwa, badan dan akal, sehingga nantinya pendidikan Islam mampu diarahkan pada pendidikan jasmani, jiwa dan akal.¹⁸

Pendidikan Islam menganut prinsip dinamis, yaitu mampu memberikan respon terhadap kebutuhan zaman dan tempat dan tuntutan perkembangan dan perubahan social. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang memotivasi untuk hidup dinamis.¹⁹

C. Kesimpulan

Konsep learning society dan pendidikan seumur hidup sama-sama membicarakan bagaimana melaksanakan pendidikan bagi diri individu sebagai makhluk yang wajib mencari ilmu. Learning society adalah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam kegiatan pendidikan. Diharapkan masyarakat dan keluarga berperan aktif dalam hal belajar. Tentulah jika masyarakat dan keluarga telah aktif untuk gemar belajar maka akan terbentuk bangsa yang gemar belajar.

Selain konsep learning society, konsep pendidikan seumur hidup pun penting untuk dipahami bersama. Konsep pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu konsep bahwa proses

¹⁶ Ramayulis, Op,cit., h. 101

¹⁷ Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, h.443

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h.443

pendidikan merupakan suatu proses kontinue, yang bemula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara informal, non formal maupun formal baik yang berlangsung dalam keluarga, disekolah, dalam pekerjaan dan dalam kehidupan masyarakat.

Dan pada akhirnya konsep learning society dan pendidikan seumur hidup akan dapat terwujud seiring dengan kesadaran masyarakat akan makna pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan tak terbatas oleh ruang dan tempat, pendidikan dapat dilaksanakan kapan saja dan dimana saja.

Daftar Pustaka

- Ekosusilo, Madyo. *Dasar-dasar Pendidikan*. Effhar Publishing: Semarang. 1993.
- Fajar, A. Malik. *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo. 2005.
- Hasbulloh, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Rajawali Pers: Jakarta. 2001
- Kompas.com
- Muljono, Pudji. *Jurnal Penyuluhan: Learning Society, Penyuluhan Dan Pembangunan Bangsa*. Vol. 3, No 1. Maret 2007.
- Nizar, Samsul dan Al-Rasyidin. *Filsafat Pendidikan Islam: pendekatan historis, teoritis dan praktis*. Jakarta: Ciputat Press. 2005.

BAGIAN III

REALITAS LEARNING SOCIETY DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Abdul Mujib

A. Pendahuluan

Ada tiga sifat penting pendidikan. Pertama, pendidikan mengandung nilai dan memberikan pertimbangan nilai. Hal itu disebabkan karena pendidikan diarahkan pada pengembangan pribadi anak agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan diharapkan masyarakat. Karena tujuan pendidikan mengandung nilai, maka isi pendidikan harus memuat nilai. Proses pendidikannya juga harus bersifat membina dan mengembangkan nilai.

Kedua, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan, tetapi menyiapkan anak untuk kehidupan dalam masyarakat. Generasi muda perlu mengenal dan memahami apa yang ada dalam masyarakat, memiliki kecakapan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat, baik sebagai warga maupun sebagai karyawan.

Ketiga, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Kehidupan masyarakat berpengaruh terhadap proses pendidikan, karena pendidikan sangat melekat dengan kehidupan masyarakat.²⁰

Proses pendidikan merupakan bagian dari proses kehidupan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan membutuhkan dukungan dari lingkungan masyarakat, penyediaan fasilitas, personalia, sistem sosial budaya, politik, keamanan, dan lain-lain.

Tujuan umum pendidikan sering dirumuskan untuk menyiapkan generasi muda menjadi orang dewasa anggota masyarakat yang mandiri dan produktif. Hal itu merefleksikan konsep adanya tuntutan individual (pribadi) dan sosial dari

²⁰ Sanafiah, Pendidikan sekolah di dalam Sistem Pendidikan dan Pengembangan Nasional, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 25

orang dewasa kepada generasi muda. Tuntutan individual merupakan harapan orang dewasa agar generasi muda dapat mengembangkan pribadinya sendiri, mengembangkan segala potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Tuntutan sosial adalah harapan orang dewasa agar anak mampu bertingkah laku, berbuat dan hidup dengan baik dalam berbagai situasi dan lingkungan masyarakat.

Konsep pendidikan bersifat universal, tetapi pelaksanaan pendidikan bersifat lokal, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Pendidikan dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu berbeda dengan lingkungan masyarakat lain, karena adanya perbedaan sistem social budaya, lingkungan alam, serta sarana dan prasarana yang ada.

Setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem social budaya yang berbeda. Sistem sosial-budaya ini mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar-anggota masyarakat, antara anggota dan lembaga, serta antara lembaga dan lembaga. Sistem sosial-budaya di daerah perkotaan berbeda dengan di pedesaan, di daerah pesisir berbeda dengan di pegunungan, di pusat perindustrian berbeda dengan di daerah pertanian. Sistem sosial-budaya pada suatu daerah juga berbeda dari suatu periode waktu dengan waktu yang lainnya, karena masyarakatnya berkembang.

Salah satu aspek yang cukup penting dalam sistem sosial-budaya adalah tatanan nilai-nilai. Tatanan nilai merupakan seperangkat ketentuan, peraturan, hukum, moral yang mengatur cara berkehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. Nilai-nilai tersebut bersumber dari agama, budaya, kehidupan politik, maupun dari segi-segi kehidupan lainnya. Sejalan dengan perkembangan masyarakat maka nilai-nilai yang ada dalam masyarakat juga selalu berkembang, dan mungkin pada suatu saat perkembangan begitu drastis, sehingga tidak jarang menimbulkan perbedaan bahkan konflik nilai. Konflik nilai bisa juga diakibatkan adanya perbedaan sudut pandang karena adanya variasi sumber-sumber nilai tersebut.

Perbedaan ataupun konflik nilai tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan tatanan yang berakar pada perbedaan pola-pola kebudayaan Menurut Tylor (1871), kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang meliputi pengetahuan,

kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat-istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan. Dalam arti yang lebih mendasar, pendidikan merupakan suatu proses kebudayaan. Setiap generasi manusia menempatkan dirinya dalam urutan sejarah kebudayaan. Menurut Israel Scheffler (1958), melalui pendidikan manusia mengenal peradaban masa lalu, turut serta dalam peradaban masa sekarang dan membuat peradaban masa yang akan datang.

Proses pembudayaan tidak dapat berlangsung secara sendirian, melainkan harus dalam interaksi dengan orang lain, interaksi dengan lingkungan. Status dan peranan manusia dalam kelompok, apakah kelompok usia, jenis kelamin, sekolah, pekerjaan, kemasyarakatan, dan lain-lain, menentukan jenis interaksi dan tingkat partisipasinya dalam proses pembudayaan.

Kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari tempat masyarakat itu berada. Masalah tempat menyangkut lingkungan alam dan keadaan geografis. Lingkungan alam dan keadaan geografis mempengaruhi perilaku dan pola hidup para anggota masyarakat. Masyarakat yang hidup di daerah tropis berbeda pola hidupnya dengan di daerah subtropis atau daerah dingin. Demikian juga masyarakat di daerah kepulauan berbeda dengan di daerah daratan, di daerah gurun pasir berbeda dengan di daerah padang rumput atau rawa. Kondisi alam dan geografis mempengaruhi cara hidup, cara berpikir, cara bekerja, cara mempertahankan diri, cara bermasyarakat, dan lain-lain.

Kehidupan masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat kemajuan yang telah dicapainya. Masyarakat yang telah mencapai tingkat kemajuan yang tinggi dalam segi ilmu, teknologi, ekonomi, sosial-budaya, dan segi-segi kehidupan yang lainnya, akan memiliki sistem dan fasilitas yang lebih mapan dibandingkan dengan masyarakat yang kemajuannya rendah. Sistem dan fasilitas yang tersedia akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

B. PENDIDIKAN MASYARAKAT MASA ORDE BARU

Pendidikan masyarakat adalah suatu gagasan berupa konsep, hasil penelitian dan penerapan pengembangan di

masyarakat. Fungsinya adalah untuk membimbing dan meningkatkan pola pikir masyarakat terhadap semua perkembangan dunia yang sedang terjadi saat ini. Dulu, ada sebuah program pemerintah yang banyak diikuti oleh masyarakat karena programnya yang menyenangkan dan bisa memberikan pendidikan secara gratis kepada mereka. Disebut dengan Kelompencapir atau Kelompok Pendengar Pembaca dan Pirsawan.

Karena dulu media pendidikan untuk masyarakat hanya ada satu stasiun televisi saja maka hampir semua golongan masyarakat menengah ke bawah sering menyaksikan acara ini di tv. Program ini termasuk dalam satu program pendidikan masyarakat.

Pendidikan masyarakat ini dalam kegiatannya membahas mengenai berbagai macam isu yang hadir di masyarakat. Mereka yang tergabung dalam program ini akan berdiskusi, berbagi pengalaman membaca buku ataupun sekedar membicarakan isu hangat yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Tentunya semua hal yang mereka bicarakan itu bermanfaat dan bukan sekedar gosip belaka.

Manfaatnya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah adalah mereka menjadi semakin tinggi tingkat kesadarannya akan berbagai macam hal penting yang terjadi di masyarakat kita. Pola pikirnya menjadi berubah dan semakin terbuka dengan berbagai perubahan dunia. Dengan arti lain, wawasan mereka semakin luas dengan adanya program ini. Semua kegiatan yang dijadwalkan dalam pendidikan masyarakat ini disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka. Ada yang bertanam sayuran dan bumbu dapur. Ada yang beternak ikan dan ayam atau kambing.

Kegiatan keterampilan khusus untuk wanita seperti menjahit, berkreasi dengan barang bekas, hingga membuat menu sederhana namun penuh gizi dengan menggunakan bahan-bahan masakan yang berasal dari halaman belakang mereka. Tidak diperlukan banyak biaya untuk melaksanakan program ini dan semuanya itu penuh manfaat bagi kehidupan mereka. Pendidikan masyarakat ketika itu saya kira mempunyai nilai yang cukup tinggi. Mereka lebih memiliki tenggang rasa dengan warga yang masih kekurangan. Mereka saling menolong tanpa ada rasa iri

atau suudzon. Begitu juga dengan kegiatan seputar olahraga dan PKK. Semua kegiatan itu bersifat positif dan menjadi ajang pembinaan yang efektif.

Ada sekolah khusus untuk para orang tua yang buta huruf, mereka sangat menikmati program ini dan berusaha untuk membuka wawasan pikirannya lebih luas lagi sehingga kesenjangan dengan mereka yang mengenyam pendidikan di sekolah semakin kecil. Pendidikan masyarakat yang memberikan banyak manfaat dan kegunaan bagi kehidupan masyarakat kelas bawah.

Jenis-jenis kegiatan yang hampir sama dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, misalnya seperti berikut ini: a) Sosialisasi pemberian ASI pada bayi. b) Program imunisasi rutin untuk semua balita c) Senam bersama d) Kegiatan belajar bagi masyarakat buta huruf e) Program Jumat Bersih f) Siskamling dll.

Semakin hari semua program ini semakin sulit ditemukan di masyarakat. Jika program ini bermanfaat dan berguna bagi pendidikan masyarakat, akan lebih baik jika kita menggalakkan kembali semua program pemberdayaan masyarakat tersebut. Dengan demikian pendidikan masyarakat akan semakin meningkat dan hasilnya tentu akan dinikmati oleh semua kalangan di negara ini.

C. PENDIDIKAN MASYARAKAT MASA SEKARANG

1. Perkembangan Masyarakat

Salah satu ciri dari masyarakat adalah selalu berkembang. Mungkin pada masyarakat tertentu perkembangannya sangat cepat, tetapi pada masyarakat lainnya agak lambat bahkan lambat sekali. Karena adanya pengaruh dari perkembangan teknologi, terutama teknologi industri transportasi, komunikasi, telekomunikasi dan elektronika, masyarakat kita dewasa ini berkembang sangat cepat menuju masyarakat terbuka, masyarakat informasi dan global.

Dalam kondisi masyarakat demikian, perubahan-perubahan terjadi dengan cepat, mobilitas manusia dan barang sangat tinggi, komunikasi cepat, lancar, dan akurat. Perubahan yang cepat hampir terjadi dalam semua aspek

kehidupan, sosial-budaya, ekonomi, politik, ideologi, nilai-nilai etik dan estetik. Perubahan-perubahan masyarakat ini akan mempengaruhi perkembangan setiap individu warga masyarakat, mempengaruhi pengetahuan, kecakapan, sikap, aspirasi, minat, semangat, kebiasaan bahkan pola-pola hidup mereka.

Mobilitas yang tinggi mempercepat pertemuan antarsuku dan antarbangsa, membuka daerah-daerah yang terisolasi, meningkatkan pemerataan pembangunan. Komunikasi sangat cepat, lancar, dan akurat memudahkan perolehan informasi, yang sangat berharga baik bagi kepentingan bisnis, pemerintahan, penelitian, rekreasi, maupun hobi.

Pertemuan antarsuku bangsa, antar bangsa, dan antar ras dengan berbagai kebudayaan, kemampuan masyarakat makin sering terjadi. Maka terjadilah proses pembauran budaya, tradisi, nilai-nilai, pengetahuan, dan lain-lain malah terjadi pembauran suku, bangsa, atau ras.

Di samping pembauran, pertentangan atau konflik antar sektor sosial-budaya adakalanya juga terjadi. Melalui proses alkulturalisasi, pertentangan atau konflik-konflik ini berangsur-angsur berkurang.

2. Perubahan Pola Pekerjaan

Karena pengaruh perkembangan teknologi maka terjadi perubahan yang cukup drastis dalam pola pekerjaan. Masyarakat secara berangsur-angsur, terutama di perkotaan sering terjadi loncatan, berubah dari kehidupan yang berpola agraris ke pola kehidupan industri.

Pola kehidupan agraris memiliki kesamaan, hidup yang lebih santai, cara kerja yang teratur, rasa kerja sama yang tinggi, perubahan yang lamban, dan sebagainya. Dalam pola kehidupan masyarakat industri, sifat-sifat yang dimiliki masyarakatnya jauh berbeda. Diversifikasi pekerjaan dan tugas-tugas dalam satu pekerjaan melahirkan spesialisasi yang menuntut profesionalisme dalam setiap spesialisasi tersebut.

Hal itu mengakibatkan adanya keragaman tugas dan pekerjaan. Tugas-tugas dalam suatu spesialisasi sering tidak

dipahami oleh spesialisasi lain. Penerapan teknologi di bidang industri relatif lebih maju dibandingkan di bidang pertanian, dan menuntut profesionalisme yang lebih tinggi pula.

Bekerja di bidang industri tidak lagi bergantung pada musim (hujan atau kemarau, panas, atau dingin), bisa bekerja sepanjang masa, malah bisa bekerja siang dan malam. Oleh karena itu, hidup santai telah ditinggalkan, diganti dengan pola kerja keras mengejar target meningkatkan produksi.

Dalam bekerja di sektor industri telah ada pembagian tugas masing masing, menghadapi mesin dan peralatan lain yang berbeda, yang menuntut konsentrasi perhatian dan kegiatan. Oleh karena itu, sifat gotong royong mulai menipis, diganti dengan kerja sama sesuai dengan alur kerja.

Penggunaan peralatan berteknologi tinggi tidak menuntut banyak orang, tetapi sedikit orang dengan kemampuan tinggi. Pola padat karya yang dikerjakan secara gotong royong dalam kehidupan agraris telah beralih pada padat teknologi yang dikerjakan secara profesional. Sifat kompetitif, baik dengan sesama karyawan maupun dengan waktu atau prestasi sebelumnya, lebih mewarnai kehidupan dalam masyarakat industri.

Dalam pola kehidupan industri perubahan sangat cepat terjadi. Perubahan ini bukan saja karena adanya peralatan baru atau jenis pekerjaan yang baru, tetapi karena dunia industri berorientasi pada pasar. Dengan demikian, strategi, taktik, kebijakan baru yang melahirkan produk dan layanan baru selalu muncul.

3. Perubahan Peranan Wanita

Dewasa ini jumlah wanita yang berpendidikan relatif seimbang dengan dengan pria, sebagai akibat ernansipasi yang membuka kesempatan kepada kaum wanita untuk memperoleh pendidikan. Diperkuat dengan perubahan pandangan tentang kedudukan wanita, wanita tidak lagi hanya bekerja di rumah, mengurus anak dan keluarga seperti pada pola kehidupan lama.

Wanita memiliki peluang yang sama dengan pria, bekerja hampir pada seluruh sektor pekerjaan. Keadaan ini membawa beberapa implikasi, baik bagi kehidupan sosial-pribadi para wanita, kehidupan keluarga, maupun dalam situasi kerja. Dengan bekerja di luar rumah, wanita lebih bebas bergerak, berkarya, dan berkreasi dibandingkan apabila hanya bekerja di rumah tangga.

Wawasan dan pengetahuan mereka menjadi lebih luas, potensi-potensi yang dimilikinya dapat diwujudkan dan disalurkan. Memang banyak pekerjaan-pekerjaan tertentu yang lebih berhasil bila dikerjakan oleh wanita. Wanita yang bekerja juga dapat menambah penghasilan keluarga, sehingga kesejahteraan ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Kehadiran wanita dalam lingkungan kerja juga dapat menimbulkan suasana lain dibandingkan apabila semua karyawannya pria.

Di samping sejumlah kebaikan dari para wanita yang bekerja, sejumlah masalah dan kesulitan juga muncul. Masalah pertama berkenaan dengan kehidupan sosial-pribadi wanita. Wanita yang bekerja apabila telah menikah mempunyai tugas ganda, menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan dan tugas-tugas keluarga. Penyelesaian kedua tugas tersebut bukan masalah ringan, membutuhkan pemikiran dan tenaga yang dengan sedikit ketidakmampuan membagi tugas dapat membengkakalakan salah satu tugas, bahkan kedua-duanya.

Masalah kedua berkenaan dengan kehidupan keluarga. Wanita betapapun tinggi tingkat pendidikan dan jabatan yang dipegangnya, tidak bisa dilepaskan dari kodratnya sebagai wanita, sebagai istri dan ibu. Sampai batas tertentu masih tetap harus melayani suami, mendidik anak, dan mengatur rumah tangga. Tugas yang banyak menyita waktu, tenaga, dan perhatian dalam pekerjaan atau karier, bagaimanapun akan menelantarkan pelaksanaan tugas-tugasnya dalam rumah tangga.

Hal itu bisa mengakibatkan keluarga tidak harmonis, pendidikan anak terbengkalai, kesejahteraan rumah tangga terabaikan, dan mungkin terjadi perpecahan keluarga (broken home). Perpecahan keluarga ada dua macam,

pecah secara struktur yaitu cerai antara suami dan istri, atau pecah secara lungsi tidak bercerai tetapi masing-masing pihak tidak melaksanakan lungsi yang semestinya. Rumah hanya berfungsi sebagai tempat parkir .Itau lebih parah sebagai tempat bertengkar.

Masalah ketiga berkenaan dengan situasi pekerjaan. Pekerjaan atau karier bukan tempat beristirahat, tetapi tempat berkarya, berkreasi, berprestasi, dan berkompetisi. Situasi demikian menuntut sikap, penampilan, pemikiran, dan unjuk kerja yang optimal. Kalau karyawati itu belum berkeluarga atau melepaskan diri dari tugas-tugas rumah tangga, mungkin tuntutan pekerjaan tersebut dapat dipenuhi secara optimal.

Bila tidak maka hambatan karier yang akan terjadi. Situasi ini dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Masalah tersebut akan bertambah lagi apabila terjadi situasi-situasi yang tidak sehat atau menyimpang. Bagaimanapun dalam situasi kerja akan terjadi konherensi, tidak semua pria menerima kedudukan di bawah wanita, apalagi bila latar belakang pendidikan dan kemampuan terasa sama.

Dalam lingkungan kerja yang ada wanita dan pria, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, mulai dari pelecehan sampai dengan skandal. Hal ini tentu menimbulkan masalah, baik bagi wanita yang bersangkutan, keluarga, maupun unit kerja.

4. Perubahan Kehidupan Keluarga

Perkembangan kehidupan keluarga sejalan dengan perkembangan masyarakat. Pola kerja masyarakat modern (industri) menuntut waktu kerja yang tidak teratur, melebihi waktu biasa.

Dalam masyarakat modern, orang tidak lagi bekerja dari pukul 7.00 sampai pukul 14.00. Walaupun ketentuan sampai pukul 16.00, kenyataannya jam kerja kadang-kadang sampai pukul 22.00 bahkan lebih. Bekerja bukan lagi dari Senin sampai Jumat dan pulang tiap hari, melainkan dari Senin sampai Minggu dan pulang seminggu sekali, bahkan beberapa minggu tidak pulang. Hal seperti itu mungkin

hanya dialami oleh para bapak/suami, tetapi mungkin juga dialami oleh para ibu/istri, bahkan oleh kedua-duanya.

Dalam keluarga, anak juga mempunyai masalah sendiri. Anak-anak yang belum bersekolah tinggal di rumah bersama pembantu. Mereka lebih banyak hidup dan bergaul dengan pembantu daripada dengan orang tuanya. Anak yang bersekolah sebagian waktunya digunakan di sekolah, tetapi sebagian besar digunakan di rumah atau di luar rumah dengan teman-temannya. Kesempatan anak remaja di rumah lebih sedikit, umumnya berada di luar rumah untuk menyelesaikan tugas sekolah atau bergaul dengan teman.\

Banyaknya waktu yang digunakan untuk bekerja akan seimbang dengan penghasilan yang diperoleh. Apalagi bila suami dan istri bekerja, penghasilan mereka jauh lebih banyak. Penghasilan tinggi akan meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Fasilitas keluarga lebih lengkap dan lebih baik, semua kebutuhan hidup terpenuhi, bahkan bisa menabung dan berlibur ke luar kota secara berkala.

Di samping memperoleh nilai lebih dari pola kerja pada masyarakat modern, beberapa masalah juga dihadapi dalam kehidupan keluarga. Kesibukan kerja/karier dalam batas-batas wajar memungkinkan anggota keluarga melaksanakan tugasnya dengan baik. Kesibukan di luar batas kewajaran bisa mengorbankan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga.

Bapak tidak lagi melaksanakan tugas sebagai kepala keluarga, demikian juga ibu dan anak. Hubungan harmonis antara suami dan istri, komunikasi pedagogis antara orang tua dan anak bisa sangat terbatas, bahkan mungkin hilang. Karena sangat sibuknya setiap anggota keluarga, bisa terjadi rumah hanya berfungsi sebagai tempat parkir. Dalam situasi demikian, berbagai masalah keluarga bisa timbul.

D. Kesimpulan

1. Sekolah masyarakat adalah sekolah yang menjadi pokok pelajaran ialah kebutuhan manusia, masalah-masalah dan proses-proses social dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan dalam masyarakat.

2. Masyarakat dipandang sebagai laboratorium tempat anak belajar, menyelidiki dan turut serta dalam usaha masyarakat yang mengandung unsure pendidikan.
3. Ciri-ciri Community School sebagai berikut:
 - a. Sekolah itu memperbaiki mutu kehidupan setempat pada saat sekarang ini
 - b. Sekolah itu menggunakan masyarakat sebagai laboratorium tempat belajar.
 - c. Gedung sekolah itu menjadi pusat kegiatan masyarakat.
 - d. Sekolah itu mendasarkan kurikulum pada proses-proses dan problema-problema kehidupan masyarakat.
 - e. Sekolah itu menurutsertakan orang tua dalam urusan-urusan sekolah.
 - f. Sekolah itu turut mengkoordinasikan masyarakat
 - g. Sekolah itu dapat melaksanakan dan menyebarkan filsafat Negara dalam segala hubungan antar manusia.
4. Pengajaran sekolah masyarakat dapat mencapai hasil sebaik-baiknya, apabila didasarkan atas interaksi antara murid-murid dengan sekitarnya. Apa yang dipelajari anak hendaknya hal-hal yang juga terdapat dalam masyarakat dan karena itu berguna bagi hidup anak sehari-hari.
5. Cara-cara yang digunakan dalam pelajaran pendidikan masyarakat adalah:
 - a. Karyawisata atau field trip
 - b. Menggunakan orang sebagai sumber
 - c. Pengabdian masyarakat
 - d. Pengalaman kerja dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, 1987. *Sosiologi, Kelompok dan Masalah Sosial*. Penerbit: Fajar Agung, Jakarta.
- _____, 1994. *Sosiologi, Skematika Teori dan Terapan*. Penerbit: PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Abu Ahmadi, 1985. *Sosiologi*. Penerbit: PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989)
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992)
- Athur Hilman, 1951. *Community Organization and Planning*. The Mac Millan Company, New York.
- David Berry, 1981. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, disunting dan dihantar oleh: Paulus Wirutomo, CV. Rajawali, Jakarta.
- E.G. Olsen, *School and community*, Prentice-Hall, Inc, New York, 1954
- Hassan Shadily, 1983. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Penerbit: PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1984. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Maurice Duverger, 1982. *Sosiologi Politik*, Terjemahan: Daniel Dhakidae, CV. Rajawali, Jakarta.
- Muhammad Fadhil al-Jamaly, *Nahwa Tarbiyat Mukminat*, (al-Syirkat al-Tunisiat li al- Tauzi', 1977)
- Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, Diterjemahkan Hasan Langulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

- Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990)
- _____, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009)
- Sanafiah, *Pendidikan sekolah di dalam Sistem Pendidikan dan Pengembangan Nasional*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981)
- Soedjono Dirdjosisworo, 1985. *Asas-asas Sosiologi*. Penerbit: Armico, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta.
- _____, 1983. *Pribadi dan Masyarakat*. Penerbit: Alumni, Bandung.
- Soleman B. Taneko, 1984. *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi*
Pembangunan, CV. Rajawali, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta.

BAGIAN IV

DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM SEPANJANG SEJARAH

Assyifaun Nadia Khoriyah

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam terjadi pertama kali di zaman Nabi Muhammad SAW, dalam pendidikan tersebut telah mencetak para Ulama yang mampu mengembangkan dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pejuru negara. Sejarah telah tercatat, bahwa perjuangan para Ulama bukan perkara remeh dalam upaya menyebarkan agama Islam, termasuk dalam pendidikannya. Sehingga pada abad 13 M, Islam di Nusantara telah Berjaya dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam.

Dan mampu mencetak generasi selanjutnya yang melanjutkan dan menyebarkan risalah dakwah dalam upaya proses Islamisasi di Nusantara. Serta sampai mewujudkan Negara Indonesia yang mereka dari kolonialisme, dalam sejarah dinamika pendidikan Islam itu sendiri mengalami berbagai perubahan yang cukup menarik. Perubahan tersebut diharapkan mamapu mencetak generasi bangsa yang mampu memberi manfaat bagi agama, umat dan negaranya. Dalam proses perubahan tersebut menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi model tradisi keilmuan dalam Islam itu sendiri.

Kemudian Perdebatan tentang teori-teori pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia secara umum mendefinisikan pendidikan Islam dalam dua tataran: idealis dan pragmatis. Pada tataran idealis pendidikan Islam diandaikan sebagai suatu sistem yang independen (eksklusif) dengan sejumlah kriterianya yang serba Islam. Definisi ini secara kuat dipengaruhi oleh literatur Arab yang masuk ke Indonesia baik dalam bentuk teks asli, terjemahan maupun sadurannya. Sedangkan pada tataran pragmatis, pendidikan Islam ditempatkan sebagai identitas (ciri khusus) yang tetap berada dalam konteks pendidikan nasional. Perkembangan- perkembangan aktual di Indonesia khususnya

selama tiga dekade terakhir sangat mempengaruhi munculnya definisi pragmatis ini.²¹

B. Dinamika Pendidikan Islam Orde Lama

Istilah pendidikan berasal dari kata "didik" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" yang mengandung arti perbuatan (hal, cara, dan sebagainya). Kalimat ini juga berarti artinya memelihara dan memberikan latihan dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.³ Istilah pendidikan merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu "Paedagogie", yang berarti bimbingan kepada anak didik. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan istilah "education" yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan kata Tarbiyah yang berarti pendidikan.²²

Jadi yang dimaksud dengan Pendidikan ialah bimbingan atau pertolongan secara sadar yang diberikan oleh Pendidik kepada siswa dalam perkembangan jasmaniah dan rohaniah kearah kedewasaan dan seterusnya ke arah terbentuknya kepribadian muslim. Dan, Pendidikan dalam arti sempit, ialah bimbingan yang diberikan kepada anak didik sampai ia dewasa.

Pendidikan dalam arti luas, ialah bimbingan yang diberikan sampai mencapai tujuan hidupnya; bagi pendidikan Islam, sampai terbentuknya kepribadian muslim. Jadi pendidikan Islam, berlangsung sejak anak dilahirkan sampai mencapai kesempurnaannya atau sampai akhir hidupnya. Sebenarnya kedua jenis pendidikan ini (arti sempit atau arti luas) satu adanya.²³ Selanjutnya Marimba memberikan tujuan pendidikan Islam, yaitu: mengakhiri usaha, mengarahkan usaha, tujuan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan- tujuan

²¹ Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),h. 24.

²² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h 1.

²³ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: PT. Al-Maarif Bandung, 1989)hlm, 31-32

lanjutan dari tujuan pertama, serta memberikan nilai (sifat) pada usaha-usaha itu.²⁴

C. Dinamika Pendidikan Islam Orde Baru

Berbicara tentang dinamika pendidikan Islam, penulis menggunakan fase yang telah dipetakan oleh Abuddin Nata. Ia membagi fase dinamika pendidikan, dan keterlibatan pemerintah dalam perumusan kebijakan di dalamnya ke dalam empat periode sebagai berikut: *Pertama*, masa pra kemerdekaan, yaitu masa penjajah Belanda yang menerapkan diskriminatif terhadap rakyat jajahannya dan termasuk elit dalam memberikan pendidikan bagi rakyatnya. Belanda membiarkan kebodohan agar mudah ditindas, dijajah dan diadudomba. Kemudian sedikit ada perubahan setelah ada tekanan internasional yang dikenal dengan politik etis, salah satunya menyediakan pendidikan kepada rakyat secara terbatas dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang dipekerjakan di beberapa perusahaan milik Belanda.²⁵ Belanda tidak suka terhadap keberadaan pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren, madrasah dan sebagainya karena dianggap sebagai sarang pemberontak, dan pembangkang yang dikenal sebagai konsep jihad dan menganggap Belanda sebagai orang kafir yang harus diperangi, sehingga umat Islam bersikap non-kooperatif, tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Belanda. *Kedua*, masa pasca kemerdekaan yang dikenal masa Orde Lama. Pada masa ini terjadi upaya pembaruan dan memperbanyak lembaga pendidikan Islam yang lebih bermutu sejalan dengan tuntutan zaman, namun suhu politik pada saat itu sedang mengalami pancaroba dan mencari bentuknya.²⁶

Kedua, masa pasca kemerdekaan yang dikenal masa Orde Lama. Pada masa ini terjadi upaya pembaruan dan memperbanyak lembaga pendidikan Islam yang lebih bermutu sejalan dengan tuntutan zaman, namun suhu politik pada saat itu sedang mengalami pancaroba dan mencari bentuknya.

²⁴ *Ibid*, hlm 34-35.

²⁵ Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 9

²⁶ *Ibid*, h.10

Ketiga, masa Orde Baru, pendidikan pada masa ini bersifat sentralistik, represif dan depolitisasi masyarakat yang harus berorientasi kepada loyalitas terhadap pemerintahan. Anggaran alokasi untuk pendidikan sangat minim bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya yang tidak pernah mencapai 10% dari APBN.²⁷

Keempat, masa Orde Reformasi, dimana semakin berkembangnya wacana demokrasi, sehingga menghasilkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.²⁸

Berikut ini penulis jelaskan secara detail dinamika pendidikan di Indonesia:

1. Pendidikan Islam di Zaman Penjajahan (Pra-Kemerdekaan)

Zakiah Darajat dalam bukunya mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan Belanda, pendidikan agama tidak diberikan di sekolah-sekolah negeri dengan alasan pemerintah bersikap netral untuk tidak mencampuri masalah pendidikan agama, karena pendidikan agama merupakan tanggung jawab keluarga, sehingga setiap usulan wakil-wakil rakyat pribumi di Volksraad agar memasukan pelajaran agama Islam di Perguruan Umum selalu ditolaknya, yang dibolehkan hanya di sekolah-sekolah partikulir (swasta) yang berdasarkan keagamaan.²⁹Selain itu pemerintah Belanda juga menerapkan kontrol yang sangat ketat dan kaku dalam mengawasi pribumi. Kontrol yang ketat ini dijadikan alat politik untuk menghambat dan bahkan menghalang-halangi pelaksanaan pendidikan Islam, dengan membentuk suatu badan yang khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut *Priesnterraden*.

Ordonansi guru dikenal pada masa pemerintah Belanda dengan mengeluarkan peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah yang

²⁷ Ibid, hlm. 11

²⁸ Ibid, hlm 16

²⁹ Zakiah Darajat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),hlm 90-91.

disebut Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*). Ordonansi guru ini menurut Nurhayati Djamas dalam *Dinamika Pendidikan di Indonesia Pasca Kemerdekaan* merupakan bentuk kekhawatiran pemerintah belanda terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam dan sepak terjang guru agama yang akan memperluas pengembangan agama Islam melalui pendidikan.

Selain itu untuk lingkungan kehidupan agama Kristen di Indonesia yang selalu menghadapi reaksi dari rakyat, dan untuk menjaga sekolah umum yang kebanyakan muridnya beragama Islam, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang disebut netral agama. Seperti yang dinyatakan pada *Indische Staatsregeling* bahwa pendidikan umum adalah netral, yang berarti pengajaran diberikan dengan menghormati keyakinan masing-masing. Namun disekolah umum untuk kalangan pribumi, pada HIS dan MULO diberikan pelajaran agama Islam, secara sukarela sekali dalam seminggu bagi murid-murid yang berminat atas persetujuan orang tuanya. Pemerintah Belanda sendiri yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi pribumi, membentuk dua lembaga, yaitu Departemen *van Onderwijst en Eerendinst* untuk mengawasi pengajaran agama di sekolah umum dan Departemen *van Binnenlandsche Zaken* untuk pendidikan Islam dilembaga pendidikan Islam. Kebijakan pemerintah kolonial yang memarjinalkan aspirasi dan kepentingan kalangan muslim menjadi cikal bakal terciptanya dualitas pengaturan negara terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan kepentingan kalangan muslim.³⁰

Langkah perubahan melalui pendidikan pada akhirnya menjadi pilihan bagi umat Islam Indonesia untuk melakukan berbagai inovasi di berbagai bidang kehidupan dalam Islam. Dengan pendidikan yang baik akan membawa masyarakat kepada sikap ingin maju dan berkembang secara teratur. Demikian juga dengan bangsa Indonesia yang selama masa penjajahan terpuruk di segala bidang, akan tetapi bangsa Indonesia bangkit kembali akibat proses pendidikan yang

³⁰ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan di Indonesia Pasca Kemerdekaan* (Jakarta: RajaGrafindo, 2009), hlm. 178

mereka terima. Kebangkitan tersebut meliputi perkembangan rasa kebangsaan hingga perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, yang termasuk di dalamnya adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam pun mengalami pembaharuan. Hal ini tidak lepas dari keinginan para sarjana Indonesia untuk melakukan inovasi modern di dunia pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan Islam tidak lepas dari fungsi dakwah dan taklim di masjid dan langgar, yang pada akhirnya melembaga menjadi pesantren.³¹

Proses modernisasi inovatif pendidikan di kalangan Islam ini terus berlangsung pada saat Jepang menjajah Indonesia. Pada tanggal 8 Juli 1945 berdirilah sekolah tinggi Islam di Jakarta. Kalau ditinjau dari segi pendidikan zaman Jepang umat, Islam mempunyai kesempatan yang banyak untuk memajukan pendidikan Islam, sehingga tanpa disadari oleh Jepang sendiri bahwa umat Islam sudah cukup mempunyai potensi untuk maju dalam bidang pendidikan ataupun perlawanan kepada penjajah. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu kemudian dapat diikhtisarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan Dasar (*Kokumin Gakko*/Sekolah Rakyat). Lama studi 6 tahun. Termasuk SR adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. (2) Pendidikan Lanjutan. Terdiri dari *Shoto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan *Koto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun. (3) Pendidikan Kejuruan. Mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. (4) Pendidikan Tinggi.³²

2. Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan (Orde Lama)

Setelah Indonesia merdeka, para pemimpin dan perintis kemerdekaan menyadari betapa pentingnya pendidikan agama. Ki Hajar Dewantoro selaku Menteri Pendidikan Pengajaran dan

³¹ Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), hlm. 96.

³² Rohidin Wahab, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm 24.

Kebudayaan pada kabinet pertama menyatakan pendidikan agama perlu diajarkan di sekolah-sekolah negeri. Kemudian pada 3 Januari 1946 didirikanlah Kementerian Agama yang bertugas beberapa diantaranya melaksanakan kewajiban-kewajibannya antara lain urusan pelajaran dan pendidikan agama Islam dan Kristen, mengangkat guru agama dan mengadakan pengawasan pelajaran agama.³³

Untuk merealisasikan hasil di bidang pendidikan agama, maka diterbitkan peraturan Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama No. 1142/Bhg A (Pengajaran)/No.1285/KJ Agama tanggal 2-12-1946 yang menentukan pelajaran agama di Sekolah Rakyat sejak kelas IV dan mulai berlaku 1-1- 1947. Kemudian lahir UU.No. 4 /1950 Jo.No.12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Salah satunya pasal 20 Bab 12 yang menyatakan bahwa dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Pelajaran agama kemudian ditetapkan dengan TAP MPRS No.II/MPRS/1960 dengan menjadikan pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah- sekolah sejak Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Universitas Negeri hingga saat ini.³⁴

3. Pendidikan Islam di Zaman Orde Baru

Setelah Orde Lama tumbang, digantikan oleh Orde Baru, berganti pula kebijakan pendidikan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980- an sampai dengan 1990-an. Pada pemerintah, lembaga pendidikan di kembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan peningkatan dan peningkatan mutu pendidikan.³⁵

³³ Zakiah Darajat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm 91.

³⁴ Harun Nasution, *Pembaruan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm 56.

³⁵ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h.361.

Pada awal-awal masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan tentang pendidikan Islam, khususnya tentang madrasah, bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan Orde Lama. Pada tahap ini madrasah, sebagai bagian integral pendidikan Islam, masih belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Menghadapi kenyataan tersebut di atas, langkah pertama dalam melakukan modernisasi ini adalah di keluarkannya kebijakan tahun 1967 sebagai respons terhadap TAP MPRS No. XXVII tahun 1966 dengan melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah.

Dalam dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya, namun di awal-awal tahun 1970an, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan langkah yang di tempuh pemerintah dengan langkah yang di tempuh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa keputusan presiden nomor 34 tanggal 18 April tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Isi keputusan ini mencakup tiga hal:

- a) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kebijakan.
- b) Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri.
- c) Ketua lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

Selanjutnya, kepres No 34 Tahun 1972 ini dipertegas oleh Inpres No 15 tahun 1974 yang mengatur operasionalnya. Dalam TAP MPRS Nomor XVII Tahun 1966 dijelaskan “agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan nasional. Persoalan keagamaan dikelola oleh Departemen Agama, sedangkan madrasah dalam TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960 adalah lembaga pendidikan otonom di bawah bawah pengawasan Menteri Agama”. Dari ketentuan

ini, Departemen Agama menyelenggarakan pendidikan madrasah tidak saja bersifat keagamaan dan umum, tetapi juga bersifat kejuruan. Dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 dan Inpres 1974, penyelenggaraan pendidikan dan kejuruan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Mendikbud.

Perhatian lebih luas dan mendalam terhadap pendidikan Islam kemudian diwujudkan melalui lahirnya kurikulum 1973 dan SKB 3 Menteri pada 24 Maret 1975 yang menegaskan bahwa kedudukan madrasah sejajar dengan sekolah formal.³⁶ Setelah SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri, usaha pengembangan madrasah selanjutnya adalah di keluarkannya SKB tiga menteri P&K no.299/u/1984 dengan menteri agama no 45 th 1984, tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum Madrasah yang isinya antara lain adalah mengizinkan kepada lulusan madrasah untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. SKB 2 menteri di jiwai oleh TAP MPR No. II /TAP/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan daya kebutuhan bidang bersama, antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu diantara sebagai salah satu diantara berbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan Madrasah.

Dalam keputusan tersebut terjadi perubahan berupa perbaikan dan penyempurnaan kurikulum sekolah umum dan madrasah. Perubahan tersebut tertuang dalam KMA No. 99 th 1984 untuk tingkat MI, ketentuan KMA no 100 untuk tingkat MTS, dan MA no101 untuk tingkat PGAN. Ke empat KMA tersebut merupakan upaya untuk memperbaiki kurikulum madrasah agar lebih efektif dan efisien antara lain dalam:

- a. Mengorganisasikan program pengajaran.
- b. Untuk membentuk manusia memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta keharmonisan sesama manusia dan lingkungannya.
- c. Mengefektifkan proses belajar mengajar.
- d. Mengoptimalkan waktu belajar.

Upaya dalam pengaturan dan modernisasi kurikulum madrasah dikembangkan dengan menyusun kurikulum sesuai dengan konsesus yang ditetapkan. Khusus untuk MA, waktu untuk setiap mata pelajaran berlangsung 45 menit dan

memakai semester. Sementara itu, jenis program pendidikan dalam kurikulum madrasah terdiri dari program inti dan program pilihan. Pengembangan kedua program kurikulum ini bagi menjadi dua bagian yaitu: pendidikan agama, terdiri dari: Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab, dan pendidikan umum antara lain: PMP, PSPB, Bahasa dan sastra Indonesia, pengetahuan, sains, olah raga dan kesehatan, Matematika, Pendidikan seni, pendidikan keterampilan, Bahasa Inggris (MTS dan MA), kimia (MA), Geografi (MA), Biologi (MA), Fisika (MA) dan kimia (MA). Sebagai esensi dari pembakuan kurikulum di sekolah umum dan madrasah ini memuat antara lain:

- a. Kurikulum sekolah dan madrasah terdiri umum dan madrasah terdiri dari program inti dan program pilihan.
- b. Program inti dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah, dan program inti sekolah umum dan madrasah secara kualitatif sama
- c. Program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi bagi sekolah menengah atas /Madrasah Aliyah
- d. Pengaturan Pelaksanaan kurikulum sekolah umum dan madrasah mengenai sistem kredit semester, bimbingan karir, dan ketuntasan belajar.
- e. Hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan diatur bersama oleh kedua departemen yang bersangkutan.³⁶

Secara nasional, pasca tumbangannya rezim Orde Baru (Orba) pengkajian pemikiran Islam berkembang cukup pesat. Banyak lembaga- lembaga pendidikan Islam yang sebelumnya sulit berkembang, kini berubah dan maju pesat. Malah, pendidikan Islam kini mulai siap bersaing mengikuti dinamika zaman dengan mengarah pada internasionalisasi lembaga pendidikan Islam, mulai dari TK, SD/ MI hingga Perguruan Tinggi/Universitasnya. Sungguhpun demikian, masih terdapat anggapan bahwa lembaga pendidikan Islam masih kalah kompetitif dibandingkan dengan lembaga pendidikan

³⁶ Ibid, hlm.365

umum, terutama dalam mempersiapkan output yang bisa langsung diserap dunia kerja, dunia usaha, maupun dunia birokrasi Indonesia.³⁷

4. Pendidikan Islam Pasca Reformasi

Di antara faktor yang mempengaruhi dunia pendidikan Islam di Indonesia, khususnya pesantren dan madrasah, adalah berkaitan dengan finansial. Terlebih lagi madrasah yang dirasakan semakin penting eksistensinya dalam menyongsong pendidikan sejak diberlakukannya Undang Undang No. 2/1989 yang direvisi dalam UU Sisdiknas Tahun 2003. Selain sistem pendidikan Nasional, Undang Undang No. 20/2000 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan atau UU no. 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga belum mampu mendorong pesantren maupun madrasah secara umum terjun dalam kompetisi memajukan pendidikan di Indonesia bersama lembaga pendidikan umum. Untuk itu, potensi yang ada pada lembaga Pendidikan Islam khususnya madrasah perlu mendapat perhatian yang serius, terutama dalam bidang keuangan disamping pemantapan sistem pengajarannya.

Lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 di atas, boleh jadi telah membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan pendidikan Islam menjadi lebih maju. Banyak pihak merasa bahwa Undang-Undang SISDIKNAS yang baru secara konseptual merupakan titik balik pencerahan dalam mengembangkan, memberdayakan serta meningkatkan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Undang-undang tersebut dalam konteks peningkatan kualitas menjadi sangat relevan. Harapan bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, seolah menemukan energi baru. UU tersebut telah memberikan perspektif baru yang revolusioner bagi perbaikan sektor pendidikan, dimana pendidikan telah menjadi urusan publik secara umum dengan mengurangi otoritas pemerintah, baik bertalian dengan kebijakan kurikulum, manajemen, dan berbagai kebijakan pengembangan institusi pendidikan itu sendiri. Undang- undang

³⁷ Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm 3-17.

SISDIKNAS dipandang sebagai salah satu bentuk reformasi di bidang pendidikan.³⁸

Reformasi di bidang pendidikan, menurut Toto Suharto, akan terjadi jika pimpinan institusi, masyarakat sebagai stake holders maupun pemerintah (pusat dan daerah), memiliki pandangan yang kreatif, dinamis, kolektif, dan visi yang sama dalam proses reformasi pendidikan. Dengan ini, reformasi pendidikan diharapkan dapat menghasilkan institusi dan lulusan yang potensial dan kompetitif.

Karena itu, banyak kalangan menilai bahwa sudah saatnya pendidikan Islam lebih bersikap rasional dan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Apalagi sekarang ini, yang menjadi mainstream pemikiran pendidikan adalah mempersiapkan sumber daya manusia di masa datang, dan bukan semata-mata sebagai alat untuk membangun pengaruh politik atau alat dakwah dalam arti sempit. Kurang tertariknya masyarakat untuk memilih lembaga-lembaga pendidikan Islam bukan karena telah terjadi pergeseran nilai atau ikatan keagamaannya yang mulai memudar, melainkan karena sebahagian besar kurang menjanjikan masa depan dan kurang responsif terhadap tuntutan saat ini maupun saat yang akan datang. Padahal paling tidak ada tiga hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan, yaitu nilai (agama), status sosial, dan cita-cita. Bahkan dua pertimbangan terakhir (status sosial dan cita-cita) cenderung lebih dominan.³⁹

Dalam realitasnya, potensi pendidikan yang dimiliki oleh umat Islam, baik yang berbentuk madrasah dan sekolah maupun pendidikan tinggi nampak belum menjadi kekuatan aktual. Karena itu, menurut Malik Fadjar, perlu dilakukan pembenahan dan pengembangan melalui dua pendekatan, yaitu *microscopic* (tinjauan mikro) dan *macroscopic* (tujuan makro). Dalam pendekatan yang pertama, pendidikan dianalisis dalam

³⁸ Abu Bakar dan Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam: Respon Kreatif terhadap Undang-Undang SISDIKNAS* (Yogyakarta: Safiria Insani Pres, 2005), h. 5.

³⁹ Toto Suharto, *Rekonstruksi dan Modernisasi: Menuju Revitalisasi Lembaga Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005), h. 25.

hubungannya dengan kerangka sosial yang lebih luas. Sedangkan dalam pendekatan yang kedua, pendidikan dianalisis sebagai satu kekuatan unit yang hidup dimana terdapat saling interaksi di dalam dirinya.⁴⁰

D. Kesimpulan

Dari penjabaran di atas, secara garis besar, dinamika modernisasi pendidikan di Indonesia mengakomodasi perkembangan tiga model lembaga pendidikan Islam: (1) Pesantren, yang merupakan lembaga pendidikan asli Indonesia, (2) Madrasah, baik dikelola oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, (3) Sekolah umum yang bercirikan Islam. Adapun dalam tataran level modernisasi pendidikan di Indonesia, terdapat tiga corak modernisasi. *Pertama*, level kelembagaan, yaitu modernisasi atau perubahan lembaga pendidikan Islam, baik dalam bentuk transformasi diri lembaga yang sudah ada maupun mendirikan lembaga pendidikan Islam yang baru; *kedua*, substansi isi kurikulumnya, yaitu dari pengajaran ilmu-ilmu umum ke dalam lembaga pendidikan Islam; *ketiga*, aspek metodologis yaitu perubahan metodologi pengajaran yang selama ini diterapkan dalam lembaga pendidikan Islam yang dianggap kurang relevan; *keempat*, dari sisi fungsi. Secara tradisional, fungsi lembaga pendidikan Islam meliputi transfer ilmu-ilmu keIslaman (*transfer of Islamic knowledge*), memelihara tradisi Islam (*maintenance of Islamic tradition*) dan melahirkan ulama (*reproduction of ulama*), diubah menjadi lebih kompleks seperti lembaga pendidikan Islam berfungsi sebagai *agent of change*.

E. Daftar Pustaka

Abu Bakar dan Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam: Respon Kreatif terhadap Undang-Undang SISDIKNAS* (Yogyakarta: Safiria Insani Pres, 2005).

Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008).

⁴⁰ Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), hlm 235.

- Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: PT. Al-Maarif Bandung, 1989).
- Harun Nasution, *Pembaruan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003).
- Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999).
- Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994).
- Rohidin Wahab, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2004).
- Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Toto Suharto, *Rekonstruksi dan Modernisasi: Menuju Revitalisasi Lembaga Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005).
- Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Zakiah Darajat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

BAGIAN V

PERIODISASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Ismail Sujono

A. Pendahuluan

Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sudah dimulai sejak awal masuknya Islam di Asia Tenggara. Nusantara (Indonesia) merupakan daerah yang pertama kali penyebaran Islam dilakukan, terbukti dengan berbagai catatan sejarah. Yang awal mulanya dibuka melalui jalur transaksi perdagangan. Hingga akhirnya dapat berkembang dan menyebar ke seluruh daerah pulau-pulau di Indonesia.

Walau dalam pandangan para ahli sejarah terdapat perbedaan pendapat mengenai kapan waktu yang tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Hal itu menyerutkan semangat dan bukti bahwa Islam telah tersebar di Indonesia hingga menjadi agama yang mayoritas dianut masyarakat Indonesia berkat doa dan perjuangan pendahulu-pendahulu (ulama) kita.

Agar mendapatkan pemahaman yang utuh, penulis mencoba memetakan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia berdasarkan periodisasinya, dimulai dengan pertama kalinya Islam masuk di Nusantara (Indonesia). Dilanjutkan dengan periode selanjutnya, yaitu masa perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, masa penjajahan belanda dan jepang, masa orde lama dan orde baru, hingga masa pasca reformasi sampai saat ini.

B. Priodesasi Pendidikan Islam di Indonesia

Perkembangan pendidikan Islam tidak hanya berhenti pada periode-periode awal (periode pembinaan pada masa Nabi, pertumbuhan, perkembangan hingga kejayaan pendidikan Islam) saja, namun terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan dimana agama Islam itu dianut, maka disitu pula pendidikan Islam ikut berkembang. Perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dengan agama (ajaran) Islam itu sendiri.

Layaknya dua sisi mata uang antara ajaran Islam dengan pendidikan Islam yang saling melengkapi dan tak terpisahkan.

Hingga akhirnya Islam sampai dan menyebar ke daerah Asia Tenggara, yang dimulai dengan penyebaran Islam di Nusantara (Indonesia) hingga menyebar ke berbagai daerah. Adapun prosesnya melalui beberapa jalur, yaitu jalur perdagangan, perkawinan, kesenian, sufisme dan pendidikan.⁴¹ Dengan masuknya Islam di Nusantara, maka pendidikan Islam pun ikut berkembang. Untuk dapat memahami lebih dalam bagaimana perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam di Indonesia, maka penulis akan memetakan perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam berdasarkan periodisasinya.

1. Periode Pertama Masuknya Islam dan Berkembangnya Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia

Pada periode ini pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam beriringan dengan menyebarnya agama Islam di beberapa daerah di Indonesia, bahkan ketika masuk masa kerajaan-kerajaan Islam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan mengalami kemajuan yang pesat. Yang awalnya hanya dilakukan di masjid-masjid, langgar dan surau sebagai bekal permulaan mengenalkan Islam, sampai pada akhirnya dapat mendirikan pondok pesantren hingga madrasah. Hal ini tidak luput dari pandangan ulama kita, bahwa agama Islam itu adalah pendidikan (ilmu pengetahuan). Peran pendidikan sangat penting dalam kemajuan suatu peradaban.

Dalam pandangan ahli sejarah, terdapat tiga pendapat mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. *Pertama*, teori Gujarat yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia mulai abad ke-13 dan perintisnya orang muslim yang berasal dari Gujarat, India. *Kedua*, teori Mekah yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 dan perintisnya orang muslim yang berasal dari Arab (Mesir). Dan yang *ketiga*, teori Persia yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-13 dan perintisnya orang muslim yang berasal dari Persia (Iran).

⁴¹ Daulay, Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan & Pembaruan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.16

Dari ketiga teori di atas di dasarkan dengan bukti-bukti sejarah maupun catatan-catatan sejarah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Walau demikian, disamping memiliki kebenaran dari bukti sejarah, juga memiliki kelemahan dari perbedaan teori yang terjadi dari para ahli sejarah. Hal ini tidak dapat meruntuh bukti bahwa Islam telah masuk dan berkembang Indonesia hingga saat ini. Dapat kita simpulkan bahwa pertama kali Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai yang telah dimulai sejak abad ke-7 dan mengalami pertumbuhannya yang pesat pada abad ke-13. Peran bangsa Arab, Gujarat dan Persia merupakan aktor utama dalam penyebaran Islam di Indonesia.⁴²

Pada abad ke -14 kerajaan Samudra Pasai mengalami masa kejayaannya. Pada masa ini warga kota terkenal dengan orang-orang yang berpendidikan. Menurut Ibnu Batutah, mengatakan Pasai menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara, dan berkumpul ulama-ulama dari negara-negara Islam.⁴³

Dalam proses penyebaran Islam di Indonesia dilalui dengan beberapa metode, melalui perdagangan, pernikahan, pengobatan, budaya, tasawuf dan pendidikan. Dalam hal ini fokus kita pada jalur pendidikan, yang mana lembaga pendidikan Islam pada saat itu memiliki peran dan fungsi dalam penyebaran Islam dan mengajarkan masyarakat keilmuan Islam. Adapun lembaga pendidikan yang telah berkembang saat itu, diantaranya:

a) Pendidikan Masjid, Langgar dan Surau

Sistem pendidikan di Masjid, Langgar dan Surau merupakan sistem pendidikan permulaan sebagai bekal awal mengenalkan Islam. Disinilah tempat diajarkannya baca tulis al-Quran dan diajarkan pula hal-hal yang fundamental yang berkaitan dengan masalah ibadah terutama cara bersuci dan tata cara sholat.

b) Pendidikan Pesantren

Sistem pendidikan pesantren yang berkembang khususnya di pulau Jawa, tidak bisa dipisahkan dari peran Walisongo.

⁴² Kodir, Abdul, *Sejarah Pendidikan Islam dari Masa Rasulullah hingga Reformasi di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 139-141

⁴³ Rofi, Sofyan, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Sleman: Deepublish, 2016), h. 7

Dakwah Walisongo yang berhasil mengislamkan pulau Jawa dengan metode dakwahnya yang mengombinasikan antara aspek spiritual, keislaman dan tradisi masyarakat setempat. Dan perwujudan hal tersebut dengan mendirikan sebuah pesantren yang dijadikan tempat dakwah Islam sekaligus tempat belajar mengajar.

c) Pendidikan Madrasah

Sistem pendidikan yang menyerupai madrasah sudah ada pada masa kerajaan Aceh Darussalam, seperti pendidikan meunasah, pendidikan rangkang, pendidikan dayah, dan pendidikan dayah teuku chik.⁴⁴

2. Periode Kedua Masa Penjajahan Portugis, Belanda dan Jepang

Pada periode ini pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam tetap berjalan, walau mendapat hambatan dan rintangan di beberapa sektor. Dengan kedatangan bangsa kolonial (penjajah) yang diawali oleh bangsa Portugis sampai bangsa Belanda. Para penjajah datang memiliki maksud dan tujuannya yang sudah kita kenal dalam pelajaran sejarah, yaitu 3G (*Gold, Glory, dan Gospel*). *Pertama*, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*gold*), *kedua*, bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik wilayah Indonesia (*glosy*), dan *ketiga*, bertujuan untuk menyebarkan ideologi dan keagamaan (*gospel*).⁴⁵ Tantangan terberat yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan Islam terjadi tatkala Islam dihadapkan dengan persaingan melawan kristenisasi yang dilakukan oleh pihak penjajah.

Masa penjajahan Belanda, umat Islam mendapat perlakuan dengan disejajarkan dengan kaum pribumi. Terjadi pembatasan bagi mereka yang beragama Islam hanya diperbolehkan di sekolah desa dan vervlog (sekolah sambungan untuk tingkat

⁴⁴ Syaharuddin dan Susanto, Heri, *Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi)*, (Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, 2019), h. 21-30

⁴⁵ Dahlan, Zaini, *Sejarah Pendidikan Islam; Signifikansi Jejak Pendidikan Islam bagi Pengembangan Pendidikan Islam Masa Kini dan Masa Depan*, (Medan: Widya Puspita, 2018), h. 113

lanjut sekolah rakyat). Hal itu terjadi pada saat itu agama Islam menjadi agama mayoritas yang dianut penduduk pribumi. Sedangkan penduduk yang beragama non Islam (terkhusus Kristen baik Protestan maupun Katolik) mendapat perlakuan istimewa yang disetarakan dengan bangsa penjajah saat itu.

Adapun pengaruh penjajah Belanda terhadap dinamika pendidikan Islam saat itu sangat besar. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah Belanda yang tidak menghendaki perkembangan pendidikan dan pengajaran agama Islam, hingga akhirnya perkembangan pendidikan Islam mengalami kemandegan bahkan mundur. Penjajah Belanda bahkan memperkenalkan sekolah-sekolah modern yang saat itu berkembang pesat di dunia Barat. Hal ini membuat pengaruh buruk bagi sistem pendidikan Islam di Indonesia, yaitu pesantren.⁴⁶

Kebijakan mengenai pendidikan Islam sangat diskriminatif.⁴⁷ Namun hal ini tidak menyurutkan perjuangan bahkan menyadarkan ulama-ulama kita saat itu untuk dapat melakukan perlawanan balik terhadap tantangan dan rintangan yang diberikan oleh penjajah Belanda saat itu. Hal ini pun tidak lepas dari peran pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan yang memberikan ide pembaharuan dalam sektor pendidikan khususnya.

Selain pernah dijajah oleh Portugis dan Belanda, Indonesia pun sempat dijajah oleh Jepang yang berhasil mengusir Hindia Belanda dari tanah Indonesia dan berhasil menguasai Indonesia pada tahun 1942. Secara umum dunia pendidikan di masa penjajahan Jepang tidak diperhatikan bahkan terbengkalai, peserta didik di sekolah-sekolah hanya diperintahkan gerak jalan, baris berbaris, bekerja bakti, bernyanyi dan lain sebagainya. Sedangkan pendidikan Islam sebaliknya, mendapatkan kebebasannya dan tidak mendapat pengawasan langsung dari penjajah Jepang. Bahkan Jepang memberikan

⁴⁶ Rohmadi, *Lintasan Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*, (Ponorogo: Sinergi Karya Mulia, 2018), h. 56-62

⁴⁷ Dahlan, Zaini, *Sejarah Pendidikan Islam...* h. 115

dorongan pesantren dan kehidupan beragama untuk berkembang.⁴⁸

3. Periode Ketiga Masa Kemerdekaan Republik Indonesia (Orde Lama) hingga Orde Baru

Setelah memproklamkan kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai bukti terbebasnya dari segala bentuk penjajahan dari negara-negara luar. Negara membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) pada tanggal 27 Desember 1945, sebagai bentuk keseriusan negara dalam memperhatikan penyelenggaraan pendidikan agama, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Walau masih dalam tahap berbenah diri, negara betul-betul memperhatikan masalah dunia pendidikan. Setelah membentuk BPKNP, negara pun membentuk Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) sebagai bentuk usaha memajukan dunia pendidikan. Tidak hanya itu, pada tanggal 3 Januari 1946 negara membentuk Departemen Agama yang juga mengurus penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia, baik yang ada di sekolah umum maupun di sekolah-sekolah agama, misal madrasah dan pondok pesantren.

Selanjutnya, kemajuan pendidikan Islam semakin pesat dengan didirikannya beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, diantaranya lahirnya Pendidikan Guru Agama (PGA), Sekolah Guru Hakim Agama (SGHA), Akademi untuk Ilmu Agama (ADIA) yang kemudian berganti Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN), dan Institut Agama Islam Negeri (sekarang berganti UIN) dan STAIN. Hal ini pula diikuti oleh ormas swasta Muhammadiyah dan NU yang mendirikan perguruan tinggi dengan tingkat/jenjang yang sama.

Bahkan Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Menteri Suwandi mengeluarkan beberapa keputusan penting berkaitan dengan pendidikan Islam, yaitu (1) hendaknya pendidikan agama diberikan di semua sekolah, (2) guru agama harus mempunyai pengetahuan umum, (3) harus ada

⁴⁸ M., Iswanti, *Pendidikan Islam; Sejarah, Peran dan Kontribusi dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), h. 62-64

pendidikan guru agama, dan (4) pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya.

Namun keadaan pendidikan Islam berubah drastis terutama pada tahun 1959 hingga 1965, yang pada saat itu presiden Soekarno melakukan demokrasi terpimpin yang berkaki tiga, yaitu Nasakom. Hal ini mengakibatkan dasar dan tujuan pendidikan nasional direvisi, yang semula Pendidikan Nasional Pancasila berubah menjadi Pendidikan Nasional Pancacitra yang berorientasi terbentuknya masyarakat sosialis yang berujung kepada komunisme. Akhirnya pendidikan agama pun hilang di sekolah-sekolah, hingga akhirnya muncul kembali pada tahun 1966 dengan ditandai bergantinya kepemimpinan dari orde lama ke orde baru. Dengan ditetapkannya oleh MPRS bahwa pendidikan agama diwajibkan mulai dari Sekolah Rakyat (SR) hingga dengan perguruan tinggi.⁴⁹

4. Periode Keempat Masa Reformasi hingga Pasca Reformasi

Pada periode ini sangat kental akan nuansa politiknya, pada masa reformasi ini terjadi gejolak politik yang mempengaruhi setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dunia pendidikan mengalami imbasnya. Dunia pendidikan Islam masa reformasi ini mengalami beberapa permasalahan, diantaranya mengalami perubahan kurikulum, perubahan praktek pendidikan keagamaan, hingga munculnya undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003. Dalam hal ini pendidikan Islam telah digabungkan ke dalam pendidikan nasional.

Setelah terjadinya pergantian kekuasaan, pemerintahan B.J Habibie menetapkan kebijakan baru mengenai otonomi daerah, termasuk otonomi pendidikan. Tidak ada lagi sentralisasi kebijakan, setiap daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri termasuk pendidikan. Bahkan pemerintahan setelahnya (Gus Dur dan Megawati) memperkuatnya dalam undang-undang, pada masa Megawati menghasilkan RUU Sisdiknas yang kemudian disetujui menjadi UU Sisdiknas. Akhirnya masalah pendidikan tidak lagi

⁴⁹ M., Iswantir, *Pendidikan Islam*;..., h. 64-66

semuanya ditangani oleh pusat, tapi berpindah ke pemerintah daerah (kabupaten atau kota).

Pada masa ini sering terjadi perubahan-perubahan dalam kurikulum pada pendidikan nasional. Yang dimulai dengan lahirnya KBK 2004, kemudian berganti KTSP 2006, kemudian berganti lagi dengan kurikulum K13, sampai pada masa pandemi berganti menjadi kurikulum Merdeka. Dalam hal ini pendidikan Islam ikut berdampak, sejak munculnya UU Sisdiknas lembaga-lembaga pendidikan Islam (misalnya Madrasah) merupakan jenis pendidikan umum yang jenjang pendidikannya disetarakan dengan sekolah umum.⁵⁰

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan *Periodisasi Pendidikan Islam di Indonesia* di atas, penulis akan menyimpulkan beberapa poin penting dari pembahasan di atas, diantaranya:

1. Periodisasi Pendidikan Islam di Indonesia dapat kita bagi dalam empat periode, yaitu (1) Periode pertama masa masuknya Islam hingga munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, (2) Periode kedua masa penjajahan Portugis, Belanda dan Jepang, (3) Periode ketiga masa kemerdekaan Republik Indonesia, orde lama dan orde baru, (4) Periode keempat masa reformasi hingga pasca reformasi.
2. Pendidikan Islam tumbuh berkembang beriringan dengan menyebarnya agama Islam di Indonesia, bahkan ketika masuk masa kerajaan-kerajaan Islam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan mengalami kemajuan yang pesat. Yang awalnya hanya dilakukan di masjid-masjid, langgar dan surau sebagai bekal permulaan mengenalkan Islam, sampai pada akhirnya dapat mendirikan pondok pesantren hingga madrasah.
3. Pada masa penjajahan Barat, pendidikan Islam mendapatkan tekanan dan rintangan dari bangsa penjajah, terutama masa penjajahan Belanda yang sangat diskriminatif terhadap bangsa pribumi yang beragama Islam, bahkan mengalami

⁵⁰ Syaharuddin dan Susanto, Heri, *Sejarah Pendidikan Indonesia...*, h.. 117-124

kemandegan. Namun hal itu tidak menyurutkan perjuangan dan gerak langkah para pejuang kita hingga akhirnya pendidikan Islam masih bisa bertahan dibawah tekanan dan rintangan dari bangsa penjajah.

4. Hingga akhirnya bangsa Indonesia dapat terbebas dari tangan penjajah dan mendeklarasikan kemerdekaannya. Dan hal ini berdampak positif bagi pendidikan Islam. Perhatian negara terhadap kemajuan pendidikan Islam sangat besar, bahkan membentuk sebuah Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) untuk dapat memberikan perhatian lebih di sektor pendidikan. Kemajuan ini pun berlanjut hingga masa saat ini pendidikan Islam masuk dalam undang-undang sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini.

D. Daftar Pustaka

- Dahlan, Zaini, *Sejarah Pendidikan Islam; Signifikansi Jejak Pendidikan Islam bagi Pengembangan Pendidikan Islam Masa Kini dan Masa Depan*, (Medan: Widya Puspita, 2018)
- Daulay, Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan & Pembaruan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Kodir, Abdul, *Sejarah Pendidikan Islam dari Masa Rasulullah hingga Reformasi di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- M., Iswantir, *Pendidikan Islam; Sejarah, Peran dan Kontribusi dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandar Lampung: Aura, 2019)
- Rofi, Sofyan, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Sleman: Deepublish, 2016)
- Rohmadi, *Lintasan Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*, (Ponorogo: Sinergi Karya Mulia, 2018)
- Syahrudin dan Susanto, Heri, *Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi)*, (Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, 2019)

BAGIAN VI

MASUKNYA ISLAM DI INDONESIA DENGAN BENTUK PENDIDIKANNYA

Hawa Failasifa Salsabila

A. Pendahuluan

Sejarah Pendidikan Islam dimulai sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang oleh sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa awal mula masuknya di pulau Sumatra bagian utara di daerah Aceh. Artinya, sejarah pendidikan Islam sama tuanya dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemeluk agama baru tersebut sudah tentu ingin mempelajari dan mengetahui lebih dalam tentang ajaran-ajaran Islam. Ingin pandai sholat, berdoa dan membaca al-Quran yang menyebabkan timbulnya proses belajar, meskipun dalam pengertian yang amat sederhana.

Dari sinilah mulai timbul pendidikan Islam, dimana pada mulanya mereka belajar di rumah-rumah, langgar/surau, masjid kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Setelah itu baru timbul sistem madrasah yang teratur sebagaimana yang kita kenal sekarang ini.

Kendatipun pendidikan Islam dimulai sejak pertama Islam itu sendiri menancapkan dirinya di kepulauan nusantara, namun secara pasti tidak dapat diketahui bagaimana cara pendidikan pada masa permulaan Islam di Indonesia, seperti tentang buku yang dipakai, pengelolanya dan sistemnya. Yang dapat dipastikan hanyalah pendidikan Islam pada waktu itu telah ada, tetapi dalam bentuk yang sangat sederhana.

B. Pembahasan

a. Pendidikan pada masa awal masuknya Islam di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak masuknya Islam di Indonesia. Islam mulai memasuki wilayah Indonesia melalui pedagang pedagang dari India, Islam disebarkan secara luas dengan keadaan damai tanpa

adanya pertumpahan darah. Pada awal masa penyebaran islam para tokoh agama lah yang sangat berjasa dalam perkembangan agama ini, masyarakat menyebutnya para wali, terutama wali songo yang melakukan penyebara agama islam di tanah jawa.

Tahap awal pendidikan islam dilaksanakan yakni bermulai dari para muballigh dan muridnya. Setelah adanya perkumpulan orang orang muslim, maka mereka membangun tempat untuk ibadah yakni masjid yang menjadi bangunan pertama yang berdiri disekitar tempat tinggal para ulama. Setelah masjid terbnagun muncullah bangunan bangunan yang lain untuk peribadahan seperti pondok pesantren, dayah, ataupun surau. Kemudian inti dari awal pendidikan islam yakni mengkaji kitab kitab klasik yang menjadi tolak ukur pengetahuan agama.⁵¹

b. Bentuk Pendidikan awal munculnya Islam di Indonesia

Awal mula pendidikan islam dilaksanakan secara non formal. Yakni para tokoh agama memberikan suri tauladan yang baik dalam kehidupan keseharian mereka dengan menciptakan kedamaian dan kerukunan serta menciptakan suasana betapa bahagianya berakhlakul kharimah, sehingga masyarakat tertarik dengan sendirinya untuk bersama dalam islam. Islamisasi dilakukan oleh para ulama dan muballigh yang dibekali ilmu pengetahuan menyampaikan kepada masyarakat kampung.⁵²

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, awal mula pendidikan islam dilaksanakan beliau mempergunakan Masjid Nabawi untuk proses peribadahan dan pendidikan, kemudian hal ini diikuti oleh para khalifah khalifah setelah beliau, sehingga masjid adalah tempat yang wajib untuk pendidikan di masyarakat. .

Ada beberapa lembaga pendidikan Islam awal yang muncul di Indonesia yaitu:

⁵¹ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia (Jakarta: Kencana. 2004)* (Jakarta: Kencana, 2004), 145–46.

⁵² Badri Yatim, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 201–3.

1. Masjid dan Langgar

Masjid fungsi utamanya adalah untuk tempat shalat yang lima waktu ditambah dengan sekali seminggu dilaksanakan shalat jum'at dan dua kali setahun dilaksanakan shalat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selain dari masjid ada juga tempat ibadah yang disebut langgar, bentuknya lebih kecil dari masjid dan digunakan hanya untuk tempat shalat lima waktu, bukan untuk tempat shalat jum'at.

Selain dari fungsi utama masjid dan langgar difungsikan juga untuk tempat pendidikan. Di tempat ini dilakukan pendidikan buat orang dewasa maupun anak-anak. Pengajian yang dilakukan untuk orang dewasa adalah pengajian penyampaian-penyampaian ajaran Islam oleh Muballigh (Ustadz, Guru, Kyai) kepada para jamaah dalam bidang yang berkenaan dengan aqidah, ibadah dan akhlak.

Sedangkan pengajian untuk anak-anak berpusat kepada pengajian Al-Qur'an menitik beratkan kepada kemampuan membacanya dengan baik sesuai dengan kaedah-kaedah bacaan dan juga diberi pendidikan keimanan ibadah dan akhlak.

Al-Abdi dalam bukunya "Almadlehal" menyatakan bahwa masjid merupakan tempat terbaik untuk melakukan kegiatan pendidikan. Dengan menjadikan lembaga pendidikan dalam masjid akan terlihat hidupnya sunah-sunah Islam, menghilangkan bid'ah-bid'ah, mengembangkan hukum-hukum Tuhan, serta menghilangnya stratifikasi rasa dan status ekonomi dalam pendidikan. Maka dengan demikian masjid sudah merupakan lembaga kedua setelah keluarga, yang jenjang pendidikannya terdiri dari sekolah menengah dan sekolah tinggi dalam waktu yang sama.

Memang masjid atau langgar merupakan institusi pendidikan yang pertama dibentuk dalam lingkungan masyarakat muslim. Pada dasarnya masjid atau langgar mempunyai fungsi yang tidak terlepas dari kehidupan keluarga. Sebagai lembaga pendidikan, berfungsi sebagai penyempurna pendidikan dalam keluarga, agar selanjutnya anak mampu melaksanakan tugas-tugas hidup dalam masyarakat dan lingkungannya. Pada mulanya pendidikan di

langgar atau masjid, dalam arti sederhana dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan formal, dan sekaligus lembaga pendidikan social.⁵³

2. Pesantren

Menurut Martin, alasan pokok didirikannya pesantren adalah untuk mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu yang kemudian dikenal sebagai kitab kuning.⁵⁴ Namun demikian, pandangan ini kemudian melahirkan pertanyaan tentang kapan pertama kali munculnya pesantren. Hal ini tidak mudah untuk dijawab, sebab di Jawa sendiri sebagai pusat pengembangan, lembaga ini pada awalnya tidak terdapat bukti yang cukup. Hanya saja diketahui bahwa sekitar abad ke-15 M. pesantren telah didirikan oleh para penyebar agama Islam yang dikenal dengan istilah Wali Songo, seperti di Ampel oleh Sunan Ampel dan di Giri oleh Sunan Giri.⁵⁵

Pembangunan suatu pesantren didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga pendidikan lanjutan. Namun demikian faktor guru yang memenuhi persyaratan keilmuan yang diperlukan akan sangat menentukan bagi tumbuhnya suatu pesantren. Pada umumnya berdirinya suatu pesantren diawali dari pengakuan masyarakat akan keunggulan dan ketinggian ilmu seorang guru atau kyai. Karena keinginan menuntut dan memperoleh ilmu dari guru tersebut, maka masyarakat sekitar, bahkan dari luar daerah datang kepadanya untuk belajar.

Kelangsungan hidup suatu pesantren amat tergantung kepada daya tarik tokoh sentral (guru/kyai) yang memimpin, meneruskan atau mewarisinya. Jika pewaris menguasai sepenuhnya baik pengetahuan keagamaan, wibawa, keterampilan mengajar dan kekayaan lainnya yang

⁵³ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 135.

⁵⁴ Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 146.

⁵⁵ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat, Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1999), 17.

diperlukan, maka umur pesantren tersebut akan lama bertahan. Sebaliknya pesantren akan menjadi mundur dan hilang, jika pewaris atau keturunan kyai yang mewarisinya tidak memenuhi persyaratan. Jadi seorang figur pesantren memang sangat menentukan dan benar-benar diperlukan.

Mengenai tujuan terbentuknya pondok pesantren, H.M. Arifin membedakannya menjadi dua bagian yaitu; tujuan umum, yaitu membimbing anak didik menjadi manusia yang berkepribadian muslim yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi muballig di tengahaengah masyarakatnya sesuai dengan kapasitas ilmu agama yang dimilikinya. Tujuan khusus, yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat.⁵⁶

Isi kurikulum pesantren terfokus pada ilmu-ilmu agama, seperti bahasa Arab, fiqhi, hadits, tafsir, ilmu kalam, tarikh (sejarah) dan sebagainya. Literatur ilmu-ilmu tersebut sebagaimana dikemukakan sebelumnya adalah kitab-kitab klasik yang disebut kitab kuning dengan ciri-cirinya antara lain:

- a. Kitab-kitabnya berbahasa Arab.
- b. Pada umumnya tidak menggunakan syakal, bahkan ada yang tanpa titik atau koma.
- c. Berisi keilmuan yang cukup berbobot.
- d. Metode penulisannya dianggap kuno dan relevansinya dengan ilmuilmu kontemporer kerap kali tampak relatif tidak ada.
- e. Lazimnya dikaji dan dipelajari di pondok pesantren.
- f. Kertasnya berwarna kuning.⁵⁷

Inti dari pesantren itu adalah pendidikan ilmu agama, dan sikap beragama. Karenanya mata pelajaran yang diajarkan semata-mata pelajaran agama. Pada tingkat dasar

⁵⁶ H.M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam Dan Umum* (Jakarta: Bina Aksara, 1991), 248.

⁵⁷ Muhaimin and Abd Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis Dan Kerangka Dasar Oprasionalisasinya* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), 300–301.

anak didik baru diperkenalkan tentang dasar agama dan Al-Qur'anul Kariim. Setelah berlangsung beberapa lama pada saat anak didik telah memiliki kecerdasan tertentu maka mulailah diajarkan kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik ini juga di klasifikasikan kepada tingkat dasar, menengah dan tinggi. Mahmud Yunus membagi pesantren menjadi empat tingkatan, yaitu: (1) Tingkat dasar. (2) Menengah (3) Tinggi. (4) Takhassus.

Dalam perkembangan berikutnya pensantren mengalami dinamika, kemampuan dan kesediaan pesantren untuk mengadopsi nilai-nilai baru akibat modernisasi, menjadikan pesantren berkembang dari yang tradisional ke modern. Karena itu hingga saat sekarang pesantren tersebut di bagi menjadi dua secara garis besar: – Pesantren Salafi, adalah pesantren yang masih terkait dengan system dan pola yang lama, – Pesantren Khalafi, adalah pesantren yang telah menerima unsure-unsur pembaharuan.

3. Meunasah, rangkang dan dayah

Secara etimologi meunasah berasal dari perkataan madrasah, tempat belajar atau sekolah. Bagi masyarakat Aceh meunasah tidak hanya semata-mata tempat belajar, bagi mereka meunasah memiliki multifungsi. Meunasah di samping tempat belajar, juga berfungsi tempat ibadah, tempat pertemuan, musyawarah, pusat informasi, tempat tidur, dan tempat menginap bagi musyafir, tempat perayaan kenduri masal dalam kampung, seperti maulid nabi SAW, nuzulul Qur'an, dan Isra' mi'raj dan juga sebagai tempat pejabat-pejabat gampong memutuskan dan memecahkan masalah-masalah social kemasyarakatan.

Di tinjau dari segi pendidikan, meunasah adalah lembaga pendidikan awal bagi anak-anak yang dapat disamakan dengan tingkatan sekolah dasar. Di meunasah para murid di ajar menulis, membaca huruf Arab, ilmu agama, dan akhlaq.

Meunasah dipimpin oleh seorang tengku, yang di Aceh besar disebut tengku meunasah. Tengku meunasah bertugas untuk membina agama di suatu tempat-tempat tertentu. Adapun rangkang adalah tempat tinggal murid, yang

dibangun di sekitar masjid. Menurut Qanun Meukuta Alam, dalam tiap-tiap kampung harus ada satu meunasah. Masjid berfungsi sebagai tempat berbagai kegiatan umat, termasuk didalamnya kegiatan pendidikan. Karena murid perlu mondok dan tinggal, maka perlu di bangun tempat tinggal mereka disekitar masjid, tempat tinggal murid disekitar ini inilah yang disebut dengan rangkang. Pendidikan di rangkang ini terpusat kepada pendidikan agama, disini telah diajarkan kitab-kitab yang berbahasa arab, tingkat pendidikan ini jika dibandingkan dengan sekolah saat sekarang adalah SLTP. System pendidikan di rangkang ini sama dengan pendidikan di pesantren. Di rangkang juga ada yang namanya tengku rangkang, yang bertugas untuk menjadi guru bantu yang membimbing sisiwa yang tinggal di rangkang.

Lembaga pendidikan berikutnya yang populer di Aceh adalah Dayah . dayah berasal dari bahasa arab Zawiyah. Kata Zawiyah pada mulanya merujuk kepda sudut dari satu bangunan,dan sering dikaitkan dengan masjid. Disudut masjid itu terdapat proses pendidikan antara si pendidik dengan si terdidik. Selanjutnya Zawiyah dikaitkan tarekat-tarekat sufi,dimana seorang syeikh atau mursyid melakukan kegiatan pendidikan kaum sufi.

Dengan demikian, kata dayah yang berasal dari kata Zawiyah disamping memiliki hubungan kebahasaan yakni berubahnya kata Zawiyah menjadi dayah menurut dialek Aceh, juga mempunyai hubungan fungsional, yakni sama-sama merujuk kepada tempat pendidikan.

Hasjmy menjelaskan tentang dayah adalah sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan mata pelajaran agama yang bersumber dari bahasa arab, misalnya fiqih,bahasa arab,tauhid tasawuf dan lan sebagainya.tingkat pendidikan ini setara dengan SLTA.⁵⁸

Pada Abad ke-18, surau dan dayah sudah mapan eksistensinya. Melalui lembaga-lembaga tersebut islam telah mengakar kuat di Nusantara. Akan tetapi, keberadaan lembaga-lembaga ini mulai terancam bahaya kolonialisme

⁵⁸ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, 142.

yang menawarkan westerenisasi, modernisasi, sekaligus kolonialisme sehingga ditantang kemampuannya untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Besarnya tantangan itu telah mampu menghapuskan beberapa lembaga pendidikan tradisional dari pentas sejarah⁵⁹

4. Surau

Pendidikan Islam yang berlangsung di surau atau langgar bersifat elementer, dimulai dengan mempelajari huruf abjad Arab (hijaiyyah) atau kadang-kadang langsung mengikuti guru dengan menirukan apa yang telah dibaca dari kitab suci al-Qur'an. Pendidikan seperti ini dikelola oleh seorang petugas yang disebut 'amil, modin atau lebai yang memiliki tugas ganda, yaitu selain memberikan do'a pada waktu upacara keluarga atau desa, juga berfungsi sebagai guru. Pelajaran biasanya diberikan setiap pagi dan petang hari, selama satu sampai dua jam yang memakan waktu selama beberapa bulan bahkan sampai sekitar satu tahun.

Kegiatan belajar berlangsung dalam bentuk sorogan dan halaqah. Materi pelajaran awal adalah membaca al-Qur'an, setelah itu diajarkan tentang tata cara shalat, dan masalah keimanan yang lebih dikenal dengan sifat dua puluh Tuhan, serta pelajaran akhlak yang disajikan melalui cerita-cerita para Nabi, orang-orang Saleh sehingga murid-murid diharapkan mampu meneladaninya dengan baik.⁶⁰

Pengajian al-Qur'an pada pendidikan langgar ini dapat dibedakan atas dua tingkatan, yaitu; (a) tingkatan rendah, yang merupakan tingkatan pemula, yaitu dimulai dengan pengenalan huruf hijaiyyah sampai bisa membacanya yang diadakan pada tiap-tiap kampung, (2) tingkatan atas; pelajarannya selain tersebut di atas, juga ditambah dengan pelajaran lagu, qasidah dan barazanji, tajwid dan mengaji kitab perukunan.

⁵⁹ Zuhairini, 145.

⁶⁰ Hasbullah, *Sejarah Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia; Lintasan Pertumbuhan Dan Perkembangannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 22.

Tujuan utama dari pendidikan surau atau langgar adalah agar murid dapat membaca al-Qur'an dengan baik dan benar, dan belum ada kajian yang terlalu mendalam untuk memahami isinya. Penyelenggaraan pendidikan ini tidak memungut biaya, tergantung pada kerelaan pada orang tua murid yang boleh saja memberikan sesuatu sebagai wujud rasa terima kasih orang tua kepada guru anaknya yang mungkin sekali ia adalah gurunya juga, apakah itu berupa benda atau uang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan salah satu dari karakteristik penting dalam pendidikan surau atau langgar ini adalah hubungan antara guru dan murid yang berlangsung terus menerus walaupun murid telah melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.

C. Daftar Pustaka

- Arifin, H.M. *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*. Jakarta: Bina Aksara, 1991.
- Asrohah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- Hasbullah. *Sejarah Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Muhaimin, and Abd Mujib. *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Oprasionalisasinya*. Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Putra Daulay, Haidar. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia (Jakarta: Kencana. 2004)*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Van Bruinessen, Martin. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1999.
- Yatim, Badri. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Zuhairini. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

BAGIAN VII

SISTEM PEMBELAJARAN ISLAM PADA MASA ORGANISASI KEAGAMAAN

Heni Yuliana Wati

A. Pendahuluan

Umat Islam di Indonesia termasuk kedalam negara muslim terbesar di dunia, selanjutnya disusul oleh negara Pakistan, India, Bangladesh dan Turki.⁶¹ Umat Islam Indonesia berperan penting bagi dunia akan posisinya, maka dengan begitu muncul akan adanya ormas-ormas yang sebagian ada sejak Indonesia sebelum merdeka. Ormas-ormas tersebut memiliki sejarah masing-masing ketika ormas tersebut sudah muncul dan ada keberadaannya. Dari ormas-ormas tersebut melintasi berbagai zaman yang sudah berlalu, baik dari zaman kolonialisme Belanda, masa penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan masa orde lama, masa orde baru, masa demokrasi dan reformasi hingga saat ini.

Melihat dari lintasan zaman yang selalu mengalami perubahan, ormas-ormas tersebut memiliki satu hal yang begitu penting dalam peran kejayaan islam yang ada di negara Indonesia. Begitu juga dengan hukum islam sekaligus penerapannya dalam mendorong setiap perkembangan yang ada dalam agama Islam. Hukum Islam mengalami perubahan yang begitu cepat berkat peran dari ormas Islam yang digerakkan melalui berbagai macam kegiatan-kegiatan di berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut antara lain ekonomi, hukum, pendidikan bahkan hingga bidang politik.⁶²

⁶¹ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 50.

⁶² Assegaf Abd. Rachman, *Politik Pendidikan Nasional; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), 72.

B. Pembahasan

1. Pengertian Ormas Islam

Ormas kepanjangan dari organisasi kemasyarakatan merupakan suatu istilah yang digunakan dalam negara Indonesia akan adanya organisasi-organisasi yang muncul dari masa ke masa dengan memiliki tujuan tertentu atas kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama.⁶³

Secara terminologi organisasi keagamaan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang terbentuk karena dasar keagamaan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ataupun profesi dengan tujuan untuk mencapai hal yang berbasis agama.⁶⁴

Dibentuknya ormas memiliki beberapa persamaan tujuan, misalnya dari sosial, pendidikan dan keagamaan. Ormas Islam juga bisa diartikan suatu organisasi dari masa ke masa yang disatukan dengan adanya tujuan sebagai bentuk menegakkan agama Islam yang sesuai dengan al-qur'an dan sunnah, sekaligus sebagai bentuk meningkatkan kemajuan para umat Islam baik dari bidang ekonomi, sosial, agama, pendidikan dan lain sebagainya.

2. Sistem Pembelajaran Islam pada Ormas Masa Kini

Ormas masa kini merupakan bagian dari adanya suatu perkembangan dakwah Islam yang terus menerus mengalami adanya peningkatan pada dekade 1990-an. Dalam hal tersebut sangat memiliki peluang untuk berperan dalam memajukan perkembangan di berbagai bidang, diantaranya budaya, politik, teknologi, pendidikan dan lain sebagainya. Dalam bidang ekonomi pertama kalinya muncul dan didirikannya bank Islam pertama yaitu Bank Muamalat. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdiri pada tahun 1991 yang diperkasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan

⁶³ Sarno Hanipudin, "Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa," *Journal of Islam and Muslim Society* 1, no. 1 (2019): 73.

⁶⁴ Sarno Hanipudin, 74.

pemerintah Indonesia kemudian mulai beroperasi di bulan Mei pada tahun 1992.⁶⁵

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dan tergolong sebagai pendidikan agama yang tertua. Selain berperan sebagaimana hal semestinya, pesantren juga berperan dalam menggerakkan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat.⁶⁶ Pada saat ini perubahan sosial tergolong mengalami perubahan pesat. Pesantren-pesantren membuat perubahan dengan memberikan modernisasi yang ada pada kurikulum pengajarannya. Selain melahirkan generasi sebagai alumni yang ahli bidang agama, terdapat juga usaha dalam membentuk peningkatan dari penguasaan dibidang pengetahuan umum dan teknologi. Salah satu pesantren yang bernama Pesantren Gontor Modern merupakan pesantren yang memiliki pembelajaran kekhususan dalam bahasa asing yaitu bahasa Arab dan Inggris. Pesantren berbasis modern yang ada pada saat ini sudah mulai mengembangkan pendidikan umum atau sekolah dengan mengadakan kerja sama bersama lembaga-lembaga yang ada diluar pesantren. Misalnya saja mendirikan perguruan tinggi, akademi keperawatan, teknologi informatika dan mengembangkan sekolah umum dengan standar internasional.⁶⁷

Pondok yang telah berhasil mengembangkan SMU dengan standar nasional berupa kejuruan teknologi informatika ataupun kebidanan dan keperawatan misalnya pesantren Darul Ulum yang berada di Jombang Jawa Timur. Perguruan Tinggi Islam terus melakukan peningkatan yang pesat dalam hal pengajaran, hal tersebut dikarenakan perubahan zaman yang didalamnya akan mencetak generasi melek akan teknologi sebagai bentuk persaingan ilmu di

⁶⁵ Azyumardi Azra, *Ideologi Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Minium Ke III* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 69.

⁶⁶ Haidar Putra dan Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 27.

⁶⁷ Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 85.

era maju dan modern. Beberapa IAIN yang ada di Indonesia mengalami perkembangan yang baik kemudian merubah status dan nama menjadi UIN. Selanjutnya dalam perubahan nama tersebut terdapat berbagai fakultas dan jurusan umum selain dibidang ke agamaan. Nama-nama UIN yang ada di Indonesia antara lain UIN Sunan Alauddin Makassar (Makassar), UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang), UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta) dan UIN lain-lainya.⁶⁸

Ormas-ormas Islam telah memberikan banyak peran terhadap kemerdekaan yang ada di Indonesia saat ini. Melalui sejarah yang ada di Indonesia tentunya peran yang terjadi dalam ormas tersebut juga mengalami pasang surut. Tokoh-tokoh ormas Islam bisa dijadikan sebagai bentuk inspirasi dan panutan oleh generasi-generasi Islam yang ada di Indonesia akan keteguhannya dalam mengembangkan dan memajukan kehidupan manusia di berbagai aspek bidang.

3. Organisasi-organisasi Islam di Indonesia

a. Sarekat Islam (SI)

Sejarah Sarekat Islam merupakan suatu organisasi yang berbasis modern dan ada ketika pada masa kolonial. Adanya organisasi ini dilatarbelakangi oleh pergolakan sosial politik yang begitu hebat di Hindia Blanda. Berdirinya organisasi ini juga termasuk dalam dampak akan adanya politik etis di bidang pendidikan yang dijalankan oleh negara Belanda. Para pemuda-pemuda yang telah memperoleh didikan dan pengajaran dari Belanda terinspirasi untuk mendirikan organisasi yang berbasis Islam.⁶⁹ Secara umum organisasi ini berasal dari gerakan Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh H. Samanhoedi. Beliau adalah seorang yang memiliki usaha atau pengusaha dalam bidang batik membatik di Kampung Lawean Solo, pada tanggal 16 Oktober 1905 di Surakarta. Pengikut organisasi berasal

⁶⁸ A. Soedomo Hadi, *Pendidikan (Suatu Pengantar)* (Surakarta: UNS Press, 2008), 111.

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Organisasi dan Administrasi Pendidikan. Teknologi dan Kejuruan* (Jakarta: Ditjen Dikti, 1988), 61.

dari semua lapisan yang ada di masyarakat, baik dari kalangan ulama, kiyai, pedagang dan buruh. Pada tahun 1912 Cokroaminoto merubah namanya menjadi Sarekat Islam dengan alasan agar organisasi ini tidak hanya berfokus dibidang ekonomi saja. Selanjutnya pada tahun 1919 pengikut atau anggota yang telah bergabung sekitar berjumlah dua juta orang.

Sarekat Islam mulai terpecah belah sejak masuknya suatu kelompok komunis yang dibawa oleh seorang dengan nama Semaun. Hal tersebut terjadi karena pada saat itu Semaun terpilih sebagai Presiden SI Semarang pada tanggal 6 Mei 1917. Pada saat itu Semaun merangkap sebagai salah satu anggota ISDV dan juga memiliki kedekatan dengan Sneevilet, seorang Belanda yang beraliran komunis. Selanjutnya di daerah Jawa Barat SI juga memiliki cabang namun dengan aliran revolusioner. Akibat adanya perpecahan yang ada dalam organisasi SI maka dibuatlah peraturan bahwa tidak diperbolehkannya anggota SI yang juga merangkap dengan organisasi lain. Dengan begitu anggota yang memiliki aliran komunis dikeluarkan dan kemudian SI terpecah menjadi dua bagian, yaitu SI merah (komunis) dan SI putih. Selanjutnya organisasi SI mengalami perubahan nama dan menjadi Partai Serikat Islam (PSI) sebagai pendukung Soekarno dan Partai Nasional Indonesia, lalu SI Merah berganti dengan nama Sarekat Rakyat (SR). Perpecahan yang tidak dapat dihindarkan, namun tetap adanya upaya untuk penyatuan dan dilakukan sejak tahun 1985 sampai 2007.⁷⁰

b. Muhammadiyah

Sejarah didirikannya Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang telah dikenal sejak Indonesia sebelum mengalami kemerdekaan. Ditinjau dari segi etimologis, Muhammadiyah merupakan dari bahasa Arab yaitu “Muhammad” nama terakhir dari Nabi

⁷⁰ Ahmad Syallabi, *History Of Muslim Education* (Lemanon: Beirut, 1954), 77.

Muhammad Saw yang terpuji. Selanjutnya diberi tambahan ya' nisbah dimana fungsinya untuk membangsakan, menjelaskan atau pengikut.⁷¹ Jadi arti Muhammadiyah adalah kelompok yang menjadi pengikutnya Nabi Muhammad Saw. Namun apabila ditinjau dari segi terminologis, berdasarkan sumber primer antara lain:

- 1) Muhammadiyah merupakan organisasi yang berbasis Islam dan didirikan oleh seorang yang bernama KH. Ahmad Dahlan bertepatan pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 H atau 18 November 1912 M tempatnya di daerah Yogyakarta.
- 2) Muhammadiyah merupakan suatu gerakan organisasi yang didalamnya bergerak dengan menggunakan sumber ajaran dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahmad Dahlan memiliki nama lain atau disebut Muhammad Darwis.

Dalam silsilah Ahmad Dahlan masih termasuk keturunan yang ke dua belas dari Maulana Malik Ibrahim beliau seorang wali terkemuka dan terbesar di tanah jawa atau wali songo. Disaat sedang berusia lima belas tahun Ahmad Dahlan pergi naik haji dan bertempat tinggal di Mekah selama waktu lima tahun. Pada tahun 1909 beliau bergabung dan ikut organisasi Budi Utomo dengan maksud untuk memberikan jaran tentang agama Islam terhadap anggota-anggota nya, juga memberikan ajaran agama dalam bidang pendidikan sekolah-sekolah pemerintah. Pada saat itu para penjajah Belanda selain menjajah ideologi mereka juga menyebarkan agama lain yaitu agama Kristen. Muhammadiyah mulai kembali beroperasi dan berkembang ketika di adkannya setelah Budi Utomo kongres di Yogyakarta yaitu pada tahun 1919. Dalam pidatonya KH. Ahmad Dahlan telah memberikan pesona dan daya tarik masyarakat. Banyak permintaan agar Muhammadiyah mendirikan cabang di Jawa. Pada tahun 1920 organisasi ini sudah beroperasi di

⁷¹ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 98.

seluruh pulau Jawa dan pada tahun 1921 Muhammadiyah sudah mampu berkembang di seluruh wilayah yang ada di negara Indonesia.

c. Persatuan Islam (Persis)

Sejarah yang ada di daerah Bandung merupakan salah satu kota perjuangan yang berada di wilayah pulau Jawa Barat dan didominasi masyarakatnya suku Sunda. Islam telah berada di Jawa sudah lama dan masyarakat sunda menjadikannya tradisi yang termasuk ke bagian penting dalam suku. Penyebaran Islam yang berada di daerah Jawa Barat dilakukan oleh seorang tokoh yang bernama Sunan Gunung Jati atau sering disebut dengan Syarif Hidayatullah. Beliau menyebarkan Islam ke wilayah Ciebon selanjutnya menyebar ke wilayah-wilayah lainnya yang ada di Jawa Barat.⁷² Penyebaran Islam tersebut didukung oleh Kesultanan Banten. Dengan begitu seperti antara kultur, budaya, dan Islam tidak bisa terlepas satu sama lain. Penyebaran Islam dilakukan dengan praktik akan adanya warisan serta budaya lokal lebih mempermudah masyarakat Jawa untuk memeluk ajaran agama Islam tanpa adanya suatu paksaan. Proses tersebut lebih mengedapnkan akan kebudayaan, sehingga tidak melahirkan konflik. Setelah itu Islam secara turun temurun menjadi suatu hal yang berbentuk warisan dari generasi ke generasi.⁷³

Persis muncul karena adanya suatu diskusi-diskusi yang awalnya dilakukan oleh Zamzan dan Yunus tentang masalah agama. Selanjutnya persis didirikan dan muncul pada tanggal 21 September 1923 atau 1 shafar 1342 H tempatnya di daerah Bandung. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan keagamaan tersebut antara lain shalat jum'at dan kursus-kursus pelajaran tentang agama. Setelah itu orientasi yang ada di persis mulai

⁷² Baharuddin, *Diktomi Pendidikan Islam, Historisitas dab Aplikasi Pada Masyarakat Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 115.

⁷³ Muhammad Hamdani, *Pendidikan Agama Islam; Islam dan Kebudayaan* (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2012), 58.

menyatu dengan keadaan yang modern. Hal tersebutlah yang membuat persis kemudian terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kaum tua atau yang menolak pembaruan dan kelompok kaum muda yang mendukung pembaruan modernisme. Persis menekankan tujuannya yang terletak dalam bidang pendidikan. Dengan begitu harapannya Islam bisa lebih maju melalui jalur pendidikan. Kegiatan pendidikan yang dilakukan bisa berupa ceramah dan pada tahun 1927 telah dibuka juga kelas-kelas untuk murid yang hendak belajar di sekolah-sekolah Belanda sebab pada saat itu pemerintah mengizinkan pendidikan keagamaan bisa didirikan juga pada pendidikan umum. Kegiatan pendidikan memiliki penopangan berupa dakwah yang diterbitkan bisa melalui buku dan majalah. Majalah pertama yang diterbitkan persis yaitu pada tahun 1929 dengan judul *Pembela Islam*. Kemudian diterbitkan sebanyak 2000 eksemplar, bahkan sempat adanya pelarangan dari pemerintah Belanda karena menurutnya bisa dianggap sebagai fitnah akan penulis-penulis Kristem Belanda dan isinya menyerang tentang agama Kristen.

d. Nahdlatul Ulama (NU)

Dimulainya keterbukaan terusan Suez di tahun 1869 maka membuat masyarakat Hindia Belanda banyak yang menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Dengan keadaan tersebut memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan di Indonesia.⁷⁴ Para Ulama berperan dalam pengajaran Islam dengan benar dan tidak mengubah tatanan sistem tradisi yang sudah ada. Selebihnya justru dari tradisi dan kebudayaan tersebutlah membuat ajaran Islam dapat diterima secara luas oleh masyarakat dengan baik, tanpa adanya unsur paksaan. Model dakwah seperti ini terkenal dengan penyebaran ajaran agama Islam yang dilakukan oleh para Walisongo. Nahdlatul Ulama didirikan di daerah Semarang yang mengajarkan ajaran-

⁷⁴ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah 'Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2014), 70.

ajaran islam juga mengajarkan tentang pendidikan sebagai bekal generasi pemuda dalam berdakwah untuk membela tanah air yang disebut dengan Jam'iyah Nashihin.⁷⁵ Pendiri lembaga dibentuk oleh KH. Wahab dan kemudian berkembang secara cepat dan pesat. Persoalan yang sering diperdebatkan dalam musyawarah adalah tentang bid'ah, madzhab, fikhiyah, ijtihad dan lain sebagainya.

Pada kongres ke lima pada tanggal 6 Januari 1926 di adakannya pertemuan antara ulama-ulama yang berada di daerah Surabaya untuk membahas tentang pengiriman delegasi Kongres Al-Islam. Delegasi yang akan dikirim disebut atau dikenal dengan sebutan Komite Hijaz. Pada tanggal 31 Januari 1926 kemudian terdapat beberapa keputusan diantaranya:

- 1) KH. Abdul Wahab dan Ahmad Ghana'im Al Mishri sebagai orang yang menjadi delegasi Kongres Al-Islam ke -5 di Hijaz
- 2) Dibentuknya organisasi untuk para ulama dengan nama Nahdlatul Ulama.
- 3) Dibentuknya sistem kepengurusan Nahdlatul Ulama yang didalamnya terdiri dari pengurus Syuriyah dan pengurus Tanfiziyah.

Setelah diadakannya pertemuan dan menghasilkan kesepakatan di atas, membuahkan hasil yang sesuai dengan rencana dan berjalan dengan baik. KH. Wahab dalam Kongres Al-Islam telah berhasil mewujudkan misi yang ada dalam pertemuan tersebut. Pada saat itu Raja Arab, Ibnu Sa'ud memberikan keputusan dan mengesahkan antara lain:

- a) Diizinkan atas pemberlakuan tentang empat madzhab yaitu Ahlu Sunnah Wa al-Jama'ah.
- b) Diizinkan untuk berziarah ke makam-makam Rasulullah, para sahabat dan yang lainnya.⁷⁶

⁷⁵ Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi* (Solo: Pustaka Arafah, 2004), 98.

⁷⁶ Abu Su'ud, *Islamologi Sejarah, Ajaran, Dan Peranannya Dalam Perdaban Umat Manusia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 132.

Dari beberapa sistem ajaran dan pendidikan Islam yang telah dijabarkan di atas, maka awal mula terbentuknya dan adanya Nahdlatul Ulama yang dijadikan sebagai suatu organisasi Islam yang lahir untuk melestarikan ajaran-ajaran Ahlu Sunnah Wa al-Jama'ah yang ada di negara Indonesia.

e. Mathla'ul Anwar (MA)

Sejarah yang ada di daerah Banten termasuk kedalam sejarah panjang akan dakwah Islam yang ada di negara Indonesia. Kehadiran Islam di daerah Banten dimulai ketika Sunan Gunung Jati sebagai penyebar agama Islam dari Cirebon yaitu pada abad ke-15M, mengutus dan menunjuk puteranya yaitu Sultan Hasanudin sebagai penguasa di Banten.⁷⁷ Pada saat itu masyarakat di Banten memeluk agama Hindu dan karena adanya pengaruh dari Kerajaan Pajajaran maka masyarakat yang ada disana mulai memeluk agama Islam sebagai agama yang dianutnya. Tepatnya pada abad ke-18 M, VOC memperluas wilayah kekuasaannya yang ada di Banten. Mereka telah berhasil memecah belah Kerajaan Banten sehingga kerajaan yang identik sebagai pelindung agama Islam lama kelamaan mengalami kemunduran. Setelah itu VOC tidak lama mengalami kebangkrutan yang dikuasai oleh pemerintahan bernama Daendels. Setelah kekuasaan Sultan Banten tidak ada atau sudah dihapuskan maka terjadilah konflik antar pemimpin di Banten. Sistem birokrat yang bersifat tradisional diganti dengan birokrat yang bersifat modern. Para birokrat modern justru tunduk dan patuh akan Belanda ketika menjalankan ekonomi dan politik sangat memberatkan masyarakat kecil. Belanda memungut pajak-pajak terhadap mereka yang memiliki tanah, salah satunya pajak pribumi. Hal tersebut semakin lama

⁷⁷ Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 140.

semakin membuat beban bagi masyarakat dan memiskinkan masyarakat.⁷⁸

Para kiyai pada saat itu memanfaatkan mimbar dakwahnya dalam pengajian yang ada di pesantren untuk terus bersemangat dan tidak pantang menyerah ketika hendak mengusir perfa penjajah. Kemudian terjadilah musyawarah, dalam musyawarah tersebut menghasilkan keputusan untuk memanggil pulang sorang pemuda yang berasal dari Banten. Pemuda tersebut sedang menimba ilmu di Mekkah al-Mukaramah, namanya adalah Mas Abdurrahman bin Mas Jamal. Setelah pemuda tersebut pulang maka di adakannya pertemuan kembali antara Mas Abdurrahman dengan para kiyai dan terjadi pada tanggal 10 Juli 1916. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana pembentukan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang akan didirikan di Banten. Dia mengusulkan nama lembaga pendidikan itu “Matla’ul Anwar” yang dalam bahasa Arab artinya sumber cahaya. Diketuai oleh Entol Yasin sementara direktur pendidikan dipegang oleh Mas Abdurrahman dan Tubagus Soleh menjabat sebagai penasehat.

f. Al-Irsyad Al-Islamiyah

Al-Irsyad Al-Islamiyah merupakan suatu organisasi berbasis keagamaan yang didirikan oleh para keturunan Arab di Indonesia. Orang Arab sudah ada di Indonesia sejak abad ke-7M. Mereka hadir untuk menyebarkan agama Islam yang dianutnya. Keberadaan orang Arab tidak hanya di pulau Sumatera saja, melainkan juga di pulau Jawa. Sejak adanya penaklukan Malaka oleh negara Portugis di tahun 1511. Orang Arab yang telah menetap dan bertempat tinggal di pultera kebanyakan dari kalangan para suadagar yang kaya raya dan posisi mereka merasa terancam sejak mulai hadirnya negara Portugis di Malaka dan pada saat itu mereka

⁷⁸ Zakki Fuad, “Taksonomi Transenden (Paradikma Baru Tujuan Pendidikan Islam),” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2014): 9.

segera bergeser dan menyebar ke pulau Jawa.⁷⁹ Ketika VOC sedang berada di posisi masa kekuasaan Belanda, orang-orang Arab yang ada di Indonesia menetap di Batavia. Batavia merupakan sebuah kota yang menjadi tempat untuk administrasi VOC dan sebagai tempat pusatnya perdagangan dan perniagaan di benua Asia.

Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825-1830 yang dipelopori oleh kalangan para ulama dan pada saat itu telah terjadi kemerosotan keuangan bangsa Belanda. Hal tersebut terjadi sebab bangsa Belanda terlalu memberatkan masyarakat Indonesia dengan cara memungut tarif pajak. Orang Arab yang ikut membela dan menyebarkan ajaran Islam pun turut serta dan menindak lanjuti akan pembelaan tentang agamanya. Mereka bersatu dan sudah terbiasa hidup berbaur bersama orang-orang pribumi. Bahkan orang Arab tersebut ada yang menikah dengan penduduk pribumi.⁸⁰ Pendidikan Arab dibentuk dan dibuat dengan tujuan agar dapat mendidik anak mereka dengan ajaran agama Islam karena pendidikan yang dibuat oleh Belanda tidak mengajarkan agama Islam. Bahkan mereka pun menyekolahkan anak-anaknya bisa sampai ke negara Turki, bukan langsung ke negara asal mereka. Keluarnya seorang yang bernama Sukati dalam suatu golongan diikuti oleh para muridnya, yang bernama Kapiten Umar Manqush. Setelah itu mereka berkumpul dan membuat organisasi yang diberi nama Al-Irsyad yaitu bertepatan pada tanggal 6 September 1914 di Jakarta.

g. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sejarah adanya Majelis Ulama Indonesia atau disingkat menjadi MUI terdiri dari tiga buah suku kata, Majelis artinya sebuah wadah yang digunakan untuk perkumpulan, Ulama artinya orang yang mempunyai

⁷⁹ Supiana, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012), 70.

⁸⁰ Abdullah Nashih Ulwah, *Pendidikan Anak dalam Islam* (Jakarta: Putaka Amani, 1995), 77.

suatu ilmu pengetahuan dan tahu akan ilmunya.⁸¹ Jadi pengertian dari Majelis Ulama Indonesia adalah wadah dan tempatnya para ulama untuk bermusyawarah dan kehadirannya memberikan manfaat serta mengayomi masyarakat muslim. Juga dijadikan sebagai bentuk ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah. Majelis Ulama Indonesia didirikan yaitu bertepatan pada tanggal 7 Rajab 1395 H, atau 26 Juli 1975 tempatnya di Jakarta. Sejak tahun 1990 MUI telah menyepakati beberapa fatwa yang berkaitan dengan ajaran Islam. Pengelompokan fatwa tersebut dilihat dari segi persoalan, mulai dari shalat, puasa, zakat, makanan, minuman dan bidang lainnya. Menurut ajaran Islam, ulama memiliki pegangan yang kuat dalam perkembangan sejarah Islam bahkan disebut sebagai bentuk jihad karena memperjuangkan agama Islam.⁸² Program kerja dan tugas MUI yang menjadi pokoknya adalah amal ma'ruf nahu munkar.

C. Kesimpulan

Ormas Islam bisa disebut dengan suatu organisasi dari masa ke masa yang disatukan dengan adanya tujuan sebagai bentuk menegakkan agama Islam yang sesuai dengan al-qur'an dan sunnah, sekaligus sebagai bentuk meningkatkan kemajuan para umat Islam baik dari bidang ekonomi, sosial, agama, pendidikan dan lain sebagainya.

Adanya ormas Islam dimulai sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, dimana perkembangan dari ormas tersebut membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia dalam berbagai bidang, baik dibidang pesantren, perguruan tinggi dan pendidikan lainnya. Adapun ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia yaitu Sarekat Islam, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Ulama

⁸¹ Samsul Nizar dan Muhammad Syaifudin, *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 150.

⁸² Suwadi, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Pendidikan Tinggi," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 13, no. 2 (2016): 6.

(NU), Mathla'ul Anwar (MA), Al-Irsyad Al-Islamiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

D. Daftar Pustaka

Hadi, A. Soedomo. *Pendidikan (Suatu Pengantar)*. Surakarta: UNS Press, 2008.

Abd. Rachman, Assegaf. *Politik Pendidikan Nasional; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.

Abdul Qadir Jawas, Yazid bin. *Syarah 'Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2014.

Abu, Su'ud. *Islamologi Sejarah, Ajaran, dan Peranannya Dalam Perdaban Umat Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Arikunto, Suharsimi. *Organisasi dan Administrasi Pendidikan. Teknologi dan Kejuruan*. Jakarta: Ditjen Dikti, 1988.

Azra, Azyumardi. *Ideologi Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Minium Ke III*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.

Baharuddin. *Diktomi Pendidikan Islam, Historisitas dab Aplikasi Pada Masyarakat Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Darajat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Daulay dan Haidar Putra. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.

Fuad, Zakki. "Taksonomi Transenden (Paradikma Baru Tujuan Pendidikan Islam)." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2014).

Hamdani, Muhammad. *Pendidikan Agama Islam; Islam dan Kebudayaan*. Jakarta: CV. Trans Info Media, 2012.

- Hanipudin, Sarno. "Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa." *Journal of Islam and Muslim Society* 1, no. 1 (2019).
- Muhammad Syaifudin dan Samsul Nizar. *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Nashih Ulwah, Abdullah. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Putaka Amani, 1995.
- Nata, Abudin. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Rusli Karim. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Supiana. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012.
- Suwadi. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Pendidikan Tinggi." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 13, no. 2 (2016).
- Suwaid, Muhammad. *Mendidik Anak Bersama Nabi*. Solo: Pustaka Arafah, 2004.
- Syallabi, Ahmad. *History of Muslim Education*. Lemanon: Beirut, 1954.
- Zuhairini. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

BAGIAN VIII

PEMBELAJARAN ISLAM PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA

Ema Oktafiani

A. Pendahuluan

Pendidikan sebagai usaha sadar, usaha yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah, sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempersiapkan kehidupan dimasa depan kelak.

Sejarah Pendidikan Islam telah menunjukkan bahwa sejak perkembangan islam. Pendidikan mendapat prioritas utama masyarakat muslim Indonesia. Pendidikan sendiri pun mendapatkan posisi yang begitu penting bagi berlangsungnya kehidupan, Di samping besarnya pendidikan kepentingan islamisasi mendorong umat islam melaksanakan pengajaran Islam. Sebagai makhluk Tuhan yang menyandang posisi sebagai Khalifah diatas bumi ini, manusia memiliki *empat* macam tanggung jawab, yaitu,

1. Tanggung jawab terhadap Tuhan sebagai wujud rasa syukur dengan jalan beribadah kepada-Nya.
2. Tanggung jawab terhadap diri sendiri yang dimanifestasikan melalui pengembangan potensi fitrah yang ada pada manusia sejak lahir agar dapat survive dalam mengarungi bahtera kehidupan.
3. Tanggung jawab sosial dalam membina dan merekatkan hubungan yang harmonis atau dengan kata lain membina jiwa ukhwah dengan sesama manusia agar tercipta suasana saling melengkapi dan menopang didalam kehidupan ini, sehingga kehidupan manusia semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin makmur.

4. Tanggung jawab terhadap alam semesta yang mesti di manifestasikan dengan cara menjaga kelestarian dan keseimbangan demi kesejahteraan masyarakat.⁸³

Pendidikan pada masa Belanda, Penaklukan bangsa Barat atas dunia Timur dengan jalan perdagangan, kemudian dengan kekuatan militer. Kedatangan bangsa Barat memang telah membawa kemajuan teknologi. Tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil penjajahannya, bukan untuk kemakmuran bangsa yang dijajah. Begitu pula di bidang pendidikan. Mereka memperkenalkan sistem dan metode baru tetapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah yang murah dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat. Apa yang mereka sebut pembaharuan pendidikan itu adalah westernisasi dari Kristenisasi yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Dua motif inilah yang mewarnai kebijaksanaan penjajahan Barat di Indonesia selama ± 3,5 Abad.⁸⁴

Pendidikan di Indonesia selama penjajahan Belanda dapat dikelompokkan kedalam dua priode, yakni priode VOC pada priode Voc ini, pendidikan di Indonesia didasarkan pada prinsip bisnis yakni berdasarkan untung rugi dalam hukum-hukum ekonomi. Di satu pihak adanya pendidikan dengan sistem pesantren dengan orientasi agama saja. Di pihak yang lain adanya pendidikan dengan sistem barat dengan orientasi sekuler yang tidak memperdulikan agama.

B. Pembahasan

Pendidikan Islam Pada Masa Belanda, pada zaman Belanda pendidikan Islam disebut juga dengan bumiputra, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada 3 macam, yaitu:

⁸³ Susmihara, Pendidikan Islam Masa Belanda dan Jepang, (Makassar, Jurnal Rihlah Vol.1 Nomor 1/2013.h. 107

⁸⁴ Zuhairini, dkk *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta ; Bumi Aksara 2011 h.146

1. Sistem Peralihan Hindu Islam.

Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Pada garis besarnya, pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan dua sistem, Yakni: (1) sistem Keraton; dan (2) sistem Pertapa. Sistem pendidikan keraton ini dilaksanakan dengan cara, guru mendatangi murid-muridnya. yang menjadi murid-muridnya adalah anak-anak para bangsawan dan kalangan keraton. Sebaliknya, sistem pertapa, para murid mendatangi guru ke tempat pertapaanya. adapun murid-muridnya tidak lagi terbatas pada golongan bangsawan dan kalangan keraton, tetapi juga termasuk rakyat jelata.

2. Sistem pendidikan surau (langgar)

Sistem Pendidikan Surau, Surau merupakan istilah yang banyak digunakan di Asia Tenggara, seperti Sumatera Selatan, Semenanjung Malaya, Patani (Thailand). Namun yang paling banyak dipergunakan di Minangkabau. Secara bahasa kata surau berarti “tempat” atau “tempat penyembahan”. Menurut pengertian asalnya, surau adalah bangunan kecil yang dibangun untuk menyembah arwah nenek moyang. Beberapa ahli mengatakan bahwa surau berasal dari India yang merupakan tempat yang digunakan sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan Hindu-Budha. Seiring dengan kedatangan Islam di Minangkabau proses pendidikan Islam dimulai oleh Syekh Burhanudin sebagai pembawa Islam dengan menyampaikan pengajarannya melalui lembaga pendidikan surau. di surau ini anak laki-laki umumnya tinggal, sehingga memudahkan Syekh menyampaikan pengajarannya.

lembaga pendidikan surau tidak mengenal birokrasi formal, sebagaimana yang dijumpai pada lembaga pendidikan modern. aturan yang ada didalamnya sangat dipengaruhi oleh hubungan antar individu yang terlibat. Secara kasat mata dapat dilihat di lembaga pendidikan surau tercipta kebebasan, jika murid melanggar suatu aturan yang telah disepakati bersama, murid tidak mendapatkan hukuman tapi sekedar nasihat. Lembaga surau lebih merupakan suatu proses belajar untuk sosialisasi dan interaksi kultural dari hanya sekedar mendapatkan ilmu pengetahuan saja. jadi, nampak jelas fungsi

learning societi disurau sangat menonjol. Sistem pendidikan di surau tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas, murid dibedakan sesuai dengan tingkatan keilmuannya, proses belajarnya tidak kaku sama muridnya (Urang Siak) diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok mana yang ia kehendaki. dalam proses pembelajaran murid tidak memakai meja ataupun papan tulis, yang ada hanya kitab kuning merupakan sumber utamanya dalam pembelajaran. Metode utama dalam proses pembelajaran di surau dengan memakai metode ceramah, membaca dan menghafal. materi pembelajaran yang diberikan Syeikh kepada urang siak dilaksanakan sambil duduk di lantai dalam bentuk setengah lingkaran. Syeikh membacakan materi pembelajaran, sementara murid menyimaknya dengan mencatat beberapa catatan penting disisi kitab yang dibahasnya atau dengan menggunakan buku khusus yang telah disiapkan oleh murid. Sistem seperti ini terkenal dengan istilahhalaqoh.⁸⁵ Silahkan mengcopy paste dan menyebarkan artikel ini selama masih menjaga amanah ilmiah dengan menyertakan sumbernya.

3. Sistem Pendidikan Pesantren

Asal usul Pesantren Secara garis besarnya, dijumpai dua macam pendapat yang mengutamakan tentang pandangannya tentang asal usul pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam. Pertama pesantren adalah institusi pendidikan Islam, yang memang berasal dari tradisi Islam. Mereka berkesimpulan, bahwa pesantren lahir dari pola kehidupan tasawwuf, yang kemudian berkembang diwilayah Islam, seperti Timur Tengah dan Afrika utara yang dikenal dengan sebutan zawiyat. Kedua, pesantren merupakan kelanjutan dari tradisi Hindu-Budha yang sudah mengalami proses islamisasi. mereka melihat adanya hubungan antara perkataan pesantren dengan kata Shastri dari bahasa sanskerta. Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di indonesia. Pesantren sudah menjadi milik umat Islam setelah melalui proses Islamisasi dalam sejarah perkembangannya.

⁸⁵ Ramayuli,*Sejarah Pendidikan Islam* Jakarta, Kalam Mulia, 2011 Hal 253-256

a. Kondisi Pendidikan Pada Masa Penjajahan Belanda

Awal mula bangsa Belanda datang ke Nusantara hanya untuk tujuan berdagang, tetapi karena kekayaan alam Nusantara yang sangat banyak maka tujuan utama tadi berubah untuk menguasai wilayah Nusantara dan menanamkan pengaruh di Nusantara sekaligus dengan mengembangkan pahamnya yang terkenal dengan semboyan 3G, yaitu Glory (kemenangan dan kekuasaan), Gold (emas atau kekayaan bangsa Indonesia), dan Gospel (upaya salibisasi terhadap umat Islam di Indonesia).

Dalam menyebarkan misi-misinya, Belanda mendirikan sekolah-sekolah Kristen. Misalnya di Ambon yang jumlah sekolahnya mencapai 16 sekolah dan 18 sekolah di sekitar pulau-pulau Ambon, di Batavia sekitar 20 sekolah, padahal sebelumnya sudah ada sekitar 30 sekolah. Di samping itu, sekolah-sekolah ini pada perkembangannya dibuka secara luas untuk rakyat umum dengan biaya yang murah. Dengan demikian, melalui sekolah-sekolah inilah Belanda menanamkan pengaruhnya di daerah jajahannya.

Dengan terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat umum untuk memasuki sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Belanda, maka kalangan Islam mendapat tantangan dan saingan berat, terutama karena sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda dilaksanakan dan dikelola secara modern terutama dalam hal kelembagaan, kurikulum, metodologi, sarana, dan lain-lain. Perkembangan sekolah yang demikian jauh dan merakyat menyebabkan tumbuhnya ide-ide di kalangan intelektual Islam untuk memberikan respons dan jawaban terhadap tantangan tersebut dengan tujuan untuk memajukan pendidikan Islam. Mereka mendirikan lembaga pendidikan baik secara perorangan maupun kelompok/organisasi yang dinamakan madrasah atau sekolah.

b. Pendidikan Selama Penjajahan Belanda

Pendidikan selama penjajahan Belanda dapat dipetakan kedalam dua priode besar, yaitu pada masa VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie) dan masa pemerintahan Hindia Belanda pada masa VOC, yang merupakan sebuah kongsi (perusahaan) dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial.

1) Zaman VOC (compeni)

Pada permulaan abad ke-16 hampir se-abad sebelum kedatangan belanda, pedagang portugis menetap di bagian timur Indonesia tempat rempah-rempah itu dihasilkan.

2) Zaman Pemerintahan Belanda setelah VOC

Setelah VOC dibubarkan, para Gubernur/komisaris jenderal harus melalui system pendidikan Dasarnya, karena pendidikan zaman VOC berakhir dengan kegagalan total. Pemerintah baru yang diresapi oleh ide-ide liberal aliran aufklarung atau Enligtenment menaruh kepercayaan akan pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemajuan ekonomi dan social.

Tahun 1826 lapangan pendidikan dan pengajaran terganggu oleh adanya usaha-usaha penghematan. Sekolah – sekolah Indonesia yang memeluk agama Nasrani. Alasannya adalah karena adanya kesulitan financial yang berat yang dihadapi oleh belanda sebagai akibat perang Diponegoro (1825-1830) yang mahal dan menelan banyak korban serta peperangan antar Belanda dan Belgia (1830-1839).

C. Kesimpulan

Pendidikan di Indonesia selama penjajahan belanda dapat dikelompokkan kedalam dua priode, yakni priode VOC pada priode Voc ini , pendidikan di Indonesia didasarkan pada prinsip bisnis yakni berdasarkan untung rugi dalam hukum-hukum ekonomi. Di satu pihak adanya pendidikan dengan sistem pesantren dengan orientasi agama saja. Dipihak yang lain adanya pendidikan dengan sistem barat dengan orientasi sekuler yang tidak memperdulikan agama. Sistem Peralihan Hindu Islam. 2) Sistem pendidikan surau/langgar. 3) Sistem pendidikan pesantren. Selama penjajahan belanda dapat di simpulkan bahwa pendidikan pada masa kolonial belanda dapat di kategorikan menjadi 2 priode yaitu: Pendidikan selama penjajahan belanda dapat dipetakan kedalam dua priode besar, yaitu pada masa VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie) dan masa pemerintahan Hindia Belanda pada masa VOC, yang merupakan sebuah kongsi (perusahaan) dagang, kondisi pendidikan di

Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial.

Sistem persekolahan pada Zaman pemerintahan Hindia Belanda, secara umum sistem pendidikan khususnya sistem persekolahan didasarkan kepada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan (kelas) sosial yang ada dan menurut keturunan atau lapisan/kelas sosial yang ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu: 1) pendidikan rendah.2) pendidikan lanjutan.3) pendidikan kejuruan. 4) pendidikan tinggi.

D. Daftar Pustaka

Susmihara, Pendidikan Islam Masa Belanda dan Jepang,
(Makassar, Jurnal Rihlah Vol.1 Nomor 1/2013

Zuhairini, dkk *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta; Bumi Aksara
2011.

Ramayuli, *Sejarah Pendidikan Islam* Jakarta, Kalam Mulia,
2011.

BAGIAN IX

PEMBELAJARAN ISLAM PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG

M. Yusril Hardian

A. Pembahasan

1. Pembelajaran Islam Pada Masa Penjajahan Jepang

Pada masa kekuasaan Jepang, kurang dan lebihnya menjajah selama 3,5 tahun, sebenarnya tidak terlalu jauh selang waktu dengan penjajahan pada era Belanda yang menjajah. Jepang memasuki Indonesia pada saat Perang Dunia Ke II, tepatnya pada bulan Maret 1942 rombongan tentara Jepang berbondong-bondong menyerbu Indonesia, dan akibat kedatangan Jepang membuat Belanda menyerah dan sebagian tokoh-tokoh bahkan tentara dari Belanda di tawan oleh Jepang, dan sisanya mengamankan diri ke Australia. Semboyan Asia Timur Raya untuk Asia dan Asia Baru, sebenarnya Jepang ingin menguasai wilayah Asia Timur di bawah kekaisaran Hirohito. Pada mulanya Jepang bersikap simpatik dengan memberikan janji-janji manis berupa kemerdekaan. Slogan dan propaganda 3A yang isinya ialah Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia, seakan-akan memberikan harapan yang baru bagi Bangsa Indonesia, karena dianggap sama-sama Bangsa Asia. Ternyata dibalik itu Jepang memiliki maksud dan tujuan untuk menjajah dan menguasai Indonesia dengan kebijakan yang dinamakan *Niponisasi* artinya (menjepangkan) bangsa Indonesia, dengan kewajiban tradisi dari Jepang dalam sistem Pendidikan di Indonesia, contoh mengajarkan bahasa Jepang dan dijadikan sebagai bahasa pengantar disamping bahasa Indonesia. Memperkenalkan tradisi *Sekerei* yakni penghormatan kepada kaisar Jepang di Tokyo yang dianggap keturunan dari Dewa Matahari, sebelum jam belajar dimulai, dan senam *Taiso* bagi para pelajar. Hal tersebut membuat sebagian umat Islam melawan dan menimbulkan pemberontakan dan perlawanan

seperti perlawanan yang dipimpin oleh KH Zainal Mustofa tepatnya di Singaparna daerah Tasikmalaya.

Kebijakan pemerintah Jepang pada awalnya menaarkan simpati dari tokoh-tokoh nasionalis dan bahkan tokoh-tokoh Islam di Indonesia dengan beberapa kebijakan yang ditempuh, sebagai berikut:

1. Kantor urusan Agama yang zaman Belanda disebut *Kantoor voor Islamistidche Zaken* yang dipimpin oleh orang-orang Orientalis Belanda semacam Dr. Snouck Hurgronje, dirubah oleh Jepang menjadi nama *Shumubu* (Kantor urusan Agama Islam dipusaat) yang dipimpin oleh ulama Islam yakni KH. Hasyim Asy'ari dari Jombang dan didaerah-daerah dibentuk *Shumuka* (Kantor urusan Agama daerah).
2. Pondok pesantren yang besar-besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar dari Jepang.
3. Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama.
4. Mengizinkan pembentukan barisan *Hizbullah* untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda islam. Barisan ini di bawah pimpinan KH. Zainul Arifin. Memang Jepang pada saat itu sedang berperang melawan sekutu, sehingga membentuk tentara yang dibutuhkan untuk membantu Jepang dalam peperangan, sehingga mereka merekrut pemuda untuk dilatih militer seperti PETA (Pembela Tanah Air), *Heiho*, *Seinendan*, *Keibodan*, dan sebagainya.
5. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya STI (Sekolah Tinggi Islam) di Jakarta yang dipimpin KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta.
6. Para Ulama bekerjasama dengan pemimpin nasionalis diizinkan membentuk Barisan Pembela Tanah Air (Peta), yang menjadi inti dari TNI sekarang.
7. Umat Islam diizinkan meneruskan Organisasi Persatuan yang disebut MIAI (*Majelis Islam A'la Indonesia*) yang

bersifat kemasyarakatan.⁸⁶ sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU.⁸⁷

Kebijakan pemerintahan Jepang memang simpatik, tetapi pada akhirnya ketahuan juga bahwa semua hanyalah kedok untuk kepentingan perang Asia Pasifik melawan Amerika dan sekutu. Banyak rakyat Indonesia yang menderita akibat *Romusya* (kerja paksa) menyebabkan korban jiwa yang tidak terhitung jumlahnya, karna hasil bumi di angkut dan dirampas oleh Jepang untuk persediaan perang sehingga rakyat Indonesia kelaparan dan kekurangan sandang dan pangan. Hal ini membuat para ulama dan pemimpin Indonesia mulai tidak simpatik lagi dan mulai melakukan perlawanan, sehingga muncul beberapa pemberontakan contoh yang terjadi di Blitar muncul perlawanan PETA di bawah pimpinan Supriyadi. Dari kalangan Kyai dan Ulama juga banyak yang melawan, sehingga mengakibatkan Jepang melakukan penangkapan dan memenjarakan Kyai.

Dibidang pendidikan pada zaman Jepang, secara umum terbengkalai, karena murid-murid di sekolah setiap hari hanya disuruh grak jalan, senam, baris berbaris bekerja bakti, bernyanyi dan sebagainya. Dimasa pendudukan Jepang banyak terjadi perubahan dalam sistem pendidikan. Karena dihapusnya sistem penggolongan, baik menurut bangsa maupun menurut status sosial.⁸⁸ Beberapa perubahan mendasar tersebut dapat adalah sebagai berikut:

1. Jenjang Sekolah Dasar atau Sekolah Rakyat (Kekumin Gakko), terbuka bagi semua golongan penduduk tanpa diskriminasi status sosial. Lama pendidikannya

⁸⁶ Zainal Abidin, *Sejarah Pendidikan Islam (Dinamika Sosial Intelektual dan Transformasi Kelembagaan)*, (Metro: STAIN METRO & CV. DVIFA, 2015), Hal. 189-190

⁸⁷ Abdul Syakur, Muhammad Yusuf, Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan, *Jurnal Staid Makassar*, Hal. 7

⁸⁸ Miftahur Rahman, "KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM MASA PENJAJAHAN JEPANG", (*Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*) Vol. 02 Nomor 01 Tahun 2018, Hal. 27

diseragamkan menjadi enam tahun. Sekolah ini ada di semua desa dan kota atau tempat yang dulunya terdapat Sekolah Dasar, Sekolah Kelas Satu, Kelas Dua atau HIS dan ELS.

2. Jenjang Sekolah Lanjutan Pertama (Shoto Chu Gakko) atau sekarang setingkat SMP, terbuka bagi semua golongan penduduk yang memiliki Ijazah SR. Sedangkan Sekolah Kejuruan yang ada adalah Sekolah Pertukangan (Kogyo Gakko), Sekolah Pertanian (Nogyo Gakko) dan Sekolah Pelayaran. Lama pendidikannya 3 tahun.
3. Jenjang sekolah lanjutan umum tingkat atas (Kota Chu Gakko). Lama pendidikannya 3 tahun.
4. Jenjang Sekolah Tinggi. Pada tingkat ini hampir seluruh sekolah tinggi ditutup. Kecuali yang masih ada ialah Sekolah Kedokteran Tinggi (Ika Dai Gakko) di Jakarta, Sekolah Obat (Yaku Gakko) di Jakarta, Sekolah Kedokteran Gigi (Sika Gakko) di Surabaya, Sekolah Teknik Tinggi (Kagyō Dai Dakko) yang dibuka tahun 1944 di Bandung, Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor, Akademi pemerintahan (Kenkoku Gakko In) yang dibuka pada awal tahun 1945 di Jakarta sebagai ganti MOSVIA pada masa Belanda.⁸⁹

Adapun tujuan pendidikan masa penjajahan Jepang secara garis besar meliputi 2 hal pokok, yaitu untuk mempertebal akan keyakinan Islam itu sendiri dan mempertahankan hak-hak manusia dengan jalan politik atau perlawanan perang.

Tujuan pendidikan yang dicantumkan pada pendidikan Islam ketika zaman penjajahan Jepang antara lain:

1. Asas tujuan Muhammadiyah: mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya dan asas perjuangannya dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar.
2. I.N.S (Indonesische Nederlanshe School) dipelopori oleh Muhammad Syafi'I pada tahun 1899-1969, yang bertujuan mendidik anak agar berpikir rasional, bekerja

⁸⁹ Abdurrahman Assegaf, *Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007), Hal. 122-123

dengan sungguh-sungguh, dan membentuk manusia yang berwatak dan menanamkan persatuan.

3. Tujuan Nahdlatul Ulama, sebelum menjadi partai politik, memegang teguh empat mazhab, di samping mengerjakan apa-apa yang menjadi kemaslahatan umat Islam itu sendiri.⁹⁰

Sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang:

1. Pada masa awal pendudukan Jepang, madrasah berkembang dengan cepat terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatra yang terkenal dengan madrasahnyanya, yang diilhami oleh majlis ulama tinggi.
2. Pendidikan agama di sekolah Sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan pada guru agama Islam untuk mengisinya dengan ajaran agama, dan di dalam pendidikan agama tersebut juga di masukan ajaran tentang jihad melawan penjajah
3. Perguruan tinggi Islam Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, KH. Muzakkar, dan Bung Hatta. Walaupun Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan dalam mengembangkan pendidikan namun para ulama tidak akan tunduk kepada pemerintahan Jepang, apabila mereka mengganggu akidah umat hal ini kita dapat saksikan bagaimana masa Jepang ini perjuangan KH. Hasyim Asy'ari beserta kalangan santri menentang kebijakan kufur Jepang yang memerintahkan untuk

⁹⁰ Muh Amin, PENDIDIKAN ISLAM MASA PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG (*JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*) Volume 10 , No. 2, Tahun 2019, Hal. 8

melakukan seikere (menghormati kaisar jepang yang dianggap keturunan dewa matahari).⁹¹

Yang masih aman adalah madrasah yang berada di lingkungan pondok pesantren yang bebas pengawasan langsung dari Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan dengan agak wajar.⁹² Setelah Amerika dan sekutunya menjatuhkan BOM ATOM tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, dikota Hiroshima dan Nagasaki, membuat jepang menyerah pertamakalinya pada sekutu dan hendak mengembalikan pemerintahan Indonesia ke Belanda.

Para pemimpin Indonesia kemudian berhasil membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan pada tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Bung Karno yang didampingi oleh Bung Hatta. Setelah merdeka atau pada awal kemerdekaan RI pendidikan nasional mulai berbenah dengan membentuk kementerian pendidikan dan pengajaran dan kementerian Agama. Kedua departemen tersebut melakukan pembaruan pendidikan dengan serangkaian peraturan dan kebijakan pendidikan lainnya. Di bidang pendidikan Agama, pada bulan dikeluarkan peraturan bersama dua menteri yaitu menteri Agama dan menteri pendidikan dan pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat) sampai kelas VI. Karena keadaan Indonesia masih dalam suasana perang kemerdekaan sehingga SKB 2 menteri belum dapat berjalan dengan semestinya, daerah-daerah diluarjawa masih banyak memberikan pendidikan agama mulai dari kelas I. Tahun 1947 dibentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam yang di bawah kepemimpinan Ki Hajar Dewantara dari departemen P&K dan Prof. Drs Abdullah Sigit dari departemen agama yang bertugas mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum. Pada saat pengakuan kedaulatan RI tahun 1950, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia

⁹¹ *Ibid*, Hal. 9

⁹² Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hal. 152

makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang di pimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr Hadi dari Departemen P&K yang mengasailkan SKB 2 Menteri yang ke dua yang ditetapkan bulan Januari 1950 berisi:

1. Pendidikan Agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat.
2. Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (contoh Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain), maka pendidikan Agama mulai diberikan dari kelas 1 SR/SD dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
3. Di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas di berikan pendidikan agama sebanyak 2 jam dalam waktu satu pekan.
4. Pendidikan Agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua.
5. Pengangkatan guru Agama, biaya pendidikan Agama dan materi Pendidikan Agama di tanggung oleh Departemen Agama.⁹³

Dibidang kurikulum pendidikan Islam, pernah dibentuk panitia penyempurnaan kurikulum yang dipimpin oleh KH. Imam Zarkasyi dari Pondok Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh menteri Agama RI pada tahun 1952 kedudukan pendidikan Agama menjadi agak kuat dengan lahirnya ketetapan MPRS Tahun 1960 memberikan ketetapan dalam pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum mulai sekolah dasar sampai Universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak ikut serta dalam pendidikan Agama jika wali murid/murid dewasa menyatakan atas ketidak beratannya.⁹⁴

⁹³ Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 154

⁹⁴ Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 155

B. Daftar Pustaka

Abdul Syakur, Muhammad Yusuf, Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan, *Jurnal Staid Makassar*.

Abdurrahman Assegaf, *Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007)

Miftahur Rahman, “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang”, (*Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*) Vol. 02 Nomor 01 Tahun 2018.

Muh Amin, Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda Dan Jepang (*Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*) Volume 10 , No. 2, Tahun 2019.

Zainal Abidin, *Sejarah Pendidikan Islam (Dinamika Sosial Intelektual dan Transformasi Kelembagaan)*, (Metro: Stain Metro & Cv. Dvifa, 2015).

Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

BAGIAN X

PEMBELAJARAN ISLAM PADA MASA KEMERDEKAAN RI (ORDE LAMA)

Dewi Istiana

A. Pendahuluan

Islam sebagai salah satu agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia merupakan salah satu komponen yang turut membentuk dan mewarnai corak kehidupan masyarakat Indonesia. Kesuksesan Islam dalam menembus dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadikan dirinya sebagai agama mayoritas merupakan prestasi luar biasa. Hal ini terlihat dari letak geografis, dimana jarak negara Indonesia dengan negara Jazirah Arab sebagai negara asal Islam cukup jauh. Apalagi bila dilihat sejak dimulainya proses penyebaran Islam itu sendiri, di Indonesia belum terdapat suatu metode atau organisasi dakwah yang dianggap cukup mapan dan efektif untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat.

Pendidikan Islam merupakan pewarisan dan perkembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman pada ajaran dasar agama Islam yakni al-Qur'an dan hadits. Sebagaimana dijelaskan bahwa “dasar pendidikan Islam sudah jelas dan tegas, yaitu firman Tuhan dan sunah Rasulullah SAW., kalau pendidikan diibaratkan bangunan, maka Al-Qur'an dan haditslah yang menjadi fundamennya”⁹⁵.

Menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar pendidikan Islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan pada keyakinan semata. Namun justru karena kebenaran yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dapat diterima oleh nalar manusia dan dapat di buktikan dalam sejarah atau pengalaman kemanusiaan. Sebagai pedoman pertama dalam Islam Al-Qur'an tidak ada sedikitpun keraguan padanya. Ia tetap

⁹⁵ Ahmad. D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1989), 41.

terpelihara kesucian dan kebenarannya, baik dalam pembinaan aspek spiritual maupun aspek sosial budaya dan pendidikan. Demikian pula dengan kebenaran hadits sebagai dasar kedua bagi pendidikan Islam. Secara umum hadits difahami sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW., baik berupa perkataan, perbuatan serta ketetapan. Dan kepribadian Rasul sebagai *uswatun hasanah* yaitu contoh tauladan yang baik karena perilakunya senantiasa terpelihara dan dikontrol oleh Allah SWT.⁹⁶

Kemudian pedoman tadi dikembangkan dalam pemahaman para ulama dalam bentuk *qiyas syar'i*, *ijma'* yang diakui, *ijtihad* dan *tafsir* yang benar dalam bentuk hasil pemikiran yang menyeluruh dan terpadu tentang jagad raya manusia, masyarakat dan bangsa, pengetahuan kemanusiaan dan akhlak dengan merujuk kepada kedua sumber asal (*al-Qur'an* dan *Hadits*) sebagai sumber pokok.⁹⁷ Sehingga diharapkan dari hasil pendidikan tersebut terbentuknya manusia Islam yang berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai agama Islam sebagai tujuan akhir dari pendidikan Islam.

Berbicara tentang pendidikan Islam di Indonesia sangat erat hubungannya dengan sejarah kedatangan Islam itu sendiri ke Indonesia. Sebagaimana pendapat Yunus yang menjelaskan bahwa sejarah pendidikan Islam di Indonesia sama tuanya dengan masuknya agama tersebut ke Indonesia.⁹⁸ Dalam perjalanan yang panjang itupun sejarah pendidikan Islam selalu mengalami pasang surut dalam babakan yang berbeda-beda dengan mengikuti situasi dan kondisi perjalanan tersebut.

Pendidikan Islam dimulai sejak kedatangan Islam ke Indonesia, namun secara pasti tidak diketahui bagaimana cara pendidikan pada masa permulaan Islam di Indonesia, seperti tentang buku yang dipakai, pengelola dan sistem pendidikan. Yang pasti pendidikan Islam pada waktu itu telah ada dalam bentuk sangat sederhana.

⁹⁶ Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*. (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 35.

⁹⁷ Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaebani, *Filsafat Pendidikan Islam*. (terj.) Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 427.

⁹⁸ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985), 6.

Pendidikan Islam itu bahkan menjadi tolak ukur bagaimana Islam dengan umatnya telah memainkan perannya dalam berbagai aspek. Oleh karena itu dalam rangka menelusuri sejarah pendidikan Islam di Indonesia dengan periodisasinya tidak mungkin dilepaskan dari fase-fase yang dilaluinya. Fase yang dibahas dalam pembahasan ini adalah fase pada masa setelah kemerdekaan Indonesia atau masa orde lama (1945-1965).

B. Kondisi Setelah Kemerdekaan RI

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan menyatakan diri sebagai negara yang berdasar Pancasila dengan demokrasi liberal pada waktu itu. Namun demokrasi yang diterapkan pada akhirnya hanya menimbulkan permasalahan konflik antar etnis, agama dan ideologi bagi rakyat Indonesia. Partisipasi politik hanya melahirkan harapan-harapan masyarakat yang tidak realistis, yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam.

Setelah kemerdekaan keadaan bangsa Indonesia berubah secara radikal. Situasi dan kondisi bagai sebuah ganjaran bagi para pahlawan nasional yang umumnya terdiri dari para ulama atau yang dijiwai oleh Islam. Kemerdekaan membuahkan manfaat yang sangat besar bagi kaum muslimin terutama di bidang pendidikan.

Berpijak pada dasar negara sila pertama yakni Ketuhanan yang Maha Esa yang berarti bahwa kehidupan beragama di Indonesia secara konstitusional dijamin keberadaannya sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 29. Sebagai jaminan konstitusional ini membawa suatu konsekuensi bahwa pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan tiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya, melainkan juga sekaligus menjamin, melindungi, membina, mengembangkan serta memberi bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang, bergairah dan semarak, serasi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meski baru memproklamkan kemerdekaan dan tengah menghadapi revolusi fisik, pemerintah Indonesia sudah berbenah diri terutama memperhatikan masalah pendidikan yang dianggap cukup vital dan menentukan. Untuk itu dibentuk Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) dengan menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai pemegang jabatan tersebut.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa perubahan-perubahan setelah kemerdekaan meliputi berbagai aspek, tidak hanya dalam bidang pemerintah tetapi juga dalam pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia.

Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita tersebut, maka bidang pendidikan mengalami perubahan diantaranya dengan menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 31. Selain itu juga menetapkan landasan idiilnya yang pada masa orde lama dengan berbagai peristiwa dapat dijelaskan bahwa landasan idiil pendidikan sebagai berikut:

- a) Tahun 1945-1949 ialah UUD 1945 dan Pancasila
- b) Tahun 1949 dengan terbentuknya RIS, di negara bagian timur dianut sistem pendidikan yang diwarisi dari zaman Belanda.
- c) Tanggal 17 Agustus 1950 kembali pada NKRI, landasan idiil pendidikan UUDS RI.
- d) Pada tahun 1951 Presiden (Ir. Soekarno) mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945 dan menetapkan Manifesto Politik RI menjadi Haluan Negara. Di bidang pendidikan ditetapkan Sapta usaha Tama dan Panca Wardhana.
- e) Pada tahun 1965 setelah G 30 S/PKI kembali melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Sementara itu juga diberikan batasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, hal ini disebabkan perbedaan agama, sosial, ekonomi dan golongan yang di masyarakat tidak dikenal lagi. Dengan demikian setiap anak Indonesia dapat memilih

kemana akan belajar, sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.⁹⁹

C. Keberadaan Pendidikan Islam

Pada mulanya Islam digunakan dalam rangka mendukung partai politik Islam seperti NU, Muhammadiyah, Masyumi dan lain sebagainya. Namun pada waktu yang sama politisasi mengarah pada perpecahan antara partai Islam dan organisasi politik lainnya. Kuatnya perpolitikan intern partai dan pecahnya pemberontakan daerah yang disebabkan sentimen keislaman mengakibatkan hancurnya demokrasi.¹⁰⁰

Untuk mendamaikan diantara partai politik yang bertikai, Presiden Indonesia (Ir. Soekarno) memberlakukan demokrasi terpimpin dengan maksud untuk menyatukan bangsa Indonesia yang dikenal dengan *nasakom* (nasional, agama dan komunisme).¹⁰¹

Sementara penyelenggaraan pendidikan agama pada awal kemerdekaan telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah baik pada lembaga pendidikan swasta maupun negeri. Hal ini dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga-lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) pada tanggal 27 Desember 1945 yang menyebutkan bahwa; Madrasah dan pesantren yang pada dasarnya merupakan satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dan menguat dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaknya pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah.¹⁰²

Hal ini didasarkan atas kenyataan terpuruknya umat Islam pada masa penjajahan Belanda yang terpecah dalam segi intelektualitasnya. Penyebabnya antara lain:

⁹⁹ Zahara Idris, *Dasar-Dasar Kependidikan*. (Bandung: Angkasa, 1981), 30.

¹⁰⁰ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. (New York: Itacha, 1962), 2.

¹⁰¹ B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), 106.

¹⁰² HA. Timur Djaelani, *Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Hidakarya Agung, 1980), 135.

- a) Sikap dan kebijaksanaan pemerintah kolonial yang amat diskriminatif terhadap kaum muslimin.
- b) Politik *nonkooperatif* para ulama terhadap Belanda yang menfatwakan bahwa ikut serta dalam budaya Belanda, termasuk pendidikan modernnya, adalah suatu bentuk penyelewengan agama.

Selain itu pemerintah juga tetap membina pendidikan agama secara formal melalui Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Atas kerjasama kedua departemen dikeluarkan beberapa peraturan-peraturan bersama untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta.

Khusus untuk mengelola pendidikan agama yang diberikan pada sekolah-sekolah umum tersebut, maka pada bulan Desember 1946 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri PP dan K dengan Menteri Agama, yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta) yang berada dibawah naungan Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya dari SKB tersebut secara khusus diperkuat lagi kedalam UU Nomor 4 tahun 1950 pada BAB XII pasal 20 sebagai berikut:

- a) Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
- b) Cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri di atur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.¹⁰³

Sementara itu pada Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama nomor 1432/Kab. Tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan), Nomor K 1/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama), diatur tentang peraturan pendidikan agama di sekolah-sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam UU, yaitu:

¹⁰³ HA. Ridwan Saidi, *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*. (Jakarta: CV Rajawali, 1984), 6.

Pasal 1 : Ditiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan kejuruan) diberi pendidikan agama.

Pasal 2 : Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4; banyaknya 2 jam dalam satu minggu.

Di lingkungan yang istimewa, Pendidikan Agama dapat dimulai pada kelas 1, dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan. Tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu, dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah di lain-lain lingkungan.

Pasal 3 : Di sekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan tingkatan atas, baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah kejuruan, diberi pendidikan agama 2 jam dalam tiap-tiap minggu.

Pasal 4 : Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing.

Pendidikan agama baru diberikan pada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 orang, yang menganut suatu macam agama.

Murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu boleh meninggalkan kelas-nya selama pelajaran itu.

Di bidang kurikulum pendidikan agama diusahakan penyempurnaan-penyempurnaan, dalam hal ini telah dibentuk kepanitiaan yang dipimpin oleh KH Imam Zarkasyi dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952.

Begitulah keadaan pendidikan Islam dengan segala kebijaksanaan pemerintah pada zaman orde lama. Pada akhir orde lama tahun 1965 lahir semacam kesadaran baru bagi umat Islam, dimana timbulnya minat yang dalam terhadap masalah-masalah pendidikan yang dimaksudkan untuk memperkuat umat Islam, sehingga sejumlah organisasi Islam dapat dimantapkan. Dalam hubungan ini Kementerian Agama telah mencanangkan rencana-rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam sebagai berikut:

1. Pesantren Klasik, semacam sekolah swasta keagamaan yang menyediakan asrama, yang sejauh mungkin memberikan pendidikan yang bersifat pribadi, sebelumnya terbatas pada pengajaran keagamaan serta pelaksanaan ibadah masyarakat yang hidup serta bekerja sama mengerjakan tanah milik pesantren agar dapat memenuhi kebutuhan sendiri.
2. Madrasah Diniyah, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid sekolah negeri yang berusia 7 sampai 20 tahun. Pelajaran berlangsung di dalam kelas, kira-kira 10 jam seminggu, di waktu sore, pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah (4 tahun pada Sekolah Dasar dan 3 sampai 6 tahun pada Sekolah Menengah). Setelah menyelesaikan pendidikan menengah negeri, murid-murid ini akan dapat diterima pada pendidikan agama tingkat akademi.
3. Madrasah-madrasah swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara modern, yang bersamaan dengan pengajaran agama juga diberikan pelajaran umum. Biasanya tujuannya adalah menyediakan antara 60%-65% dari jadwal waktu untuk mata pelajaran umum dan antara 35%-40% untuk mata pelajaran agama.
4. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), yaitu Sekolah Dasar enam tahun, dimana perbandingan umum kira-kira 1: 2. Pendidikan selanjutnya dapat diikuti pada MTsN (sekolah tambahan tahun ketujuh) murid dapat mengikuti pendidikan ketrampilan, misalnya pendidikan guru agama untuk Sekolah Dasar Negeri, setelahnya dapat diikuti latihan lanjutan dua tahun untuk menyelesaikan kursus guru agama untuk Sekolah Menengah.
5. Suatu percobaan baru telah ditambahkan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 tahun, dengan menambahkan kursus selama dua tahun yang memberikan latihan ketrampilan sederhana. MIN 8 tahun ini merupakan pendidikan lengkap bagi para murid yang biasanya akan kembali ke kampungnya masing-masing.
6. Pendidikan Teologi tertinggi, pada tingkat Universitas diberikan resmi sejak tahun 1960 pada IAIN. IAIN ini

dimulai dengan dua bagian atau dua fakultas di Yogyakarta dan dua fakultas di Jakarta.¹⁰⁴

D. Kesimpulan

Pendidikan Islam di Indonesia selalu mendapat sorotan atau perhatian, karena bangsa ini memiliki penduduk Islam terbesar di dunia. Pendidikan Islam di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan telah menjadi perhatian khusus oleh pemerintah melalui Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama. Pelaksanaan dari pendidikan pada lembaga formal diatur oleh peraturan-peraturan yang dikeluarkan kedua departemen tersebut.

E. Daftar Pustaka

Boland, BJ. *Pergumulan Islam di Indonesia*. Grafiti Pers, Jakarta, 1985.

Djaelani, HA. Timur. *Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Indonesia*. Hidakarya Agung, Jakarta, 1980.

Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Itacha, New York, 1962.

Idris, Zahara. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Angkasa, Bandung, 1981.

Marimba, Ahmad. D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, 1989.

Nizar, Samsul. *Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, Ciputat Press, Jakarta, 2002.

Saidi, HA. Ridwan. *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*. CV Rajawali, Jakarta, 1984.

Al-Syaebani, Omar Muhammad Al-Toumy. *Filsafat Pendidikan Islam*. (terj.) Hasan Langgulung, Bulan Bintang, Jakarta, 1979.

Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Hidakarya Agung, Jakarta, 1985.

¹⁰⁴ BJ. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), 117

BAGIAN XI

PEMBELAJARAN ISLAM PADA MASA ORDE BARU

Faris Fathurrohman

A. Pendahuluan

Di era orde baru dunia, pendidikan yang berkembang di Indonesia terbagi dalam dualistik sistem pendidikan antara pendidikan umum (Nasional) dengan pendidikan agama (Islam). Sistem tersebut pada awalnya lahir ketika penjajahan Hindia Belanda, seiring berjalannya waktu hal tersebut mejadi suatu refleksi tersendiri dari perseturuan dua politik, yakni antara Nasionalisme dengan Islam yang memang sedari awal kemerdekaan tidak dapat dihindarkan lagi perbenturannya, terutama dalam hal penentuan dasar negara Indonesia dan bentuk negara Indonesia sendiri.¹⁰⁵

Kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintah kolonial, awal pasca kemerdekaan hingga tampilnya Orde Baru terkesan “ menganak tirikan “ mengisolasi bahkan hampir menghapus sistem Pendidikan Islam hanya dengan alasan Indonesia bukanlah Negara Islam. Namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidik Islam akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu diredam untuk sebuah tujuan ideal yang tertuang dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yaitu: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak

¹⁰⁵ Yumna, *Perkembangan Pendidikan Islam Masa Orde Baru Pada Sekolah Aliyah Dan Perguruan Tinggi Islam*, (Jurnal: Mau'izhah Vol. VIII No. 2 Jul-Des 2018), hlm 161.

mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.¹⁰⁶

B. Perkembangan Pendidikan Islam Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini dapat dilihat adanya bantuan pemerintah baik bantuan dalam bentuk material maupun non material, sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BKNP), 27 Desember 1947 menyebutkan bahwa: “Madrasah dan Pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata tuntutan dan bantuan material dari pemerintah.”¹⁰⁷ Pembinaan pendidikan agama secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan & Kebudayaan. Maka dikeluarkanlah suatu kebijakan mengenai pengelolaan dan pembinaan pendidikan Islam yang dikenal dengan SKB 2 Menteri yakni Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa “Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat), Pembinaan pendidikan Agama di sekolah Agama ditangani oleh Departemen Agama, sedangkan Pendidikan Agama Islam untuk sekolah umum diatur secara resmi oleh pemerintah.”¹⁰⁸ Perlu diketahui bahwa kondisi keamanan bangsa Indonesia pada waktu itu belum tenang, sehingga SKB 2 Menteri tersebut belum berjalan sebagai mana mestinya.

C. Kebijakan Pemerintah Orde Baru di Bidang Pendidikan Islam

Ketika memasuki era orde baru tahun 1966 MPRS mengeluarkan

¹⁰⁶ Republik Indonesia, UU nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, (cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 8.

¹⁰⁷ H.A. Timur Jailani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*, (Jakarta: CV. Darmaga, 1990), h. 16.

¹⁰⁸ Zuairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 195

ketetapan nomor XXVII/MPRS/1966 Bab I pasal I, mengatakan bahwa “ pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas negeri”.¹⁰⁹Demikian pula halnya dengan TAP MPR Nomor IV /MPR/1978yang memuat GBHN mempertegas kembali pelaksanaan pendidikan agama mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, bahkan lebih rinci lagi dijelaskan pada keputusan pemerintah nomor 08/c/u/1975bahwa, pendidikan agama di sekolah dasar sampai sekolah menengah merupakan salah satu bidang studi.Bidang studi pendidikan agama diajarkan dalam tiap minggu 2 jam untuk kelas I,II, III SD 3 jam untuk kelas IV,V,VI serta 2 jam untuk SMP dan SMA, bahkan menjadi penentu kenaikan kelas jika nilai PAI tidak mencapai sekurang-kurangnya enam”.

D. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan Islam

1. Faktor Agama

Dalam perjalanan sejarah, kegiatan pendidikan ditentukan oleh visi, misi dan sifat yang melatar belaknginya. Dalam berbagai literatur belum ditemukan rumusan tentang visi, misi pendidikan Islam secara eksplisit, namun Abudin Nata menjelaskan bahwa Visi, misi pendidikan Islam melekat pada visi, misi ajaran Islam itu sendiri yang terkait dengan visi kerasulan para Nabi, mulai dari visi kerasulan Nabi Adam As, hingga kerasulan Nabi Muhammad Saw yaitu, membangun sebuah kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah Swt serta membawa rahmat bagi seluruh alam.¹¹⁰

Berkaitan dengan visi Rahmatan Lil Alamiin sebagai mana firman Allah swt (QS.21:107), Imma Al-Maraghi mengatakan bahwa yang dimaksud ayat 107 surat al-Anbiyaa yang artinya: “Tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan agar menjadi rahmat bagi seluruh alam adalah bahwa tidaklah aku utus engkau Muhammad dengan al-

¹⁰⁹ Karel A. Stenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah* (Jakarta:PT. Pustaka, LP3 ES, 1994), h.93.

¹¹⁰ Abudin Nata, *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia* (cet.I;Jakarta:UIN Jakarta Press,2006) h.2

Qur'an ini serta berbagai perumpamaan dari ajaran agama dan hukum yang menjadi dasar rujukan untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat melainkan agar menjadi rahmat dan petunjuk bagi mereka dalam segala urusan kehidupan dunia dan akhiratnya.

Visi pendidikan islam yang bertumpu pada mewujudkan rahmat bagi seluruh alam itu, memperlihatkan bahwa pendidikan islam memiliki sebuah tanggung jawab yang amat berat, kompleks, multidimensi dan berjangka panjang. Visi pendidikan Islam terkait erat dengan upaya mewujudkan sebuah tata kehidupan yang harmoni, aman, damai sejahtera lahir dan batin.

Sedangkan misi ajaran Islam yang memuliakan manusia menjadi misi pendidikan Islam. Terwujudnya manusia yang sehat jasmani, rohani dan akal pikiran, serta memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, akhlak yang mulia, keterampilan hidup (life Skill) yang memungkinkan ia dapat memanfaatkan berbagai peluang yang diberikan Allah termasuk pula pengelola kekayaan alam yang ada di daratan, dilautan, bahkan di ruang angkasa adalah merupakan misi pendidikan Islam.

Di atas misi kemanusiaan itulah pendidikan Islam berpijak untuk menciptakan kondisi yang ideal bagi terbentuknya pribadi-pribadi muslim dan untuk selanjutnya membentuk tatanan masyarakat yang dinamis. Ketika menghadapi tantangan-tantangan modernisasi dan polarisasi ideologi dunia, terutama didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, pendidikan Islam tidak terlepas dari tantangan yang menuntut jawaban segera.

Secara garis besar tantangan-tantangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Terdapat kecenderungan perubahan sistem nilai untuk meninggalkan sistem nilai yang sudah ada (agama). Standar-standar kehidupan dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan yang berpijak pada materialism dan sekularisme. Dan inilah titik sentral masalah modernisasi yang menjadi akar timbulnya masalah-masalah di semua aspek kehidupan manusia, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun politik.

- b) Adanya dimensi besar dari kehidupan masyarakat modern yang berupa pemusatan pengetahuan teoritis. Ini berarti bertambahnya ketergantungan manusia pada ilmu pengetahuan dan informasi sebagai sumber strategis pembaharuan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan menimbulkan depersonalisasi dan keterasingan dalam dunia modern. Dalam menghadapi tantangan di atas, sudah barang tentu pendidikan Islam harus memperhitungkan kekuatan arus yang mengitarinya seperti sistem barat yang bercorak sekuler dan telah memasuki semua aspek kehidupan manusia, modernisasi harus dipahami sebagai proses alamiah dalam evolusi kehidupan manusia. Pemahaman tersebut menuntut kepekaan terhadap gejala perubahan dengan segala implikasinya serta kemampuan baru untuk menerjemahkan setiap perubahan ke dalam proses pendidikan.

Bertolak dari kenyataan tersebut, dalam kontes perubahan sosial ini pendidikan Islam mempunyai misi ganda yaitu:

- a) Mempersiapkan manusia muslim untuk menghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi mengendalikan dan memanfaatkan perubahan-perubahan tersebut, menciptakan kerangka berfikir yang kompergensif dan dinamis bagi terselenggaranya proses perubahan yang berada di atas nilai-nilai Islam.
- b) Memberikan solusi terhadap akses-akses negatif kehidupan modern yang berupa depersonalisasi, frustrasi dan keterasingan umat dari dunia modern. Misi pendidikan Islam itu mengisyaratkan perlunya mengaitkan pendidikan Islam dengan masa depan, sebab pendidikan Islam yang tidak berorientasi masa depan akan ketinggalan zaman dan tidak adaptif.

2. Faktor Ideologi Negara

Antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dapat ditelusuri dari dua segi: Pertama, Dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional Indonesia itu sendiri. Kedua, Dari

hakikat pendidikan Islam dalam kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. Penyusunan suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah-masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia pada khususnya, baik dalam hubungannya dengan masa lampau, masa kini dan kemungkinan-kemungkinan perkembangan masa depan.

Eksistensi bangsa Indonesia terwujud dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menunjukkan bahwa. Bangsa Indonesia sebagai Negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat penuh.” Bangsa Indonesia telah bertekad bulat untuk membangun dan mengembangkan bangsa dengan panca sila sebagai landasan ideologi dan UUD.1945 sebagai Landasan konstitusionalnya”.

Sejak dari awal Indonesia merdeka, pemerintah telah menempatkan agama sebagai fondasi dalam membangun bangsa dan Negara. Hal ini dapat dilihat dalam UUD.1945. “Dalam pembukaan UUD 1945, alinea ketiga dinyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah semata-mata atas berkat Tuhan YMK dan pada alinea keempat dinyatakan bahwa Panca Sila menjadi dasar Negara”.¹³ Keterangan tersebut memberi kejelasan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan pendidikan Islam adalah faktor Ideologi Negara.

3. Faktor Perkembangan Masyarakat

Perkembangan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya dipastikan menuju kepada masyarakat informasi (*informatical society*), sebagai kelanjutan dari masyarakat modern. Apabila masyarakat modern memiliki ciri rasional, berorientasi ke depan, terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri dan inovatif, maka masyarakat informasi dengan ciri-ciri tersebut belum cukup.

Selain ciri yang demikian masih perlu ditambah yaitu menguasai dan mendayagunakan arus informasi, mampu bersaing, mengubah tantangan menjadi peluang dan menguasai berbagai strategi dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Kemajuan dalam bidang informasi

berdampak pada kejiwaan dan kepribadian masyarakat.¹¹¹ Masyarakat yang mampu bertahan pada era ini, hanyalah yang berorientasi masa depan sanggup mengubah pengetahuan menjadi kebijakan. Demikian gambaran masa depan yang akan terjadi dan umat manusia pasti menghadapinya. Masa depan seperti ini akan mempengaruhi dunia pendidikan seperti, kelembagaan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan sebagainya. Hal tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab oleh dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam, Abudin Nata menjelaskan tentang perlunya dilakukan upaya strategis, antara lain:

- a) Tujuan pendidikan sekarang tidak cukup hanya memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, keimanan dan ketakwaan tetapi harus diarahkan pada upaya mencetak manusia yang kreatif, inovatif, mandiri dan produktif, mengingat persaingan dunia yang kompetitif.
- b) Guru dimasa datang adalah guru yang selain memiliki informasi, berakhlak baik juga harus mampu menyampaikan pesan secara metodologis serta mendaya gunakan berbagai sumber informasi yang ada di masyarakat ke dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat menciptakan masyarakat belajar (*Learning Society*).

Bahan pelajaran umum dan agama perlu diintegrasikan dan di berikan kepada siswa sebagai bekal yang memungkinkan mereka dapat memiliki pribadi yang utuh yaitu pribadi disamping berilmu pengetahuan juga berakhlak mulia.”¹¹²

Pernyataan pakar tersebut menunjukkan pentingnya upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai persoalan dalam masyarakat, sebab kehidupan sekarang banyak diperhadapkan dengan persoalan moral.

¹¹¹St. Hasniyati Gani Ali, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan Pendidikan Islam*, (Jurnal Al-Ta'dib: Vol. 8 No. 2, Juli-Desember, 2015), h. 108.

¹¹² Altaf Gauhar, *Tantangan Islam dalam Hasbullah, Kapita Selektta Pendidikan Islam*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),h.25

E. Kesimpulan

Uraian yang telah dikemukakan menggambarkan pembinaan pendidikan Islam di Indonesia, Jejak rekam pelaksanaan pendidikan agama yang dipantau adalah pembinaan pendidikan Islam sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Kesimpulannya adalah:

- a) Pendidikan agama Islam merupakan perwujudan dari amanah UUD 1945 dan berbagai perundangan yang berlaku seperti SKB 2 Menteri yang menangani pendidikan agama.baik di lembaga pendidikan umum maupun di madrasah.Selanjutnya di era orde lama pendidikan agama mulai diberikan sejak kelas IV SR, waktunya 2 jam perminggu, sedangkan pengangkatan guru, pendanaan maupun sarana ditanggung oleh Departemen Agama. Kemudian pada masa Orde baru MPRS menetapkan pelaksanaan PAI dimasukkan sebagai kurikulum yang wajib dilaksanakan mulai SD sampai perguruan Tinggi Negeri. Pada era reformasi kedudukan pendidikan Islam bertambah jelas karena ditunjang berbagai peraturan perundang-undangan, namun realitasnya di lapangan menunjukkan bahwa meskipun Pendidikan Islam sebagai sub system Pendidikan nasional, tetapi dari segi kelembagaan maupun pendanaan masih dipandang sebelah mata.
- b) Terdapat beberapa faktor penyebab munculnya kebijakan pemerintah diantaranya adalah faktor agama, Ideologi, Perkembangan masyarakat serta Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

F. Daftar Pustaka

A.Timur Jailani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*, (Jakarta: CV. Darmaga, 1990).

Abudin Nata, *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia* (cet.I; Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006).

Altaf Gauhar, *Tantangan Islam dalam Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

- Karel A. Stenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah* (Jakarta: PT. Pustaka, LP3 ES, 1994).
- Republik Indonesia, UU nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, (cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- St. Hasniyati Gani Ali, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan Pendidikan Islam*, (Jurnal Al-Ta'dib: Vol. 8 No. 2, Juli-Desember, 2015).
- Yumna, *Perkembangan Pendidikan Islam Masa Orde Baru Pada Sekolah Aliyah dan Perguruan Tinggi Islam*, (Jurnal: Mau'izhah Vol. VIII No. 2 Jul-Des 2018).
- Zuairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

BAGIAN XIII

PEMBELAJARAN ISLAM PADA MASA REFORMASI

Latri Ida Aini

A. Pendahuluan

Masa reformasi dimulai sejak Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, yang mana sebelumnya telah menjabat selama 31 Tahun. Peristiwa pengunduran diri tersebut terjadi pada tanggal 21 Mei 1998. Reformasi merupakan sebuah masa yang berupaya membawa sebuah perubahan yang mengarah kepada perbaikan-perbaikan atas pemerintahan pada masa sebelumnya yaitu masa Orde Baru. Upaya perbaikan pada masa reformasi ini dilakukan secara menyeluruh dan mencakup berbagai bidang. Masa reformasi ada sebagai jawaban akan krisis dan problem yang menyerang berbagai sudut kehidupan. Adanya krisis ekonomi, politik, hukum, dan sosial menjadi pendorong lahirnya masa reformasi ini. Tentunya dengan lahirnya masa reformasi ini menjadi angin segar dan kegembiraan terseniri bagi rakyat Indonesia, karena menjadi sebuah sinyal akan terbebasnya dari sebuah pemerintahan yang dilanda krisis.

Akibat problem dan krisis yang muncul pada masa Orde Baru memberikan dampak besar terhadap berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Diketahui bidang pendidikan pada masa reformasi tampak jauh lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan sebelumnya. Pendidikan pada masa ini khususnya pendidikan Islam memiliki tingkatan yang baku, seperti Madrasah Ibtidaiyah untuk tingkat sekolah dasar, Madrasah Tsanawiyah untuk tingkat menengah pertama, dan Madrasah Aliyah untuk tingkat menengah atas.

Pada masa reformasi, pendidikan Agama Islam kedudukannya sama serta mendapat perhatian yang seimbang dengan pendidikan umum. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya dasar hukum yang tertuang dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang di dalamnya memuat regulasi mengenai berbagai hal terkait

pendidikan, salah satunya adalah Pendidikan Agama Islam yang sama kedudukannya dengan pendidikan umum. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana pendidikan Islam pada masa reformasi, maka pada penulisan ini akan dipaparkan mengenai kurikulum, institusi, kultur serta perkembangan pembelajaran Islam pada masa reformasi.

B. Pembelajaran Islam pada Masa Reformasi

1. Kurikulum Pembelajaran Islam pada Masa Reformasi

Kurikulum menjadi acuan yang medasari di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kurikulum menjadi salah satu penentu berhasil atau gagalnya proses pendidikan, sulit atau mudahnya siswa dalam memahami materi pelajaran, serta dapat dicapai atau tidaknya tujuan pembelajaran itu semua tergantung akan kurikulum yang diterapkan.¹¹³ Kurikulum yang baik tentunya harus mengalami perubahan dan pembaharuan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, saat ini kita tahu bahwa setiap dilakukannya pergantian menteri pendidikan, maka kebijakan kurikulum yang akan diterapkan pun mengalami perubahan.

Dalam pelaksanaan pendidikan, Indonesia sudah mengalami sebanyak enam kali perbuahan kurikulum, diantaranya Kurikulum 1968, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, dan yang terakhir yaitu kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).¹¹⁴ Dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, terciptanya kurikulum baru yang dibentuk oleh pemerintah melalui Depdiknas, adapun kurikulum tersebut yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

➤ Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Kemunculan KBK didorong oleh adanya tuntutan terkait mutu pendidikan di Indonesia. Banyak yang

¹¹³ Tarpan Suparman, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Purwodadi: CV. Saranu Untung, 2020), h.1.

¹¹⁴ Kunandar, "Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia" 2, no. 3 (2005):h. 107.

perpandangan bahwa semakin hari pendidikan yang ada di Indonesia mengalami keterpurukan. Mereka beranggapan bahwa output pendidikan yang dihasilkan di Indonesia hanya menjadi beban negara dan masyarakat sebab, lulusan yang dihasilkan kurang memiliki bekal kompetensi memadai yang bisa diterapkan saat berada di lapangan atau ditengah-tengah masyarakat. Dengan adanya KBK ini, peserta didik akan dibimbing dalam menguasai kompetensi yang ada yang disesuaikan dengan standar yang sudah ditentukan.

KBK merupakan kurikulum yang dirancang saat Menteri Pendidikan Nasional dipegang oleh Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar M.Sc. di dalam KBK memuat ketentuan-ketentuan yang meliputi: (1) bersifat: *Competency Based Curriculum*; (2) penyebutan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) menjadi SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) menjadi SMA (Sekolah Menengah Atas); (3) program pengajaran Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) disusun dalam 8 mata pelajaran; (4) program pengajaran SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) disusun dalam 12 mata pelajaran; (5) program pengajaran SMA/Madrasah Aliyah disusun dalam 17 mata pelajaran.

KBK telah banyak dilakukan uji coba diberbagai lembaga pendidikan, akan tetapi meskipun sudah dilakukan beberapa kali uji coba, kurikulum ini belum juga dilakukan pengesahan oleh pemerintah secara resmi. Seperti ada keraguan yang masih menyelimuti pemerintah terkait KBK ini. Keraguan pemerintah akan KBK ini dilatar belakangi oleh banyaknya kritikan diberikan dari berbagai pihak saat KBK ini di uji cobakan. Kritikan terbet antara lain: (1) KBK masih terlalu menitikberatkan pada materi, sehingga masih ada ketakutan dalam diri guru akan beban materi-materi yang begitu banyak, dan mengulangi seperti yang sudah terjadi sebelumnya yaitu pada pelaksanaan Kurikulum 1994, (2) kompetensi yang termuat di dalam KBK dirasa belum memiliki kejelasan yang pasti, yang dikawatirkan belum terlalu berfungsi dengan baik saat diterapkan pada standar kompetensi lulusan, (3) belum jelas dan sulit dilakukan pengukuran pada sistem penilaiannya.

Kemudian, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan merevisi KBK dengan mengeluarkan Permendiknas Nomor 22 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permendiknas Nomor 24 tentang pelaksanaan kedua Peraturan pemerintah tersebut. Ketiga Permendiknas tersebut dikeluarkan pada tahun 2006. Dengan adanya permendiknas yang sudah disebutkan sebelumnya, dirasa mampu menjawab ketidakpastian nasib KBK sebelumnya sudah pernah diterapkan di beberapa sekolah di Indonesia.¹¹⁵

➤ Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah revisi sekaligus pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). KTSP dirumuskan atas dasar KBK yang masih dianggap menjadi beban bagi sekolah maupun pemerintah pusat. Maka dari itu di dalam KTSP beban belajar yang dibebankan kepada siswa tidak begitu berat, serta satuan pendidikan mendapatkan wewenang untuk mengembangkan kurikulum, seperti membuat indikator, silabus dan komponen kurikulum lainnya.

Pada KTSP, ketercapaian kompetensi siswa menjadi hal yang paling ditekankan dalam kurikulum ini, baik individual maupun klasikal. Pembentukan peserta didik ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat yang diharapkan menjadi individu yang terampil dan mandiri. Di dalam KTSP orientasinya pada hasil belajar dan keberagaman, dan metode yang digunakan pun bervariasi. Dan guru bukan menjadi satu-satunya sumber belajar di dalam pembelajaran.¹¹⁶

2. Peran dan Aspek Profesionalisme Guru Pada Masa Reformasi

Pada era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian, diperlukan seorang pendidik yang

¹¹⁵ Kunandar, 111–112

¹¹⁶ Siti Aisyah, “Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi (1998-Sekarang)” 9, no. 2 (2019):h. 43–45.

memiliki visi serta mampu mengolah pembelajaran dengan efektif dan inovatif. Guru harus memiliki keterampilan dalam merancang berbagai macam strategi dan model pembelajaran yang mampu menciptakan suasana menyenangkan saat proses pembelajaran.

Dibutuhkan seorang pendidik yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam mengemban perannya sebagai pendidik. Seorang guru, sudah sepatutnya harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, dan mampu mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. Kualifikasi akademi ialah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kompetensi sebagai agen pembelajaran mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Sertifikasi guru merupakan kepastian masa depan dalam meningkatkan kualitas dan harga diri guru, menghadapi era globalisasi dan mensiasat sistem desentralisasi. Semua itu sudah diatur dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.¹¹⁷ Dilaksanakannya program sertifikasi guru untuk memenuhi amanat UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sertifikasi guru merupakan kerjasama antara Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dengan Tenaga Kependidikan (PMTK)/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pengelola guru dan Ditjen Dikti/Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara sertifikasi. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) memiliki tugas mempersiapkan pendidik agar siap melaksanakan sertifikasi. Guru yang lulus sertifikasi akan mendapatkan sertifikasi pendidik dan

¹¹⁷ Kunandar, *“Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, h. 81.

berhak memperoleh tunjangan profesi sebesar satu lai gaji, dan bagi yang tidak lulus direkomendasikan mengikuti pelatihan atau pembinaan melalui LPMP, MGMP/KKG bisa juga di lembaga lainnya untuk mempersiapkan diri mengikuti tes ulang.

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dalam rangka mendorong dan mempercepat proses kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru.¹¹⁸

3. Institusi Pembelajaran Islam Pada Masa Reformasi

Di dalam UU No.20 Tahun 2003 terdapat beberapa pasal yang membahas tentang Pendidikan Islam. Di dalamnya memuat tiga hal mengenai pendidikan Islam. (1) Kelembagaan formal, non formal, dan informal, diposisikannya lembaga madrasah menjadi lembaga formal yang keberadaannya sederajat dengan lembaga pendidikan sekolah. Kemudian lebih dijelaskan mengenai posisinya sebagai sekolah yang bercorak Islam, kemudian majlis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal dan pesantren diposisikan sebagai lembaga pendidikan keagamaan. (2) Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Mata pelajaran Islam dipatenkan menjadi mata pelajaran wajib diberikan kepada peserta didik di berbagai jalur, jenis, dan tingkat pendidikan. (3) Di dalam Sisdiknas dinyatakan bahwa pendidikan Islam sebagai nilai, didalamnya ada seperangkat nilai-nilai Islami.

a. Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang dimulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (TK/RA), pendidikan dasar (SD/MI), pendidikan menengah (SMP/MTs dan SMA/MA), dan pendidikan tinggi (universitas). Status pendidikan yang

¹¹⁸ Kunandar, 83.

ada di pendidikan formal ada yang berstatus negeri dan berstatus swasta.¹¹⁹

➤ Jenjang Pendidikan Formal di tinjau dari sudut tingkatan di lembaga pendidikan Islam terdiri dari:

1. Pendidikan Dasar terdiri dari:
 - a) Madrasah ibtidaiyah (MI)
 - b) Madrasah Tsanawiyah (MTs)
2. Pendidikan Menengah terdiri dari:
 - a) Madrasah Aliyah (MA)
 - b) Madrasah Aliyah Khusus (MAK)

Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), ketiga pendidikan tersebut bercirikan agama, yaitu Islam. Walaupun ketiga pendidikan tersebut sudah sebagai pendidikan umum yang bercirikan agama Islam, porsi pada materi pendidikan keagamaan yang diberikan lebih banyak dibandingkan pendidikan umum non keagamaan.¹²⁰

4. Pendidikan Tinggi, terdiri dari:

- a. Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
- b. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
- c. Universitas Islam Negeri (UIN)
- d. Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta (STAI)
- e. Universitas Islam Swasta (penegelolaannya di bawah yayasan)

Selain tingkat pendidikan seperti yang sudah disebutkan di atas, diselenggarakan juga pendidikan anak usia dini, yaitu pendidikan untuk anak-anak sebelum masuk ke jenjang pendidikan Dasar. Pada pendidikan formal, bentuk pendidikan anak usia dini ini yaitu Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan sebagainya.¹²¹

¹¹⁹ Hamid Darmadi, *Pengantar Pendidikan Era Globalisasi: Konsep Dasar, Teori, Strategi, dan Implementasi Dalam Pendidikan Globalisasi* (Tangerang: AnImage, 2019), h. 26.

¹²⁰ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 184.

¹²¹ Siti Aisyah, "Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi (1998-Sekarang)," h.50.

- Jenjang Pendidikan Formal di tinjau dari sifatnya
 - a) Sekolah Umum, yaitu lembaga pendidikan yang sifatnya belum mengarahkan dan mempersiapkan peserta didik pada spesialis bidang pekerjaan tertentu. Sekolah umum lebih mempersiapkan peserta didik untuk ketinggian pendidikan yang lebih tinggi. Sekolah umum yaitu seperti SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.
 - b) Sekolah Kejuruan, yaitu lembaga pendidikan yang mempersiapkan peserta didik kearah bidang keahlian atau lapangan pekerjaan tertentu¹²². Yaitu dengan dibekali keterampilan-keterampilan sesuai bidang atau yang diminati peserta didik. Pendidikan kejuruan antara lain SMEA, MAPK, SMKK, STM, dan lain-lain.
- Ditinjau dari segi yang mengusahakan
 - a) Sekolah Negeri, yaitu lembaga pendidikan dengan pemerintah sebagai pihak yang mengusahakan dari segi penyediaan sarana dan prasarana, pendanaan dan penyediaan tenaga pengajar. Lembaga pendidikan ini diatur dalam pasal 31 UUD 1945, yang penyelenggarannya diatur dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang sisdiknas. Sekolah umum berada dibawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) sedangkan sekolah yang bercirikan Agama Islam berada di bawah naungan Departemen Agama.¹²³
 - b) Sekolah Swasta, yaitu lembaga pendidikan yang diusahakan selain pemerintah melainkan badan-badan swasta. Untuk lembaga pendidikan tinggi PTN ataupun PTS yang digunakan yaitu sistem akreditasi. Melalui sistem tersebut, perguruan tinggi memiliki peluang untuk mengembangkan lembaganya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

¹²² Fuad Abdilah, *Manajemen Organisasi Pendidikan Kejuruan* (Jember: Cerdas Ulet Kreatif, 2020),h. 3.

¹²³ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*,h. 52.

b. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal menurut Suprijanto memiliki arti yaitu “proses belajar yang dilakukan secara sengaja oleh warga belajar di dalam suatu organisasi berstruktur yang berlangsung diluar sistem prasekolah.”¹²⁴ Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren sebagai pendidikan agama non formal yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak awal masuk Islam ke Indonesia atau abad ke-11.

Pesantren dan madrasah Diniyah di dalam sistem pendidikan nasional, memiliki pondasi yang kokok di tengah-tengah masyarakat Islam Inoensia, dan pendidikan ini bagian dari pendidikan luar sekolah (nonformal). Pelajaran agama di pondok pesantren diajarkan dan dikaji secara mendalam. Dengan beragamanya pondok pesantren yang ada di Indonesia, seperti pesantren tradisional, modern, dan mengarah ke pengembangan iptek, akan tetapi pada mereka semu dilandasi oleh satu kesamaan, yaitu agama menjadi bidang kajian utama disamping seluruh proses pendidikan pesantren. Pesantren memiliki metode-metode khusus dalam proses pembelajarannya, seperti sorogan, bandongan (*wetonan*), musyawarah (*mudzakaroh*), hafalan, dan lalaran.¹²⁵ Selain itu ada juga metode yang kerap digunakan yaitu metode demonstrasi dan *riyadlah*.¹²⁶

Pada madrasah Diniyah, sistem pembelajarannya lebih terstruktur dibandingkan yang ada di Pesantren. Sistemn pengajaran yang diterapkan yaitu sistem klasikal. Meskipun materi yang diajarkan sama dengan yang diajarkan di pondok peantren yaitu tentang keagamaan, akan tetapi materi di madrasah Diniyah lebih berstruktur dan berjenjang.

Selain pondok pesantren dan Diniyah, majlis Talim masuk kedalam kategori lembaga pendidikan yang bersifat

¹²⁴ Ihwan Ridwan dan Nur Ida, *Program Pendidikan Nonformal* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), h.1.

¹²⁵ Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak* (Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2020), h.33.

¹²⁶ Imam Amrusi Jailani, “Pendidikan Pesantren sebagai Potret Konsisten Budaya di Tengah Himpitan Modernitas” 20, no. 1 (2012),h. 77–79.

nonformal. Di dalamnya terdapat kurikulum tersendiri yang diadakan secara berkala dan teratur dan diikuti oleh jamaah yang bisa cukup banyak, yang memiliki tujuan membina serta mengembangkan pengetahuan dan pemahaman agama. Materi yang disampaikan pun menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak boleh keluar dari akidah agama dan disesuaikan dengan adat dan budaya setempat. Metode yang digunakan biasanya melalui metode ceramah dan metode Tanya jawab (diskusi), dan lain sebagainya.¹²⁷

c. Pendidikan Informal

Pendidikan informal merupakan pendidikan bentuk pembelajaran dengan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang ada kegiatan belajarnya secara mandiri. Pendidikan keluarga memiliki landasan bahwa pendidikan merupakan proses yang bersifat berkelanjutan, yang dimulai sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Proses pendidikan ini termasuk bentuk belajar yang terjadi dalam keluarga.¹²⁸

Pendidikan keluarga menjadi pendidikan yang paling pertama dan utama untuk seseorang, dalam hal ini yang memiliki peranan penting yaitu orang tua. Pendidikan keluarga menjadi tempat membentuk kepribadian dasar seseorang, seperti mengembangkan watak, nilai-nilai keagamaan dan moral, nilai-nilai budaya, serta keterampilan dasar.

Pendidikan yang ada di sekolah menjadi perluasan dari pendidikan keluarga. Dalam hal ini pendidikan memiliki makna sebagai proses sosialisasi secara kontinu yang tujuannya mengantarkan anak menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt. dengan demikian walaupun pendidikan dalam bentuk sekolah sudah semakin banyak keberadaannya, pendidikan keluarga tidak boleh diabaikan. Sebab pendidikan keluarga menjadi kunci utama

¹²⁷ Nuryanis dan Romli, *Pendidikan Luar Sekolah, Kontribusi Ditpenamas: Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional* (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2003),h.40.

¹²⁸ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, 64.

dalam membentengi diri anak ditengah pesatnya perubahan sosial pada era globalisasi dan informasi ini melalui bimbingan dan penanaman nilai-nilai agama.¹²⁹

5. Kultur Pembelajaran Islam Pada Masa Reformasi

Berdasarkan sejarah kemunculan madrasah, terdapat dua faktor yang melatarbelakangi kemunculannya, yaitu: *pertama*, terdapat pandangan terhadap pendidikan tradisional yang dirasa belum mampu memenuhi kebutuhan praktis masyarakat. *Kedua*, kekhawatiran akan semakin pesatnya perkembangan sekolah Belanda yang bisa mempengaruhi pemikiran sekuler pada masyarakat. Oleh Karena itu, demi menyeimbangkan perkembangan sekularisme, msasyarakat muslim khususnya para reformist berupaya melakukan reformasi dengan jalan mengemb-
bangkan pendidikan dan pemberdayaan madrasah.¹³⁰

Jika dilihat dari sejarahnya, madrasah tumbuh dan berkembang dari oleh dan untuk masyarakat Islam itu sendiri, dengan begitu sudah sejak dulu sebenarnya konsep pendidikan berbasis masyarakat diterapkan. Baik secara individu ataupun organisasi, masyarakat mendirikan sebuah madrasah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Sehingga tidak heran jika madrasah yang ada dibangun dengan seadanya dan apa adanya. Itu semua dilandasi oleh semangat keagamaan dan dakwah masyarakat.

Berkaitan dengan madrasah ditengah-tengah masyarakat, dalam hal ini masyarakat tidak memiliki cukup kebebasan mengelola dengan cara merka sendiri. Sebab semua hal terkait pendidikan, berada ditangan pemerintah sebagai penentu dan pengambil keputusan. Dari hal tersebut terlihat bahwa pelaksanaan pendidikan Nasional dilakukan secara birokratis-sentralistik, yang memposisikan madrasah sebagai penyelenggara pendidikan sangat bergantung pada

¹²⁹ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam Dari Paradigma Pengembangan Manajemen Kelembagaan Kurikulum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009),h.183.

¹³⁰ Muhaimin, 183.

keputusan birokrasi, dan terkadang keputusan yang diberikan sangat melenceng dengan keadaan madrasah setempat. Hal tersebut tentunya membawa dampak yang kurang baik bagi perkembangan madrasah itu sendiri, sebab madrasah seolah-olah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif dalam membawa lembaganya ke arah yang lebih baik, termasuk peningkatan mutu pendidikan yang menjadi salah satu tujuan pendidikan nasional.

Bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya yang beragama Islam bersepakat untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 bukan berdasarkan Islam. Akan tetapi Pancasila dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan umat Islam dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan Islam. Kemudian pemerintah dalam hal ini berupaya dan berusaha menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur di dalam Undang-Undang, sistem pendidikan nasional memiliki makna suatu sistem pendidikan yang mampu memberdayakan pendidikan kecerdasan akal budi secara menyeluruh kepada semua masyarakat, dengan begitu keamanan dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.

Untuk merealisasikan rencana pemerintah di atas, dirumuskanlah UU No. 20 tahun 2003 yang menjadi landasan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional seperti yang diharapkan UUD 1945. Dengan usaha yang begitu keras, dari Indonesia merdeka sampai tahun 1989 dengan lahirnya UU Nomor Tahun 1989, yang kemudian disempurnakan menjadi UU No.20 tahun 2003, menjadi puncak dalam upaya mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan Nasional.¹³¹

C. Kesimpulan

Dengan dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai pengganti UU No.2 Tahun 1989, kurikulum baru digagas oleh pemerintah melalui Depdiknas, kurikulum tersebut yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

¹³¹ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, 173.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah merumuskan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya berisi kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi Guru dan Dosen. Berdasarkan peraturan yang ada, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik. Kualifikasi akademik didapatkan dari pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi yang harus dimiliki guru terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

Pendidikan Islam pada masa reformasi diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003. Berdasarkan pasal tersebut ada tiga hal yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yaitu (1) Kelembagaan formal, non formal, dan informal, diposisikannya lembaga madrasah menjadi lembaga formal yang keberadaannya sederajat dengan lembaga pendidikan sekolah. Kemudian lebih dijelaskan mengenai posisinya sebagai sekolah yang bercorak Islam, kemudian majlis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal dan pesantren diposisikan sebagai lembaga pendidikan keagamaan. (2) Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Mata pelajaran Islam dipatenkan menjadi mata pelajaran wajib diberikan kepada peserta didik di berbagai jalur, jenis, dan tingkat pendidikan. (3) Di dalam Sisdiknas dinyatakan bahwa pendidikan Islam sebagai nilai, didalamnya ada seperangkat nilai-nilai Islami.

Berdasarkan sejarah kemunculan madrasah, terdapat dua faktor yang melatarbelakangi kemunculannya, yaitu: *pertama*, terdapat pandangan terhadap pendidikan tradisional yang dirasa belum mampu memenuhi kebutuhan praktis masyarakat. *Kedua*, kekhawatiran akan semakin pesatnya perkembangan sekolah Belanda yang bisa mempengaruhi pemikiran sekuler pada masyarakat.

D. Daftar Pustaka

- Achmad Muchaddam Fahham. *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2020.
- Fuad Abdilah. *Manajemen Organisasi Pendidikan Kejuruan*. Jember: Cerdas Ulet Kreatif, 2020.

- Hamid Darmadi. *Pengantar Pendidikan Era Globalisasi: Konsep Dasar, Teori, Strategi, dan Implementasi Dalam Pendidikan Globalisasi*. Tangerang: AnImage, 2019.
- Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Ihwan Ridwan dan Nur Ida. *Program Pendidikan Nonformal*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Imam Amrusi Jailani. "Pendidikan Pesantren sebagai Potret Konsisten Budaya di Tengah Himpitan Modernitas" 20, no. 1 (2012).
- Kunandar. "Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia" 2, no. 3 (2005).
- Muhaimin. *Rekonstruksi Pendidikan Islam Dari Paradigma Pengembangan Manajemen Kelembagaan Kurikulum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Nuryanis dan Romli. *Pendidikan Luar Sekolah, Kontribusi Ditpenamas: Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2003.
- Siti Aisyah. "Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi (1998-Sekarang)" 9, no. 2 (2019).
- Tarpan Suparman. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Purwodadi: CV. Saranu Untung, 2020.

BAGIAN XIV

PEMBAHARUAN PEMBELAJARAN ISLAM DI INDONESIA

Ahmad Yusron al Asna

A. Pendahuluan

Keberhasilan islam dalam bidang ilmu pengetahuan berjalan secara perlahan sejak rasio tidak lagi di tempatkan di posisi yang semestinya, bahkan cahayanya semakin lama semakin meredup. Sejak Baghdad diruntuhan oleh tentara mongol pada tahun 1258, maka mulailah zaman pengetahuan sampai tahun 1800 M. kemunduran tersebut penyebab pada umumnya adalah faktor-faktor perpecahan internal karena islam serta kesan perang salib yang berkepanjangan sehingga pencerahan padamasia ini identic mengambil bentuk spiritual yang mengakibatkan berkembngnya ajaran-ajaran tasawuf serta tarekat di semua negeri islam. Sedangkan beberapa hasil ijtihad yang mengkristal semakin ketat dipegang kaku serta tidak dinamis, sehingga ketika umat islam dihadapkan terhadap kekuatan baru, kelemahan serta kemrosotan peradaban yang dimiliki oleh umatislam menjadi terlihat kontras.

Pembelajaran islam di indonesia tentunya telah menjadi tradisi turun menurun yang tidak dapat musnahkan, selain memberikan dampak terhada moral, pembelajaran islam di Indonesia juga menjadi rujukan untuk pendidikan-pendidikan umum yang adadi Indonesia, sebab dalam pendidikan islam terdapat banyak hal-hal yang dipelajari, selain bagaimana menata pola fikir serta hidup bersosial yang sesuai dengan syari'at, pembelajaran islam juga menuntun umat manusia agar memiliki tujuan hidup yang mengarah dalam koridor kebenaran, karena kebenaran merupakan hal yang patut diperjuangkan untuk menjelajahi kehidupan yang masih menjadi misteri takdir dari yang maha kuasa.

Pembelajaran islam tentunya membutuhkan tekad serta niat yang kuat untuk menjalankannya, sebab pembelajaran islam juga tidak hanya memiliki misi untuk mencerdaskan akan tetapi

juga untuk mentaqwa kan serta mentawadhu'kan umat manusia. Oleh sebab itu pembelajaran islam di Indonesia tentunya sangat memperhatikan bagaimana pola fikir serta pola perasaan hati mengungkapkannya. Pola fikir yang baik adalah print out dari pembelajaran islam yang efektif, pola perasaan hati yang terarah adalah hasil dari pembelajar islam yang kondusif.

Pembelajaran islam di Indonesia tentunya tidak hanya jalan ditempat atau fakum dalam satu arah dan satu tempat. Pembelajaran islam di Indonesia mengalami beberapa proses pembaharuan dari setiap masa yang telah dilewati. Pembaharuan pembelajaran islam buka berarti merubah ajaran-ajaran nabi Muhammad saw. Ke ajaran yang terbaru, akan tetapi lebih ke pemikiran-pemikiran keislaman yang lebih memiliki nilai intelektual yang meningkat setiap masanya.

B. Pembaharuan Pembelajaran Islam

1. Pengertian Pembaharuan

Secara etimologi, pembaharuan merupakan istilah yang memiliki arti proses, cara memperbarui, proses mengembangkan adat istiadat, cara hidup yang baru, membangun kembali, menyusun kembali, serta memulihkan sebagaimana seperti semula.¹³² Sedangkan dalam segi terminologi, pembaharuan mengandung beberapa makna, di antaranya yaitu diungkapkan oleh A. Mukti Ali, ia berpendapat bahwa pembaharuan merupakan suatu usaha mengganti yang jelek dengan yang baik dengan mengusahakan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.¹³³ Sedangkan menurut pendapat versi lain Secara sederhana, Azra mendefinisikan pembaharuan dengan suatu usaha untuk mengadakan perubahan di berbagai bidang dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara menyeluruh guna memperoleh hasil yang lebih baik sesuai

¹³² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 82; Bandingkan; Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 15.

¹³³ A. Mukti Ali, *Beberapa Masalah Pendidikan di Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1971), h. 17.

dengan tantangan dan dinamika kebutuhan masyarakat.¹³⁴ Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pembaharuan merupakan suatu hal ataupun usaha, sebuah perkembangan sesuatu terhadap hal yang lebih baik, lebih baru, lebih berkembang, serta lebih memberikan efek yang lebih berpengaruh.

2. Pengertian Pendidikan Islam

Menurut pendapat M. Yusuf al-Qardhawi, pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal serta hatinya, rohani sekaligus jasmaninya, akhlak serta keterampilannya.¹³⁵ Sedangkan menurut pendapat versi lain yang diungkapkan oleh Hasan Langgulung bahwa pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi sebuah peranan, memindahkan pengetahuan sekaligus nilai-nilai Islam yang disesuaikan dengan fungsi manusia untuk beramal baik di dunia serta memetik hasilnya di akhirat.¹³⁶ Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan islam merupakan tahapan yang berproses dalam membentuk kepribadian manusia dari yang brutal menjadi bermoral, dari yang licik serta picik menjadi pola fikir yang penuh dengan taktik serta teknik.

1. Bentuk pembaharuan Pembelajaran Agama Islam di Indonesia

Dalam proses pendidikan mengalami pembaharuan pendidikan dari beberapa aspek. Seperti halnya; pembaharuan dalam aspek tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, materi atau kurikulum, metode pendidikan, lingkungan pendidikan, evaluasi pendidikan, serta manajemen pendidikan. Meskipun

¹³⁴ Azyumardi Azra, "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan," dalam Nurcholih Madjid, *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 32.

¹³⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*. Penerjemah Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), H. 157.

¹³⁶ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h. 94.

demikian hanya ada empat yang akan penulis uraikan antara lain sebagai berikut:

a. Pembaharuan dalam Aspek Tujuan Pendidikan

Tujuan ataupun cita-cita sangat penting dalam aktivitas pendidikan, sebab merupakan arah yang akan dicapai. Maka tujuan harus tersedia sebelum melangkah untuk mengerjakan sesuatu. Bila pendidikan dipandang sebagai sebuah proses, maka proses tersebut akan berakhir pada tercapainya tujuan akhir pendidikan.¹³⁷ Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembaharuan dalam aspek tujuan pendidikan merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari, sebab tujuan pendidikan adalah target yang menjadi ukuran sukses dan tidaknya sebuah pembaharuan pendidikan.

b. Pembaharuan dalam Aspek Kurikulum

Subandijah membedakan istilah pembaharuan kurikulum dengan perubahan kurikulum. jika pembaharuan kurikulum, menurutnya yakni sebuah perubahan ataupun inovasi kurikulum dalam mata pelajaran /bidang studi. Atau bahkan disebut juga dengan istilah perubahan kurikulum dalam skala terbatas /mikro. Sedangkan perubahan kurikulum yaitu perubahan kurikulum dalam segala aspek dalam komponen kurikulum. Atau disebut juga dengan perubahan kurikulum secara sistem /makro atau umum).¹³⁸ Hal tersebut membuktikan bahwa perubahan kurikulum memiliki ciri yang berbeda dengan pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum bersifat mikro atau memiliki lingkup yang cukup kecil jika dibandingkan dengan perubahan kurikulum yang memiliki cakupan cukup luas.

c. Pembaharuan dalam Aspek Pendidik

Pembaharuan pendidik berorientasi pada peningkatan mutu pendidik yang dapat ditandai dengan adanya upaya dalam pencapaian kompetensi yang melekat pada diri seorang pendidik atau guru. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembaharuan dalam aspek pendidik di sini yaitu adanya sebuah

¹³⁷ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), H. 119.

¹³⁸ Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, h. 84;

perubahan dalam rangka pencapaian kompetensi para guru di sebuah lembaga pendidikan.¹³⁹ Teori tersebut memberikan arti serta kesimpulan bahwa kompetensi guru merupakan sasaran pembaharuan pendidikan islam dalam aspek pendidik atau guru, sehingga dalam pembaharuan ini terfokus pada bagaimana nilai serta kemajuan pendidik serta dedikasinya untuk pendidikan di Negara Indonesia.

d. Pembaharuan dalam Aspek Peserta Didik

Peserta didik memiliki fungsi sebagai objek yang sekaligus menjadi subjek pendidikan. Sebagai objek dikarenakan peserta didik tersebut menerima perlakuan-perlakuan tertentu, akan tetapi dalam pandangan pendidikan modern peserta didik lebih dekat dikatakan sebagai subjek atau bias disebut juga dengan pelaku pendidikan. Usaha pembaharuan pendidikan ditujukan untuk kepentingan siswa atau peserta didik, yang sering disebut dengan istilah "*Student Centered Approach*".¹⁴⁰ Pembaharuan tersebut berorientasi untuk dapat menghasilkan sosok peserta didik yang ideal. Seperti halnya peserta didik yang berkualitas, profesional, mumpuni di bidangnya, berkemauan keras maupun pantang menyerah, memiliki motivasi yang cukup tinggi, sabar, tabah, tidak mudah putus asa dan lain-lain. Hal tersebut membuktikan bahwa pembaharuan dalam aspek peserta didik memiliki misi untuk merubah pola pikir serta kemampuan peserta didik baik akademisi maupun moral untuk menjadi lebih baik lagi serta memberikan pengaruh yang positif untuk pendidikan islam di Negara Indonesia.

2. Bentuk Pembaharuan Pembelajaran Islam di Indonesia menurut para Ahli

a. Menurut Pandangan Muhammad Abduh

Sistem pendidikan yang ada pada saat itu melatar belakangi pemikiran modernisasi pendidikan oleh

¹³⁹ Zaenudin, "Pembaharuan sistem pendidikan islam; Jurnal Pendidikan dan Studi Islam", Vol . 1 / No. 1/Desember 2015, H. 12

¹⁴⁰ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h.

Muhammad Abduh. Sebelumnya, pembaruan pendidikan Mesir diawali oleh Muhammad Ali. Dia hanya menekankan terhadap perkembangan aspek intelektual serta mewariskan dua tipe pendidikan pada masa berikutnya. Model pertama yaitu sekolah modern, sedangkan model kedua yakni sekolah agama. Pada Masing-masing sekolah berdiri sendiri, tanpa memiliki hubungan satu sama lain. Pada sekolah agama tidak diberikan pelajaran ilmu pengetahuan modern yang berasal dari Barat sehingga perkembangan intelektual sedikit berkurang. Sedangkan pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, hanya diberikan ilmu pengetahuan Barat, tanpa memberikan ilmu pengetahuan agama.¹⁴¹ Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Muhammad Abduh pembaharuan pembelajaran islam di Indonesia mengalami beberapa model, yakni sekolah modern kemudian dilanjutkan dengan sekolah agama, hal tersebut membuktikan bahwa pembaharuan dalam pembelajaran islam di Indonesia tentu memiliki beberapa peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dalam zaman modernisasi.

b. Menurut Pandangan K.H Ahmad Dahlan

Beberapa Gerakan pembaruan Islam yang dilakukan oleh beliau K.H. Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan, terkhusus dalam bidang pendidikan Islam, sudah begitu banyak. Kita menengok kembali Kultur pendidikan Islam tradisional atau Pondok pesantren, yang membelenggu sebagian besar masyarakat Indonesia itulah yang hendak dibongkar oleh K.H. Ahmad Dahlan. Paradigma mengenai reformasi pendidikan Islam tentunya dibidikkan dalam ajang mengembalikan kemampuan pendidikan Islam untuk mengimbangi produk atau siswa sekolah Belanda. Menurut soebardi dan juga lee dikutip oleh Achmad Jainuri, K.H. Ahmad Dahlan sangat berkeinginan untuk mencetak "elit" muslim yang terdidik sekaligus memiliki identitas Islam yang kuat sehingga mampu memberikan bimbingan serta

¹⁴¹ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pembaruan pendidikan islam menurut muhammad abduh" Vol. XXVIII/No. 2/2013, H. 299

keteladanan terhadap masyarakat, sekaligus sebagai kekuatan untuk mengimbangi tantangan kaum elit sekuler berpendidikan Barat yang dihasilkan oleh sistem pendidikan Belanda.¹⁴²

Melalui K.H, Ahmad Dahlan, Usaha-usaha Muhammadiyah disamping mengembalikan ajaran Islam kepada sumbernya yaitu al-Qur'an serta Hadits, Muhammadiyah juga bertujuan meluaskan sekaligus mempertinggi pendidikan agama Islam secara modern serta memperteguh keyakinan tentang agama Islam, sehingga tercapailah masyarakat yang sebenar-benarnya. Untuk mencapai tujuan itu, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Masalah pendidikan serta pengajaran menjadi perhatian utama dari Muhammadiyah. Pada 30 Maret-2 April tahun 1923, Muhammadiyah secara mendalam membicarakan lembaga yang menentukan corak masyarakat dalam kemudian hari. Sebagai hasilnya pada tanggal 14 juli tahun 1923 berdirilah suatu badan yang diberi nama Majelis Pimpinan Pengajaran Muhammadiyah. Ketua pertama Majelis Pimpinan Pengajaran Muhammadiyah adalah Mas Ngabehi Joyosugito. Dalam dunia pendidikan sekaligus pengajaran Muhammadiyah telah mengadakan pembaruan pendidikan agama. Modernisasi dalam sistem pendidikan dijalankan dengan menukar sistem pondok pesantren dengan pendidikan modern sesuai dengan tuntutan dan kehendak zaman. Pengajaran agama Islam diberikan di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Muhammadiyah telah mendirikan sekolah-sekolah baik yang khas agama maupun yang bersifat umum.

c. Menurut Pandangan K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Perjalanan pendidikan khususnya pendidikan Islam di Indonesia selalu mempunyai problematika dalam

¹⁴² Sumarno, Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan); Jurnal Al Murabbi", Vol.3/No. 2/Januari 2017, H. 235

perkembangannya. Problematika pendidikan Islam di Indonesia di masa ini diantaranya yakni dikotomi, minimnya penelitian untuk pengembangan yang berimplikasi kepada lemahnya penguasaan sistem manajemen madrasah sekaligus metode pembelajaran. Problematika lain yang dihadapi oleh pendidikan Islam di Indonesia yaitu kesejahteraan guru, diskriminasi lembaga pendidikan Islam serta *outputnya* dan juga orientasi sertifikasi (ijazah). Problematika yang dihadapi oleh pendidikan Islam tersebut berimplikasi kepada lemahnya pengaruh pendidikan Islam dalam memajukan pendidikan di Indonesia.¹⁴³

Pemikiran yang cukup cemerlang dari *Maulana Al-Syaikh Zainuddin* dalam membangun sekaligus mengembangkan peradaban keilmuan Islam di Indonesia dapat menjadi refleksi dalam upaya mengatasi berbagai problematika yang dihadapi oleh pendidikan Islam pada masa kini. Problematika dikotomi ilmu agama serta ilmu umum sudah terjadi sejak dulu bahkan dihadapi oleh *Maulana Al-Syaikh Zainuddin* ketika beliau baru pulang dari Mekkah. Saat itu masyarakat di Lombok ketika berbicara pendidikan, maka yang lebih diutamakan yaitu pendidikan agama bahkan pendidikan umum dianggap tidak begitu penting. Akan tetapi kondisi saat ini justru terbalik, masyarakat lebih mementingkan ilmu umum dibandingkan dengan ilmu agama. Sikap dikotomis ini merupakan sikap yang dapat menghambat perkembangan Islam.

3. Urgensi pembaharuan Pembelajaran Islam di Indonesia

Pembaharuan pembelajaran islam di Indonesia merupakan hal yang bersifat keniscayaan yang tidak bias dihindari. Sebab pembaharuan sendiri tidak semata-merta hanya karena memodernkan pembelajaran islam di Indonesia, akan tetapi juga menselaraskan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum agar keduanya saling beriringan dan tidak saling menjatuhkan. Pembelajaran islam di Indonesia begitu

¹⁴³ Adet Tamula Anugrah, "Pembaharuan pendidikan islam di indonesia perspektif tdk.h. muhammad zainuddin abdul madjid ;Jurnal Pendidikan Islam", Volume 14/ Nomor 2/Agustus 2021, H. 115

memperhatikan multikultural yang sudah membudaya, dengan ragam suku, ragam agama, serta raga budaya, islam begitu memperhatikan kesetaraan dalam hidup sosial serta pembelajaran spiritual. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran islam di Indonesia dapat menghasilkan kepribadian manusia dalam bersosial yang lebih efektif, menghasilkan pola pikir manusia dalam berinteraksi yang lebih inovatif.

Sebagai pelajar atau mahasiswa tentunya penulis akan memberikan rekomendasi bagaimana pembaharuan pembelajaran islam yang terjadi di Indonesia. Dari cara menyikapinya yaitu kita bersama telah menyadari bahwa pembaharuan akan terjadi ketika sesuatu hal mengalami peralihan tujuan serta target, seperti halnya tujuan pendidikan yang semakin lama semakin adanya kemajuan dalam memeprolehnya, ketia itupun maka pembaharuan akan senantiasa terjadi. Dengan demikian tidak dapat dikatakan mustahil bahwa pembaharuan pembelajaran islam di Indonesia mengalami tahapan-tahapan yang sudah terjadi. Dengan begitu sebagai pelajar tentunya memberikan upaya serta daya yang ada dalam diri serta jiwa untuk menyikapi dengan positif pembaharuan yang terjadi.

C. Kesimpulan

Pembaharuan merupakan sesuatu yang dilakukan secara efektif, efisien, serta produktif dalam menuju kepada kemajuan. Pembaharuan yang dimaksud mencakup pembaharuan di dalam pendidikan maupun pembelajaran islam di Indonesia, yaitu meliputi suatu perubahan yang baru serta sengaja diusahakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Pembaharuan pendidikan mencakup beberapa aspek antara lain yaitu; pembaharuan dalam aspek tujuan pendidikan, pembaharuan dalam aspek kurikulum, pembaharuan dalam aspek pendidik, serta pembaharuan dalam aspek peserta didik. Pembaharuan tersebut berorientasi untuk menghasilkan sosok peserta didik yang ideal, yakni berkualitas, profesional, mumpuni di bidangnya masing-masing, berkemauan keras, memiliki motivasi yang tinggi, sabar, tabah, dan tidak mudah putus asa.

Sebagai pelajar tentunya memberikan kontribusi sebisa mungkin dalam menyikapi pembaharuan yang terjadi, untuk itu bagi pengelola pendidikan yang berbasis agama tentunya akan mendapat banyak kepercayaan dari masyarakat agar dapat membimbing putra-putri nya agar menjadi solih serta solihah. Dengan begitu sepatutnya sebagai lembaga pendidikan islam serta masyarakat diruang lingkup lembaga pendidikan islam harus sama-sama memberikan kontribusi untuk memaksimalkan pembaharuan pembelajaran islam di Indonesia.

D. Daftar Pustaka

Adet Tamula Anugrah, "Pembaharuan pendidikan islam di indonesia perspektif tdk.h. muhammad zainuddin abdul madjid ;Jurnal Pendidikan Islam", Volume 14/Nomor 2/Agustus 2021.

Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pembaruan pendidikan islam menurut muhammad abduh" Vol. XXVIII/No. 2/2013.

A. Mukti Ali, *Beberapa Masalah Pendidikan di Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1971).

Azyumardi Azra, "*Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan,*" dalam Nurcholih Madjid, *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997).

Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980).

Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005).

M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1987)

Sumarno, *Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan); Jurnal Al Murabbi*", Vol.3/No. 2/Januari 2017.

Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum.*

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Yusuf Al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*. Penerjemah Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).
- Zaenudin, “Pembaharuan sistem pendidikan islam;Jurnal Pendidikan dan Studi Islam”, Vol . 1 /No. 1/Desember 2015.

BAGIAN XV

PENDIDIKAN ISLAM DALAM TANTANGAN DAN HARAPAN DI INDONESIA

Siti Khusnul Khotimah

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah sesuatu yang dapat mengembangkan potensi masyarakat, mampu menumbuhkan kemauan, serta membangkitkan nafsu generasi bangsa untuk menggali berbagai potensi, dan mengembangkannya secara optimal bagi kepentingan pembangunan masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Pada dasarnya, Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pijakan yang jelas tentang tujuan dan hakikat pendidikan, yakni memberdayakan potensi fitrah manusia yang condong kepada nilai-nilai kebenaran dan kebajikan agar ia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba Allah¹⁴⁴

Oleh karena itu, pendidikan berarti suatu proses membina seluruh potensi manusia sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa berfikir dan berkarya, untuk kemaslahatan diri dan lingkungannya. Agama Islam adalah panduan dan pedoman hidup manusia di dunia hingga di akhirat nanti. Agama Islam bukan sekedar agama seperti yang kita pahami selama ini, tetapi meliputi seluruh aspek dalam kebutuhan hidup manusia. Ilmu dalam Islam meliputi semua aspek ini yang bisa disusun secara hierarkis dari benda mati, tumbuhan, hewan, manusia hingga makhluk gaib dan puncak kegaiban. susunan ilmu tentang banyak aspek ini bisa dikaji dari pemikiran Islam.¹⁴⁵

Islam mewajibkan umatnya supaya menjadi umat yang terpelajar dan berpendidikan. Diharapkan orang yang berpendidikan di era global sekarang ini akan semakin

¹⁴⁴ Al-Ghazali, Muhammad. 1995. *Akhlak Seorang Muslim*. Bandung: PT. Al Maarif.1995)

¹⁴⁵ Mulyasa, Enco. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011

meningkat¹⁴⁶, sedangkan orang yang tidak berpendidikan akan berkurang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Pendidikan Islam membimbing anak didiknya dalam perkembangan dirinya, baik jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian dan akhlak yang mulia.

B. Pembahasan

Ajaran Islam mewajibkan umat pemeluknya supaya sanggup menjadi umat yang terpelajar, di mana jumlah orang yang berpendidikan harus semakin meningkat, sedangkan jumlah orang yang tidak berpendidikan akan terus berkurang dan akhirnya lenyap.¹⁴⁷

1. Hakikat Pendidikan Agama Islam

Pendidikan adalah proses mempersiapkan masa depan anak didik dalam mencapai tujuan hidup secara efektif dan efisien Pendidikan merupakan istilah yang mudah diucapkan tetapi sulit didefinisikan. Kesulitan ini, menurut Tafsir, dikarenakan banyaknya jenis kegiatan yang dapat disebut sebagai kegiatan pendidikan dan luasnya aspek yang dibina oleh pendidikan hakikat pendidikan tidak terlepas dari hakikat manusia, karena secara ontologis adanya manusia Berbeda dari pendidikan pada umumnya yang dibangun atas dasar konsep manusia dalam basis filosofinya masing-masing, pendidikan Islam dibangun dengan berangkat dari konsep manusia dalam basis Islam.¹⁴⁸

Dalam pandangan Islam, manusia adalah “*khalifatullah*” di muka bumi Oleh karenanya, manusia dibekali oleh Allah dengan segenap potensi sebagai bekal kekhalifahannya. Potensi tersebut terwujud dalam dua bentuk yaitu kecenderungan ke hal hal yang positif dan kecenderungan ke hal-hal yang negatif. Beberapa potensi yang pendidikan. Diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dijadikan sebagai makhluk yang mulia,

¹⁴⁶ Gani Ali, Hasmiyati. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Quantum Teaching Ciputat Press Group, 2008

¹⁴⁷ Al-Ghazali, Muhammad. *Akhlak Seorang Muslim*. Bandung: PT. Al Maarif, 1995

¹⁴⁸ Mulyasa, Enco. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011

menurut fitrahnya ia adalah makhluk religius, merdeka dan bertanggung jawab, mempunyai kapasitas intelegensia yang paling tinggi, tidak semata-mata terangsang oleh motivasi duniawi saja tetapi dalam banyak hal manusia mengejar tujuan yang “*ultimate*”, yakni keridloan Allah.¹⁴⁹

Sedangkan beberapa potensi yang negatif antara lain adalah amat *dzalim* dan amat bodoh bersifat tergesa-gesa, bersifat lemah, selalu tidak berterima kasih, sombong ketika mendapat kesenangan dan berputus asa ketika mendapat kesusahan, suka membantah, melampaui batas, bersifat keluh kesah dan kikir.¹⁵⁰

Pendidikan Islam adalah suatu aktivitas pendidikan yang berangkat dari konsep manusia seperti di atas. Pendidikan agama Islam, pada hakekatnya adalah usaha untuk mengarahkan, membimbing semua aspek (potensi) yang ada pada manusia secara optimal Pendidikan agama Islam menurut para tokoh ialah sebagai berikut:

Pertama, menurut Ahmadi, pendidikan agama Islam adalah segala usaha untuk memelihara fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*insan kamil*) yang sesuai dengan norma Islam.

Kedua, menurut Syekh Musthafa Al-Ghulayani, pendidikan adalah upaya menanamkan akhlak mulia dalam jiwa murid serta menyiraminya dengan petunjuk dan nasehat, sehingga menjadi kecenderungan jiwa yang membuahkan keutamaan kebaikan serta cinta belajar yang berguna bagi tanah air.¹⁵¹

Dalam definisi di atas terlihat jelas bahwa pendidikan agama Islam membimbing anak didik dalam perkembangan dirinya, baik jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama pada anak didik nantinya yang

¹⁴⁹ Haidar, Putra Dauly. *Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana.2004.

¹⁵⁰ Isma'il SM. *Strategi Pembelajaran Islam Berbasis PAIKEM: Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan*. Semarang: Rasail.2008

¹⁵¹ Muhaimin. *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai benang kusut dunia pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2006

didasarkan pada hukum-hukum Secara sederhana pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran dan al-Hadits serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktik sejarah umat Islam.

2. Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam

Samsul Nizar membagi dasar pendidikan agama Islam menjadi tiga sumber, yaitu sebagai berikut:

- a. Al-quran. Al-qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab guna menjalankan jalan hidup yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia (*rahmatan lil 'alamin*), baik di dunia maupun di akhirat Pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu pada sumber yang termuat dalam Al Qur'an. Dengan berpegang pada nilai-nilai tertentu dalam Al Qur'an terutama dalam pelaksanaan pendidikan Islam umat Islam akan mampu mengarahkan dan mengantarkan umat manusia menjadi kreatif dan dinamis serta mampu mencapai esensi nilai-nilai *ubudiyah* kepada *Khaliknya*.¹⁵²
- b. Sunnah Keberadaan Sunnah Nabi tidak lain adalah sebagai penjelas dan penguat hukum-hukum yang ada didalam Al Qur'an, sekaligus sebagai pedoman bagi kemaslahatan hidup manusia dalam semua aspeknya. Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan penjelasan Nabi dari pesan-pesan *illahiyah* yang tidak terdapat didalam Al Qur'an, maupun yang terdapat didalam Al qur'an tetapi masih memerlukan penjelasan lebih lanjut secara terperinci
- c. Ijtihad Pentingnya ijtihad tidak lepas dari kenyataan bahwa pendidikan Islam di satu sisi dituntut agar senantiasa sesuai dengan dinamika zaman dan IPTEK yang berkembang dengan cepat. Sementara disisi lain, dituntut agar tetap mempertahankan kekhasannya sebagai sebuah sistem

¹⁵² Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai agama. Ini merupakan masalah yang senantiasa menuntut mujtahid Muslim di bidang pendidikan untuk selalu berjihad sehingga teori pendidikan Islam senantiasa relevan dengan tuntutan zaman dan kemajuan IPTEK¹⁵³

3. Tujuan Pendidikan Islam

Menurut Muhammad Fadhil al-Jamaly, tujuan pendidikan Islam menurut Al Qur'an meliputi

- a. menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia di antara makhluk Allah lainnya dan tanggung jawabnya dalam kehidupan ini
- b. menjelaskan hubungannya sebagai makhluk sosial dan tanggung jawabnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat
- c. menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya untuk mengetahui hikmah penciptaan dengan cara memakmurkan alam semesta
- d. menjelaskan hubungannya dengan Khalik sebagai pencipta alam semesta.

Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan yang terbagi menjadi tiga hal. Pertama, Pendidikan Islam sebagai lembaga diakuinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Kedua, Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ketiga, Pendidikan Islam sebagai nilai (*value*) yakni ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan walaupun demikian, pendidikan Islam tidak luput dari problematika yang muncul di era global ini. Terdapat dua faktor dalam problematika tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.¹⁵⁴

¹⁵³ Musthofa, Rembangy. *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*. Yogyakarta: Teras.2010

¹⁵⁴ Rohman. Abdul. *Pendidikan Integralistik Mengganggu Konsep Manusia dalam Pemikiran Ibn Khaldun*. Semarang walisongo,2009

Pertama Faktor Internal

- a. Relasi Kekuasaan dan Orientasi Pendidikan Islam. Tujuan pendidikan pada dasarnya hanya satu, yaitu memanusiakan manusia, Tujuan pendidikan pada dasarnya hanya satu, yaitu memanusiakan manusia, atau mengangkat harkat dan martabat manusia atau *human dignity*, yaitu menjadi khalifah di muka bumi dengan tugas dan tanggung jawab memakmurkan kehidupan dan memelihara lingkungan. Tujuan pendidikan yang selama ini diorientasikan memang sangat ideal bahkan, lantaran terlalu ideal, tujuan tersebut tidak pernah terlaksana dengan baik. Orientasi pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan secara nasional, barangkali dalam konteks era sekarang ini menjadi tidakmenentu, atau kabur kehilangan orientasi mengingat adalah tuntutan pola kehidupan pragmatis dalam masyarakat indonesia. Hal ini patut untuk dikritisi bahwa globalisasi bukan semata mendatangkan efek positif, dengan kemudahan kemudahan yang ada, akan tetapi berbagai tuntutan kehidupan yang disebabkan olehnya menjadikan disorientasi pendidikan. Pendidikan cenderung berpijak pada kebutuhan pragmatis, atau kebutuhan pasar lapangan, kerja, sehingga ruh pendidikan Islam sebagai pondasi budaya, moralitas, dan *social movement* (gerakan sosial) menjadi hilang
- b. Masalah Kurikulum. Sistem sentralistik terkait erat dengan birokrasi atas bawah yang sifatnya otoriter yang terkesan pihak bawah harus melaksanakan seluruh keinginan pihak atas Dalam sistem yang seperti ini inovasi dan pembaruan tidak akan muncul. Dalam bidang kurikulum sistem sentralistik ini juga mempengaruhi output pendidikan. Tilaar menyebutkan kurikulum yang terpusat, penyelenggaraan sistem manajemen yang dikendalikan dari atas telah menghasilkan output pendidikan manusia robot. Selain kurikulum yang sentralistik, terdapat pula beberapa kritikan kepada praktik pendidikan berkaitan dengan saratnya kurikulum sehingga seolah-olah kurikulum itu kelebihan muatan. Hal ini mempengaruhi juga kualitas pendidikan. Anak-anak terlalu banyak dibebani oleh mata pelajaran Dalam realitas sejarahnya, pengembangan kurikulum Pendidikan Islam tersebut mengalami perubahan-

perubahan paradigma, walaupun paradigma sebelumnya tetap dipertahankan.

Hal ini dapat dicermati dari fenomena berikut:

- 1) perubahan dari tekanan pada hafalan dan daya ingat tentang teks-teks dari ajaran-ajaran agama Islam, serta disiplin mental spiritual sebagaimana pengaruh dari timur tengah, kepada pemahaman tujuan makna dan motivasi beragama Islam untuk mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan Islam.
 - 2) perubahan dari cara berfikir tekstual, normatif, dan absolutis kepada cara berfikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaranajaran dan nilai-nilai Islam.
 - 3) perubahan dari tekanan dari produkatau hasil pemikiran keagamaan Islam dari para pendahulunya kepada proses atau metodologinya sehingga menghasilkan produk tersebut perubahan dari pola pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang hanya mengandalkan pada para pakar dalam memilih dan menyusun isi kurikulum pendidikan Islam ke arah keterlibatan yang luas dari para pakar, guru, peserta didik, masyarakat untuk mengidentifikasi tujuan Pendidikan Islam dan cara-cara mencapainya.
- c. Pendekatan/Metode Pembelajaran. Peran guru atau dosen sangat besar dalam meningkatkan kualitas kompetensi siswa/mahasiswa. Dalam mengajar, ia harus mampu membangkitkan potensi guru, memotifasi, memberikan suntikan dan menggerakkan siswa/mahasiswa melalui pola pembelajaran yang kreatif dan kontekstual (konteks sekarang menggunakan teknologi yang memadai). Pola pembelajaran yang demikian akan menunjang tercapainya sekolah yang unggul dan kualitas lulusan yang siap bersaing dalam arus perkembangan zaman. Siswa atau mahasiswa bukanlah manusia yang tidak memiliki pengalaman. Sebaliknya, berjuta-juta pengalaman yang cukup beragam ternyata ia miliki. Oleh karena itu, dikelas pun siswa/mahasiswa harus kritis membaca kenyataan kelas, dan siap mengkritisnya. Bertolak dari kondisi ideal tersebut, kita menyadari, hingga sekarang ini siswa masih banyak yang

- senang diajar dengan metode yang konservatif, seperti ceramah atau didikte karena lebih sederhana dan tidak ada tantangan untuk berfikir.
- d. Profesionalitas dan Kualitas SDM. Salah satu masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia sejak masa Orde Baru adalah profesionalisme guru dan tenaga pendidik yang masih belum memadai. Secara kuantitatif, jumlah guru dan tenaga kependidikan lainnya agaknya sudah cukup memadai, tetapi dari segi mutu dan profesionalisme masih belum memenuhi harapan. Banyak guru dan tenaga kependidikan masih *unqualified*, *underqualified*, dan *mismatch*, sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar kualitatif
 - e. Biaya Pendidikan. Faktor biaya pendidikan adalah hal penting, dan menjadi persoalan tersendiri yang seolah-olah menjadi kabur mengenai siapa yang bertanggung jawab atas persoalan ini. Terkait dengan amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam UUD 45 hasil amandemen, serta UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang memerintahkan negara mengalokasikan dana minimal 20% dari APBN dan APBD di masing-masing daerah, namun hingga sekarang belum terpenuhi. Bahkan, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan genap 20% hingga tahun 2009 sebagaimana yang dirancang dalam anggaran strategis pendidikan.¹⁵⁵

Kedua Faktor Eksternal

- a. Dikotomi Masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan Islam adalah dichotomy dalam beberapa aspek yaitu antara Ilmu Agama dengan Ilmu Umum, antara Wahyu dengan Akal setara antara Wahyu dengan Alam. Munculnya problem dikotomi dengan segala perdebatannya telah berlangsung sejak lama. Boleh dibilang gejala ini mulai tampak pada masa-masa pertengahan. Rahman, dalam melukiskan watak ilmu pengetahuan Islam zaman pertengahan, menyatakan munculnya persaingan yang tak

¹⁵⁵ Tantowi, Ahmad. *Pendidikan Islam di Era Transformasi Global*. Semarang : Pustaka Rizki Putra. 2009

- berhenti antara *hukum* dan *teologi* untuk mendapat julukan sebagai mahkota semua ilmu.
- b. Too General Knowledge. Kelemahan dunia pendidikan Islam berikutnya adalah sifat ilmu pengetahuannya yang masih terlalu general/umum dan kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah (*problem solving*). Produk-produk yang dihasilkan cenderung kurang membumi dan kurang selaras dengan dinamika masyarakat. Menurut Syed Hussein Alatas menyatakan bahwa, kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan, mendefinisikan, menganalisis dan selanjutnya mencari jalan keluar/pemecahan masalah tersebut merupakan karakter dan sesuatu yang mendasar kualitas sebuah intelektual. Ia menambahkan, ciri terpenting yang membedakan dengan non-intelektual adalah tidak adanya kemampuan untuk berfikir dan tidak mampu untuk melihat konsekuensinya.
 - c. Lack of Spirit of Inquiry. Persoalan besar lainnya yang menjadi penghambat kemajuan dunia pendidikan Islam ialah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian/penyelidikan. Syed Hussein Alatas merujuk kepada pernyataan *The Spiritus Rector* dari Modernisme Islam, Al Afghani, Menganggap rendahnya “*The Intellectual Spirit*” (semangat intelektual) menjadi salah satu faktor terpenting yang menyebabkan kemunduran Islam di Timur Tengah.
 - d. Memorisasi. Rahman menggambarkan bahwa kemerosotan secara gradual dari standar-standar akademis yang berlangsung selama berabad-abad tentu terletak pada kenyataan bahwa, karena jumlah buku-buku yang tertera dalam kurikulum sedikit sekali, maka waktu yang diperlukan untuk belajar juga terlalu singkat bagi pelajar untuk dapat menguasai materimateri yang seringkali sulit untuk dimengerti, tentang aspek-aspek tinggi ilmu keagamaan pada usia yang relatif muda dan belum matang. Hal ini pada gilirannya menjadikan belajar lebih banyak bersifat *studi tekstual* daripada *pemahaman* pelajaran yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan dorongan untuk belajar dengan sistem hafalan (*memorizing*) daripada pemahaman yang sebenarnya. Kenyataan menunjukkan bahwa abad-abad pertengahan yang akhir hanya menghasilkan sejumlah besar

karya-karya komentar dan bukan karya-karya yang pada dasarnya orisinal.

- e. Certificate Oriented. Pola yang dikembangkan pada masa awal-awal Islam, yaitu thalab al'ilm, telah memberikan semangat dikalangan muslim untuk gigih mencari ilmu, melakukan perjalanan jauh, penuh resiko, guna mendapatkan kebenaran suatu hadits, mencari guru diberbagai tempat, dan sebagainya. Hal tersebut memberikan isyarat bahwa karakteristik para ulama muslim masa-masa awal didalam mencari ilmu adalah knowledge oriented. Sehingga tidak mengherankan jika pada masa-masa itu, banyak lahir tokoh-tokoh besar yang memberikan banyak kontribusi berharga, ulama-ulama encyclopedic, karya-karya besar sepanjang masa. Sementara, jika dibandingkan dengan pola yang ada pada masa sekarang dalam mencari ilmu menunjukkan kecenderungan adanya pergeseran dari knowledge oriented menuju certificate oriented semata. Mencari ilmu hanya merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah saja, sedangkan semangat dan kualitas keilmuan menempati prioritas berikutnya ¹⁵⁶

Solusi dan Problematika Pendidikan Islam di Era Global

Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Pendidikan tidak mungkin menisbikan proses globalisasi yang akan mewujudkan masyarakat global ini. Dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan, dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif, dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global demokratis. Untuk itu, pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab.

Di samping itu, pendidikan harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakatnya dengan segala faktor

¹⁵⁶ Wahid. Abdul. *Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam*. Semarang: Need's Pres, 2008

yang dapat mendukung mencapai sukses ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pendidikan yang berwawasan global. Selain itu, program pendidikan harus diperbaharui, dibangun kembali atau dimodernisasi sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dipikulkan kepadanya. Sedangkan solusi pokok menurut Rahman adalah pengembangan wawasan intelektual yang kreatif dan dinamis dalam sinaran dan terintegrasi dengan Islam harus segera dipercepat prosesnya.

Sementara itu, menurut Tibi, solusi pokoknya adalah *secularization*, yaitu industrialisasi sebuah masyarakat yang berarti diferensiasi fungsional dari struktur sosial dan sistem keagamaannya. Berbagai macam tantangan tersebut menuntut para pengelola lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam untuk melakukan *nazhar* atau perenungan dan penelitian kembali apa yang harus diperbuat dalam mengantisipasi tantangan tersebut, model-model pendidikan Islam seperti apa yang perlu ditawarkan di masa depan, yang sekiranya mampu mencegah dan atau mengatasi tantangan tersebut.

Melakukan *nazhar* dapat berarti *at-taammul wa al-fahsh*, yakni melakukan perenungan atau menguji dan memeriksanya secara cermat dan mendalam, dan bias berarti *taqlib al-bashar wa al-bashirah li idrak al-syai' wa ru'yatihi*, yakni melakukan perubahan pandangan (cara pandang) dan cara penalaran (kerangka pikir) untuk menangkap dan melihat sesuatu, termasuk di dalamnya adalah berpikir dan berpandangan alternatif serta mengkaji ide-ide dan rencana kerja yang telah dibuat dari berbagai perspektif guna mengantisipasi masa depan yang lebih baik¹⁵⁷

Berbagai Isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam

- a. Politik Pemerintah terhadap Pendidikan Islam di Indonesia.
Sejak kedatangannya di Indonesia Islam telah menggunakan dakwah dan pendidikan sebagai sarana untuk

¹⁵⁷ Zamroni. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Jogjakarta: Gigraf Publishing, 2000.

mensosialisasikannya ke tengah-tengah masyarakat. Dalam proses sosialisasi Islam melalui pendidikan tersebut, selain dilakukan oleh masyarakat sendiri, juga dilakukan oleh pemerintah, atau sekurang-kurangnya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dalam kaitan ini maka munculah apa yang disebut sebagai politik pendidikan. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka politik pendidikan mengandung lima hal sebagai berikut. **Pertama**, politik pendidikan mengandung kebijakan pemerintah suatu negara, sebuah pemerintah negara dalam berkomunikasi dengan rakyatnya biasanya menggunakan berbagai kebijakan. **Kedua**, politik pendidikan bukan hanya berupa peraturan perundangan yang tertulis, melainkan juga termasuk kebijakan lainnya, misalnya situasi dan kondisi sosial politik, sosial budaya, keamanan atau hubungan pemerintah dengan dunia internasional meskipun situasi dan kondisi tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan pendidikan. **Ketiga**, politik pendidikan ditujukan untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan. **Keempat**, politik pendidikan dijalankan demi tercapainya tujuan negara, karena tujuan negara menjadi sasaran utama dalam penyelenggaraan pendidikan, maka segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh melenceng dari tujuan negara. **Kelima**, politik pendidikan merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan suatu negara. Sistem penyelenggaraan ini berangkat dari tujuan negara, dilanjutkan dengan penentuan atau pengambilan kebijakan yang harus diimplementasikan dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan bermuara pada pencapaian tujuan negara. Berdasarkan lima hal tersebut di atas, maka politik pendidikan tidak dapat dilepaskan dari politik pemerintahan yang diterapkan pada suatu negara. Di dalamnya terkandung berbagai kebijakan atau keputusan pemerintah yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pendidikan.

- b. *Kurangnya jam pelajaran agama di sekolah-sekolah.* Salah satu masalah yang sering dikemukakan para pengamat pendidikan Islam adalah adanya kekurangan jam pelajaran untuk pengajaran agama Islam yang disediakan di sekolah-sekolah umum, seperti sekolah dasar, sekolah menengah

umum dan seterusnya. Masalah inilah yang dianggap sebagai penyebab utama timbulnya kekurangan para pelajar dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Sebagai akibat dari kekurangan ini, para pelajar tidak memiliki bekal yang memadai untuk membentengi dirinya dari berbagai pengaruh negatif akibat globalisasi yang menerpa kehidupan. Banyak pelajar yang terlibat dalam perbuatan yang kurang terpuji seperti tawuran, pencurian, penodongan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, solusi yang ditawarkan antara lain dengan menambah jumlah jam pelajaran agama di sekolah dan dengan menambah waktu untuk memberikan perhatian, kasih sayang, bimbingan dan pengawasan dari kedua orang tua di rumah. Namun masalahnya bagaimana andaikata solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah ini tidak dapat dilaksanakan. jawabnya adalah dengan mencari solusi lain yang mungkin dilakukan.

- c. *Quantum Teaching dalam Perspektif Pendidikan Islam.* Penguasaan terhadap metodologi pengajaran adalah merupakan salah satu persyaratan bagi seorang tenaga pendidik yang profesional. Berbagai pakar pendidikan seperti Mahmud Yunus pernah mengatakan bahwa penguasaan terhadap metodologi pengajaran jauh lebih penting dari pada pemberian materi pelajaran (*al-thariqah ahammu min al-madah*). Pendapatnya ini didasarkan pada hasil pengamatannya terhadap *output* (lulusan) pendidikan pesantren yang dikatakannya bahwa dari seratus santri, ternyata yang menjadi kyai hanya satu orang. Lulusan pesantren yang telah menghabiskan waktunya yang cukup lama memang diakui dapat menguasai secara baik dan mendalam terhadap berbagai teori ketata bahasaan (gramatika), seperti *ilmu nahwu* (ilmu yang mempelajari perubahan kalimat), *ilmusharaf* (ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata), *ilmu balaghah* (ilmu yang mempelajari cara-cara menyampaikan kalimat secara singkat namun efektif) dan ilmu-ilmu alat lainnya. *Quantum Teaching* adalah badan ilmu pengetahuan dan metodologi yang digunakan dalam rancangan, penyajian dan fasilitas *supercamp*. Diciptakan berdasarkan teori-teori pendidikan

seperti *Accelerated Learning* (Lozanov), *multiple intelligence* (Gardner) dan lainnya. *Quantum Teaching* merangkaikan yang paling baik dari yang terbaik menjadi sebuah paket multisensori, multi kecerdasan dan *kompatibel* dengan otak, yang pada akhirnya akan melejitkan kemampuan guru untuk mengilhami dan kemampuan murid untuk berprestasi. Sebagai sebuah pendekatan belajar yang segar, mengalir, praktis dan mudah diterapkan. *Quantum Teaching* menawarkan suatu sintesis dari hal yang dicari, atau cara-cara baru untuk memaksimalkan dampak usaha pengajaran yang dilakukan guru melalui perkembangan hubungan, perubahan belajar, dan penyampaian kurikulum. *Quantum Teaching* yang dibangun berdasarkan teori-teori tersebut mencakup petunjuk spesifik untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, merancang kurikulum, menyampaikan isi, dan memudahkan proses belajar. *Quantum Teaching* berdasarkan pada konsep Bawalah Dunia Mereka ke Dunia Kita dan Antarkan Dunia Kita ke Dunia Mereka, inilah asas utama, alasan dasar yang berada di balik segala strategi, model dan keyakinan *Quantum Teaching*. Melalui *Quantum Teaching* ini, seorang guru akan mempengaruhi kehidupan murid. Dari kerangka konseptual tentang langkah-langkah pengajaran dalam *Quantum Teaching* tersebut terlihat adanya empat ciri sebagai berikut. **Pertama**, adanya unsur demokrasi dalam pengajaran. Hal ini terlihat bahwa dalam *Quantum Teaching* terdapat unsur kesempatan yang luas kepada seluruh siswa untuk terlibat aktif dan partisipasi dalam tahapantahapan kajian terhadap suatu mata pelajaran. **Kedua**, sebagai akibat dari ciri yang pertama, maka kemungkinan tergali dan terekpresikannya seluruh potensi dan bakat yang terdapat pada diri si anak. **Ketiga**, adanya kepuasan pada diri si anak. Hal ini terlihat dari adanya pengakuan terhadap temuan dan kemampuan yang ditunjukkan oleh si anak. **Keempat**, adanya unsur pemantapan dalam menguasai materi atau suatu keterampilan yang diajarkan. Hal ini terlihat dari adanya pengulangan terhadap sesuatu yang sudah dikuasai si anak. **Kelima**, adanya unsur kemampuan pada seorang guru dalam merumuskan temuan yang dihasilkan si anak, dalam bentuk

konsep, teori, model dan sebagainya. Secara eksplisit dalam Ilmu Pendidikan Islam belum dijumpai rumusan teori pengajaran yang mirip dengan *Quantum Teaching*. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat Ilmu pendidikan Islam terlambat perkembangannya dibandingkan dengan Ilmu – Ilmu ke-Islaman lainnya seperti Fiqh, Ilmu kalam, Tafsir, Hadits dan sebagainya. Di dalam *Quantum Teaching* terdapat lima prinsip, yaitu 1) segalanya berbicara, 2) segalanya bertujuan, 3) pengalaman sebelum pemberian nama, 4) akui setiap usaha, dan 5) rayakan jika layak dirayakan. Kelima prinsip yang terdapat dalam *Quantum Teaching* ini terdapat dalam ajaran Islam.

- d. *Peranan Pendidikan Islam Dalam Menumbuhkan Kecerdasan Emosional*. Dunia pendidikan saat ini sering dikritik oleh masyarakat yang disebabkan karena adanya sejumlah pelajar dan lulusan pendidikan tersebut yang menunjukkan sikap yang kurang terpuji. Banyak pelajar yang terlibat tawuran, melakukan tindakan kriminal, pencurian, penodongan, penyimpangan seksual, narkoba dan lainnya. Di antara penyebab dunia pendidikan kurang mampu menghasilkan lulusannya yang diharapkan adalah karena dunia pendidikan selama ini hanya membina kecerdasan intelektual wawasan dan keterampilan semata, tanpa diimbangi dengan membina kecerdasan emosional.

C. Kesimpulan

Ajaran agama Islam mewajibkan umat pemeluknya supaya sanggup menjadi umat yang terpelajar, di mana jumlah orang yang berpendidikan harus semakin meningkat, sedangkan umlah orang yang tidak berpendidikan akan terus berkurang dan akhirnya lenyap. Pendidikan adalah proses mempersiapkan masa depan anak didik dalam mencapai tujuan hidup secara efektif dan efisien. Pendidikan Islam membimbing anak didik dalam perkembangan dirinya, baik jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama pada anak didik nantinya. Yang didasarkan pada hukum-hukum Islam.

D. Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Muhammad. *Akhlak Seorang Muslim*. Bandung: PT. Al Maarif.1995.
- Gani Ali, Hasmiyati. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Quantum Teaching Ciputat Press Group.2008.
- Haidar, Putra Daulay. *Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana.2004.
- Isma'il SM. *Strategi Pembelajaran Islam Berbasis PAIKEM: Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan* Semarang: Rasail,2008.
- Muhaimin. *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai benang kusut dunia pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2006.
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2007.
- Mulyasa, Enco. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.
- Tantowi. Ahmad. *Pendidikan Islam di Era Transformasi Global*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.2009.
- Wahid. Abdul. *Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam*. Semarang: Need's Press.2008.
- Zamroni. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Jogjakarta: Gigraf Publishing. 2000.

BAGIAN XVI

PENDIDIKAN WANITA DALAM SEJARAH ISLAM DI INDONESIA

Afifuddin Ahmad Robbani

A. Pendahuluan

Disadari bahwa tidak banyak untuk tidak dikatakan tidak ada dari beberapa tokoh perempuan yang lahir dalam lembar sejarah dunia Islam, khususnya setelah masa Rasulullah SAW serta para shahabatnya, maka pertanyaan ini penting diketengahkan. Posisi perempuan pada masa periode awal Islam ikut terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat sekaligus berperan dalam bidang tidak hanya dalam wilayah domestik, akan tetapi dalam masalah publik juga kian tenggelam di tengah puncak kejayaan Islam, dan juga semakin terpuruk dalam masa dominasi Eropa pada belahan dunia muslim, membuat pertanyaan tersebut di atas semakin membutuhkan sebuah jawaban.

Jika meninjau dalam konteks historis pendidikan Islam, sebenarnya secara jelas bahwa dalam pendidikan Islam tidak membedakan antara peran laki-laki dengan perempuan, keduanya memiliki kesamaan hak serta peranannya dalam pendidikan Islam, hal ini dapat kita tinjau dari beberapa literatur. Ajaran Islam memandang bahwa laki-laki serta wanita mempunyai porsi yang sama dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba. Untuk sampai pada derajat *Muttaqun* atau orang-orang yang bertaqwa, untuk dapat mencapai derajat ini Islam tidak membedakan antara jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan maupun membedakan suku bangsa atau jenis etnis tertentu.

Dalam ranah pendidikan secara global, tidak dapat dipisahkan dengan isu-isu kesetaraan gender, terutama kesetaraan antara laki-laki dalam bidang pendidikan, gerakan emansipasi perempuan secara terus menerus meyuarkan suaranya agar perempuan mendapatkan kesetaraan serta

persamaan hak dalam bidang pendidikan, dan juga perempuan bisa memperoleh serta berkiprah dalam dunia pendidikan.

B. Pembahasan

1. Pendidikan Wanita pada Masa Awal Islam

Dalam sejarah Islam, ada beberapa hal yang berbeda dalam gambaran arus utama gender dalam komunitas muslim saat ini, yaitu munculnya actor atau tokoh perempuan penyebab suksesnya dakwah Nabi Saw., yaitu Khadijah Ra, istri dari Nabi. Dalam sejarah Islam, posisi Khadijah R.A, sangat dibutuhkan. beliau memiliki peran sangat penting dalam rentang proses Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Kemapanan Khadijah R.A, membuat Nabi lebih ringan dalam proses menjelang pewahyuan sampai proses penyampaian wahyu kepada umat-umatnya. Sudah cukup umum diketahui besarnya peran yang dimainkan oleh para istri Nabi Muhammad SAW serta para sahabat perempuan dalam kancah kehidupan. Khususnya dalam mentransmisikan hadits Nabi SAW, sehingga nama mereka terukir dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa itu, belum ada klasifikasi ilmu sebagaimana terjadi pada zaman atau masa selanjutnya, maka seorang tokoh boleh jadi memperhatikan berbagai bidang sekaligus. Semisal selain tokoh istri Nabi Khadijah Ra adalah *Umm al-Mukminin* Aisyah R.A. di samping beliau adalah seorang ahli Hadits Beliau juga sebagai ahli Fiqh serta Tafsir. Terdapat persamaan serta kesempatan menuntut ilmu dalam dunia pendidikan islam masa Nabi antara kaum perempuan dengan laki-laki. Hal itu bisa diperhatikan dari *asbabun nuzul* al-Quran serta *asbabul wurud* al Hadits yang sebelumnya terdapat permasalahan yang dibawakan atau ditanyakan kepada rasul. Perempuan berani mempertanyakan permasalahan kepada Rasulullah meski pun ada perempuan yang malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah SAW, utamanya Aisyah R.A, ikut berperan dalam memberikan penjelasan permasalahan khusus wanita.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Nur Sahed, "Geneologi pendidikan perempuan dalam islam: mengurai akar sosial-historis; Jurnal eL Tarbawi", Volume 13/No.1./2020, h. 27-28

2. Bentuk Pendidikan wanita dalam sejarah islam di Indonesia

Sebelum Raden Ajeng Kartini, pada tahun 1900, terdapat komunitas kecil untuk memajukan perempuan yang dipimpin oleh sekelompok perempuan yang ingin mendapatkan pendidikan Barat di kalangan raja-raja. Gerakan ini bermula dari kraton Paku Alam di Yogyakarta. Mereka berusaha untuk memperoleh pendidikan Barat. Lambat laun, kurang lebih pada abad ke-20 perempuan memperoleh kesempatan pendidikan sekolah, kesadaran akan hak perempuan dalam mendapatkan pendidikan semakin meluas. Kartini mulai membuka sekolahnya di rumahnya sendiri, Dewi Sartika mengespalai sekolah perempuan di Bandung pada tahun 1904. Juga atas dasar usaha warga pribumi didirikan Sekolah Koetaman Istri Minangkabau di Padang Panjang yang diprakarsai oleh seorang lulusan sekolah Koetaman Istri di Jawa Barat, kemudian sekolah “Kerajinan Amai Setia” di kota Gedang. Banyak keterampilan kerumah tanggaan yang diajarkan di sekolah-sekolah tersebut.¹⁵⁹

Dalam dinamika pergerakan perempuan Islam di Indonesia, pendidikan mendapatkan perhatian yang banyak. Ketika Datuk Sultan Maharaja mendirikan sekolah tenun putri di Padang sejak awal tahun 1909, saat itu sebenarnya telah masuk pendidikan kaum wanita dalam gagasan kemajuan kaum modernis. Dalam sejarah pendidikan perempuan Islam di Indonesia, ada tiga srikandi berasal dari Minangkabau yakni: pertama, Rahmah el-Yunusiah. Lahir di Padang Panjang pada tanggal 29 desember 1900, beliau merupakan keturunan ulama besar Minangkabau dari pasangan Syekh Muhammad Yunus dengan Rafi’ah. Kakeknya yang bernama Imaduddin merupakan seorang ulama ahli falak dan juga pimpinan tarekat Naqsyabandiyah. Melalui aktivitasnya, Rahmah disebut sebagai pelopor serta “Kartini perguruan Islam.” Rahmah merupakan pendiri Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, sebuah perguruan

¹⁵⁹ Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali 1984), H. 81-82

perempuan pertama di bumi Indonesia yang menjadi rangkaian sejarah pendidikan nasional.¹⁶⁰

Selain itu Pada saat itu juga, di tahun 1919, terdapat pondok pesantren dengan nama Mambaul Maarif khusus *banat* (perempuan). Pesantren ini didirikan oleh K.H. Bisri Syamsuri. Pada tahun 1930 berdiri sekolah/madrasah bagi seorang perempuan melihat perkembangan zaman yang menuntut pesantren. Hal tersebut menjadi suatu gebrakan baru, terlebih pada masyarakat desa yang tidak mau terafiliasi atau teradopsi budaya luar. Dengan demikian, dinilai wajar, jika pendirian pesantren berikut madrasah khusus perempuan tersebut mendapat beberapa tantangan masyarakat yang kurang memahami duduk persoalannya secara positif.¹⁶¹

3. Tokoh-tokoh wanita teladan Pendidikan wanita dalam sejarah islam di Indonesia

a. Sukainah bint al-Husain

Beliau wafat pada tahun 735 M, cicit Nabi merupakan tokoh perempuan ulama terkemuka di zamannya. Pemikirannya cemerlang, budi pekertinya indah, penyair besar, guru penyair Arab terkemuka: Jarir al-Tamimy dan juga Farazdaq. Ayahnya ; Imam Husain bin Ali, menyebut putri tercintanya ini: “*Amma Sukainah fa Ghalibun ‘alaiha al-Istighraq ma’a Allah*” (hari-harinya sering berkontempelasi). Beliau seringkali memberikan kuliah umum di hadapan publik laki-laki serta perempuan, termasuk para ulama, di masjid Umawi. beliau dikenal juga sebagai tokoh kebudayaan. Rumahnya dijadikan sebagai pusat aktifitas para budayawan dan juga para penyair.¹⁶²

¹⁶⁰ Ramayulis dan Samsul Nizar. *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam Di Dunia Islam Dan Indonesia* (Jakarta: Quatum Teaching;2005), H. 254

¹⁶¹ Abdul Aziz Masyhuri, *Al-Maghfurlah K.H. M. Bisri Syamsuri* (Surabaya: al-Ikhlash;1983), H. 37-38

¹⁶² Husein Muhammad, “Islam dan Pendidikan Perempuan; Jurnal Pendidikan Islam”, Volume III/ Nomor 2/ Desember 2014.

b. Fatimah Mernissi

Beliau Seorang intelektual perempuan yang cukup terkenal kelahiran Maroko telah mengarang sebuah buku berjudul; *The Forgotten Queen of Islam* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam buku tersebut Fatimah menjelaskan beberapa tokoh wanita atau lebih tepatnya sultanah-sultanah yang pernah memerintah di dunia Islam. beliau yang menyebutkan bahwa di Aceh telah memerintah sultanah yang tak dapat dinafikan keberadaannya dalam realitas sejarah. Para sultanah kerajaan Aceh di seajarkan dengan Sultanah Radhiyyah (berkuasa 1236 M) dari Dinasti Mughal India, Sayajarat al-Dur (berkuasa 1250 M) penguasa dari Dinasti Mamluk di Mesir serta Zainab al-Nafzawiyah (berkuasa 1107 M) di Afrika Utara. Pengarang ini menilai bahwa meskipun banyak pihak yang tidak senang dengan kepemimpinan perempuan, akan tetapi mereka tetap memerintah sampai ada fatwa dari Makkah yang menyatakan bahwa perempuan dilarang untuk memerintah.¹⁶³

c. Teungku Fakinah

Beliau merupakan seorang pendidik, ulama perempuan sekaligus seorang pejuang. beliau menguasai berbagai ilmu pengetahuan agama, sehingga disegani kawan sekaligus ditakuti oleh penjajah Belanda. beliau mendirikan sekaligus memimpin Dayah Lamdiran dan juga mengajar ilmu pengetahuan agama, para santrinya berasal dari seluruh Aceh.

d. Ummu Waraqah al-Anshariyah

Beliau Seorang perempuan muslim berasal dari suku Anshar yang termasuk dalam kelompok perempuan pertama yang masuk Islam serta ikut dibaiat oleh Rasulullah saw. Beliau dikenal sebagai penghafal al-

¹⁶³ Sri Astuti A. Samad, "Peran perempuan dalam perkembangan pendidikan islam di aceh (Kajian Terhadap Kontribusi Wanita dalam Tinjauan Sejarah);Jurnal Al-Maiyyah", Volume 9/No. 2/Juli-Desember 2016, H. 193

Quran dan juga turut mengumpulkan al-Quran. Oleh sebab itu Nabi saw memerintahkannya untuk menjadi imam bagi para wanita di daerahnya.¹⁶⁴

e. Jamilah binti Saad bin Rab

Beliau Terkenal dengan nama kunyah Ummu Saad. Kematian ayah beliau dalam perang Uhud menjadi sebab turunnya hukum waris. Ummu Saad tumbuh di rumah Abu Bakar ash-Shiddiq serta mendapat teladan terbaik dari sahabat Nabi saw tersebut. Ketika dewasa, Ummu Saad menikah dengan penulis wahyu Rasulullah, Zaid bin Tsabit. Ummu Saad belajar banyak hal dari suaminya sehingga beliau menjadi perempuan yang pandai dari kalangan Anshar.¹⁶⁵

4. Urgensi Pendidikan wanita dalam sejarah Islam di Indonesia

Ketika Islam hadir di semenanjung Arab, beberapa negara Barat yang didominasi oleh pandangan Romawi, Yunani dan juga Kristen yang masih memandang negatif terhadap wanita. Kemudian Islam muncul, merombak total pandangan tersebut sekaligus merekonstruksinya sedemikian rupa sehingga wanita tidak lagi dipandang sebagai sosok tubuh yang hina, akan tetapi diposisikan pada tempat yang mulia serta dapat melindungi jati diri kaum wanita.¹⁶⁶

Dalam konteks ke-Indonesian sebenarnya beberapa ulama perempuan yang kosen dalam pendidikan Islam dapat disebutkan misalnya pada saat kerajaan Aceh pernah diperintah oleh beberapa *Sulthanah* yang mempunyai kekuatan politis sekaligus kepakaran dalam ilmu agama Islam dan memiliki perhatian yang besar terhadap

¹⁶⁴ Sri Handayani, "Ummu Waraqah al-Anshariyah Wanita yang Mendapatkan Pahala Syahid; *Republika Dialog Jumat*, 26 Februari 2016, H. 10.

¹⁶⁵ Huwaida, "Perempuan islam dan pendidikan dalam lintasan sejarah", Vol. 1/ No. 1/ Maret 2015, H. 27

¹⁶⁶ Aprijon Efendi, "Eksistensi wanita dalam perspektif islam; muwazah", Volume 5/ Nomor 2/ Desember 2013, H. 226

keberlangsungan agama Islam melalui jalur pendidikan Islam sekaligus Dakwah Islam. Pada abad ke-20 muncul beberapa aktifis muslimah di Indonesia seperti Nyai Achmad Dahlan serta beberapa Nyai-Nyai (ulama'-ulama' perempuan) yang berkiprah dalam pesantren tradisional.¹⁶⁷

Bahkan tokoh emansipasi perempuan Indonesia Raden Ajeng Kartini menurut data yang termutakhir beliau juga pernah nyantri pada ulma' terkemuka di Jawa Tengah yang juga turut menginspirasi kesadaran perjuangannya bagi pendidikan perempuan, disamping intensnya Raden Ajeng Kartini dalam berinteraksi dengan teman-temannya yang ada di Belanda. Menariknya adalah bahwa Raden Ajeng Kartini sebagai bangsawan perempuan Jawa yang juga beragama Islam, juga pernah mendapatkan pendidikan dipondok pesantren yang berakar kuat dalam kepribadinya dalam mengangkat derajat perempuan dalam pendidikan. Raden Ajeng Kartini pernah belajar agama Islam kepada Kiai Soleh Darat.¹⁶⁸

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Separuh lebih di antaranya yaitu perempuan. Konstitusi NKRI telah memberikan ruang yang sama sekaligus setara bagi laki-laki dan juga perempuan untuk memasuki dunia pendidikan pada seluruh jenjangnya. Jumlah nominal kaum perempuan yang besar tersebut yakni potensial bagi kemajuan sekaligus kesejahteraan sebuah bangsa. Akan tetapi kemajuan ini hanya dapat diwujudkan jika dapat didorong serta dikembangkan potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan tersebut meliputi aspek nalar atau intelektual, moral dan juga spiritual. Pendidikan pada hakikatnya merupakan sebuah proses mengembangkan potensi tersebut untuk menjadi manusia utuh ataupun manusia utama. Dan hal ini mempersyaratkan sebuah

¹⁶⁷ Achmad Faisol Haq, " Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam; Jurnal Ilmu Pendidikan Islam", Vol. 04/ No. 01/ Maret 2020, H. 395

¹⁶⁸ Abidin, Zainal. *Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam pendidikan Islam*, Jurnal Tarbiyah Vol. 12 No.01 edisi Januari-juni 2015. H. 15

kondisi yang cukup sehat pada ketiga dimensi manusia tersebut. Kondisi yang sehat yakni sebuah ruang yang luas bagi ekspresi diri, tanpa hambatan serta tanpa kekerasan, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Maka dalam konteks seperti ini, perempuan harus dimerdekakan dari situasi kekerasan atas nama apapun untuk bisa mengembangkan potensi dirinya. Kebijakan publik harus dirumuskan untuk memungkinkan perempuan menjadi ahli atau ekspert untuk melaksanakan peran-peran sosial, politik serta kebudayaannya di samping dan juga bersama kaum laki-laki. Kedua jenis kelamin ini dituntut untuk bekerjasama membangun bangsa dalam relasi yang saling menghormati, selain menghormati dirinya masing-masing.

Perempuan menjadi sumber sekaligus pusat peradaban manusia. Di tangan merekalah masa depan bangsa serta kemanusiaan dipertaruhkan. Sebuah pepatah Arab populer mengatakan: *“Al-Mar’ah ‘Imad al-Bilad. Idza Shalihat Shaluha al-Bilad, wa Idza Fasadat Fasada al-Bilad”* (Perempuan ialah pilar Negara, bila baik, maka Negara akan menjadi baik, bila ia rusak, maka hancurlah Negara). Kata “shaluha” atau “shalih” secara literal bermakna baik, sehat, patut, kukuh, bermanfaat, damai, sesuai dan sebagainya.¹⁶⁹

C. Kesimpulan

Dalam paparan gerakan perempuan dalam perspektif sejarah dari masa awal Islam sampai dengan gerakan perempuan Islam di Indonesia bahwa adanya kesetaraan hak antar gender dalam dunia pendidikan serta pembelajaran. Kesamaan hak dan juga kesempatan untuk memperoleh pendidikan atas perempuan sudah terjadi pada masa awal Islam. Banyak para sahabat perempuan atau bahkan istri Nabi yang menjadi intelektual Muslimah sebagai guru atas perempuan Islam di waktu itu.

Perempuan merupakan seorang yang juga memiliki beberapa tabiat kepemimpinan dalam dirinya, sebab hal tersebut berdasarkan pada ada banyaknya tokoh-tokoh pendidikan baik di Indonesia maupun diluar Indonesia yang berasal dari

¹⁶⁹ Baca, *Lisan al Arab*, II/516-517 dan *Al Mu’jam al Wasith* I/520).

golongan perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam bidang ilmu pengetahuan.

Di Indonesia juga mempunyai tokoh yang lantang menyuarakan suara perempuan yakni Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng Kartini dengan lantang menyuarakan persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, bahkan Raden Ajeng Kartini pernah meminta kiai Sholeh Darat untuk menerjemahkan Al-Qur'an dalam bahasa Jawa supaya bisa dipahami dan juga dimengerti oleh masyarakat pada waktu itu.

D. Daftar Pustaka

Faisol Haq, Achmad, "Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam; Jurnal Ilmu Pendidikan Islam", Vol. 04/No. 01/Maret 2020.

Abidin, Zainal. *Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam pendidikan Islam*, Jurnal Tarbawiyah Vol. 12 No.01 edisi Januari-juni 2015.

Lisan al Arab, II/516-517 dan *Al Mu'jam al Wasith* I/520).

Handayani, Sri , "Ummu Waraqah al-Anshariyah Wanita yang Mendapatkan Pahala Syahid; *Republika Dialog Jumat*, 26 Februari 2016.

Huwaida, "Perempuan islam dan pendidikan dalam lintasan sejarah", Vol. 1/No. 1/Maret 2015.

Efendi, Aprijon, "Eksistensi wanita dalam perspektif islam; muwazah", Volume 5/Nomor 2/Desember 2013.

Sri Astuti A. Samad, "Peran perempuan dalam perkembangan pendidikan islam di aceh (Kajian Terhadap Kontribusi Wanita dalam Tinjauan Sejarah);Jurnal Al-Maiyyah", Volume 9/No. 2/Juli-Desember 2016.

Masyhuri, Abdul Aziz, *Al-Maghfurlah K.H. M. Bisri Syamsuri* (Surabaya: al-Ikhlash;1983).

Muhammad, Husein, “Islam dan Pendidikan Perempuan; Jurnal Pendidikan Islam”, Volume III/Nomor 2/Desember 2014.

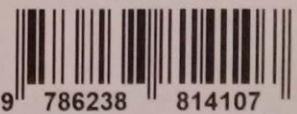
Suryochondro, Sukanti, *Potret Pergerakan Wanita Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali 1984).

Ramayulis dan Samsul Nizar. *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam Di Dunia Islam Dan Indonesia* (Jakarta: Quatum Teaching;2005).

Nur Sahed, “Geneologi pendidikan perempuan dalam islam: mengurai akar sosial-historis;Jurnal eL Tarbawi”, Volume 13/No.1,/2020.



ISBN 978-623-88141-0-7



9 786238 814107